

PENYULUHAN PERIKANAN

**Wa Ode Sry Wulan
Muh. Azril
Sri Herlina
Endang Gunaisah
Trisnani
Akmaluddin
Reski Fitriah**



GET PRESS INDONESIA

PENYULUHAN PERIKANAN

Penulis :

Wa Ode Sry Wulan
Muh. Azril
Sri Herlina
Endang Gunaisah
Trisnani
Akmaluddin
Reski Fitriah

ISBN :

Editor : Ari Yanto, M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Penyuluhan Perikanan ini.

Buku Ini Membahas Peran strategis penyuluhan dalam pembangunan Perikanan, Perkembangan penyuluhan Perikanan di Indonesia, Filosofi, definisi, dan prinsip serta tujuan penyuluhan Perikanan, Dinamika kelompok nelayan, partisipasi dalam penyuluhan Perikanan, Pengembangan sumber daya penyuluh yg profesional dan kompeten, Pengantar perencanaan dan evaluasi program penyuluhan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PERAN STRATEGIS PENYULUHAN	
DALAM PEMBANGUNAN PERIKANAN	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Peran Strategis Penyuluhan Perikanan	4
1.2.1 Penyampaian informasi penyuluhan perikanan...	6
1.2.2 Penyaluran Sarana Produksi Perikanan.....	8
1.2.3 Proses Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	10
1.3 Langkah Strategis Penyuluhan Perikanan	13
DAFTAR PUSTAKA	17
BAB 2 PERKEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN	
DI INDONESIA.....	19
2.1 Pendahuluan.....	19
2.2 Sejarah Perkembangan Penyuluhan Pembangunan di Indonesia.....	19
2.2.1 Masa Sebelum Kemerdekaan (1817-1945)	21
2.2.2 Masa Kemerdekaan (1945-1966).....	23
2.2.3 Masa Orde Baru (1966-1998)	23
2.2.4 Masa Setelah Reformasi atau Otonomi Daerah (1998-sekarang).....	26
2.3 Perkembangan Penyuluhan Perikanan di Indonesia ..	28
2.3.1 Masa Sebelum Kemerdekaan	28
1.3.2 Masa Setelah Kemerdekaan	29
DAFTAR PUSTAKA	33
BAB 3 FILOSOFI, DEFINISI, PRINSIP DAN TUJUAN	
PENYULUHAN PERIKANAN	35
3.1 Pendahuluan.....	35
3.2 Filosofi Penyuluhan	35
3.2.1 Penyuluh sebagai ilmu.....	36
3.2.2 Penyuluhan Membantu Diri Sendiri	37
3.2.3 Penyuluhan Demokrasi.....	37

3.2.4 Penyuluhan Kontiyu	38
3.2.5 Penyuluhan Kerjasama	38
3.3 Pengertian Penyuluhan	39
3.4 Prinsip-prinsip penyuluhan	41
3.5 Tujuan Penyuluhan	42
3.5.1 Waktu Pencapaian	43
3.5.2 Perubahan Perilaku Sasaran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
BAB 4 DINAMIKA KELOMPOK NELAYAN	47
4.1 Pendahuluan	47
4.2 Pengertian Dinamika	48
4.3 Dinamika Kelompok	48
4.4 Unsur-Unsur Dinamika Kelompok	49
4.4.1 Tujuan Kelompok	49
4.4.2 Kekompakan Kelompok	50
4.4.3 Struktur Kelompok	50
4.4.4 Fungsi dan Manfaat Dinamika	50
4.4.5 Kedinamisan Kelompok	50
4.5 Dinamika Kelompok Nelayan	51
4.6 Metode Dinamika Kelompok	54
4.6.1 Tahap <i>Unfreezing</i>	55
4.6.2 Tahap <i>Moving</i>	55
4.7 Skema Metode Dinamika Kelompok	56
4.7.1 Proses Mengenal Diri Sendiri	56
4.7.2 Mengenal Orang lain	57
4.7.3 Pembentukan Kelompok	57
4.7.4 Pertumbuhan Kelompok	59
4.7.5 Proses Pengenalan dan Membangun Kelompok ..	60
4.7.6 Nilai-nilai, Norma, dan Komitmen Belajar Bersama	60
4.8 Penutup	62
DAFTAR PUSTAKA	63
BAB 5 PARTISIPASI DALAM PENYULUHAN	65
5.1 Pendahuluan	65
5.2 Partisipasi Masyarakat	67
5.3 Jenis Partisipasi Masyarakat	70
5.4 Tahap Partisipasi	72

5.5 Partisipasi dalam Penyuluhan Perikanan.....	75
5.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat.....	77
5.6.1 Faktor Pendukung Keberhasilan Partisipasi Masyarakat.....	77
5.6.2 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	85
BAB 6 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PENYULUH YANG PROFESSIONAL DAN KOMPETEN	89
6.1 Strategi Pengembangan Sumberdaya Penyuluh Perikanan	89
6.1.1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan.....	89
6.1.2 Penggunaan Teknologi dalam Penyuluhan	97
6.1.3 Kerjasama Stakeholder	101
6.2 Model Pengelolaan Karir Penyuluh Perikanan	106
6.2.1 Pemetaan Karir	107
6.2.2 Insentif dan Penghargaan	108
6.2.3 Jaringan Profesional.....	110
6.3 Rekomendasi.....	113
6.3.1 Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Perikanan	113
6.3.2 Langkah-langkah Implementasi.....	123
DAFTAR PUSTAKA	134
BAB 7 PENGANTAR PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM PENYULUHAN	137
7.1 Pendahuluan.....	137
7.2 Perencanaan Program Penyuluhan	138
7.2.1 Pengertian Perencanaan Program Penyuluhan.....	138
7.2.2 Tujuan dan Manfaat Program Penyuluhan.....	138
7.2.3 Dasar Pemikiran Perencanaan Program Penyuluhan.....	139
7.2.4 Prinsip Perencanaan Program Penyuluhan	140
7.2.5 Tahapan Dalam Perencanaan Program Penyuluhan.....	142
7.3 Evaluasi Program Penyuluhan.....	143
7.3.1 Tujuan Evaluasi Program Penyuluhan.....	144
7.3.2 Manfaat Evaluasi Program Penyuluhan	145

DAFTAR PUSTAKA..... 147

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Masa Perkenalan	54
Gambar 4.2. Tes Awal.....	58
Gambar 6.1. Ratusan Penyuluh Perikanan Ikuti Pelatihan di Penas XVI Guna Sukseskan Program Ekonomi Biru	97
Gambar 6.2. Salahsatu media sosial yang digunakan oleh BPPSDM PUSLATLUHKP pada aplikasi instagram dan website sebagai wadah memperkenalkan program ke penyuluh perikanan dan masyarakat.....	99
Gambar 6.3. Bupati Tangerang Resmikan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Kabupaten Tangerang	103
Gambar 6.4. Penyuluh Perikanan Dampingi Penyaluran Bantuan Benih Ikan ke kelompok masyarakat pelaku usaha perikanan.	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kepuasan Nelayan terhadap Pelaksanaan Penyuluhan	7
Tabel 1.2. Sarana Produksi Perikanan yang disalurkan oleh Penyuluh Perikanan.....	9
Tabel 1.3. Aspek Pengetahuan Olahan Hasil Perikanan.....	11

BAB 1

PERAN STRATEGIS PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN PERIKANAN

Oleh Wa Ode Sry Wulan

1.1 Pendahuluan

Perikanan adalah salah satu sektor terpenting sebagai bahan penyediaan pangan untuk umat manusia. Perikanan terdiri dari perikanan darat dan lautan yang berupa kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kegiatan-kegiatan perikanan tersebut meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan beserta pelestarian lingkungannya yang dimulai dari pengelolaan, pra produksi, produksi hingga pemasaran. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, apabila sumber daya manusia memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat membawa perubahan pada sektor perikanan. Oleh karena itu, penyuluh di sektor perikanan sangat dibutuhkan guna memberikan edukasi tentang perikanan kepada masyarakat khususnya di pedesaan atau daerah-daerah terpencil yang masih minim pengetahuan tentang perikanan.

Penyuluhan adalah suatu proses kegiatan memberikan informasi yang bersifat mendidik untuk mengubah pengetahuan, keterampilan dan perilaku seseorang yang disuluh (orang yang mendapatkan informasi) sehingga dapat meningkat kesejahteraan hidup orang tersebut secara mandiri. Orang yang mendapatkan informasi biasa disebut dengan sasaran penyuluh atau penerima manfaat. Sasaran penyuluh atau penerima manfaat meliputi pelaku usaha dan pelaku utama di sektor perikanan seperti petani tambak, petani rumput laut, pembudidaya ikan, nelayan dan lain sebagainya. Sedangkan penyuluh adalah orang yang mendidik atau yang memberikan informasi. Informasi pengetahuan dalam sektor

perikanan meliputi pra produksi ikan, produksi, panen, hingga pengelolaan dan pemanfaatan hasil perikanan/sumber daya alam perikanan. Dari hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyuluhan perikanan adalah suatu kegiatan yang memberikan informasi/pengetahuan/keterampilan tentang perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, panen hingga pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan kepada sasaran penyuluh atau penerima manfaat guna meningkatkan kesejahteraan hidup.

Penyuluhan perikanan sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang memiliki usaha atau pekerjaan di sektor perikanan. Hal ini dikarenakan sektor perikanan memiliki kontribusi dalam perekonomian nasional. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga dapat dipastikan 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari laut yang berpotensi setiap tahunnya dapat meningkatkan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan meningkatkan bisnis perikanan dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat (Aidore, Rimate, & Rotinsulu, 2020). Di titik inilah, peran penyuluhan perikanan dibutuhkan di masyarakat guna memberikan informasi/pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang melimpah. Produk perikanan yang melimpah, jika dikelola dengan baik maka akan meningkatkan pembangunan di sektor perikanan.

Pembangunan perikanan adalah pembangunan sektoral yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti menciptakan tenaga kerja dan pendapatan daerah maupun nasional. Pembangunan perikanan perlu dilakukan secara adil dan merata sehingga potensi-potensi sumber daya alam perikanan yang terdapat pada berbagai daerah dapat dimanfaatkan dan dikelola secara efisien serta tepat sasaran. Namun menurut Syauckani, M (2004) menyatakan bahwa pembangunan perikanan memiliki beberapa masalah diantaranya yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dalam pengembangan sektor perikanan;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan sektor perikanan;

3. Keterbatasan modal usaha sehingga pelaku usaha dan pelaku utama tidak dapat mengembangkan ataupun keberlanjutan usaha perikanan;
4. Keterbatasan tentang inovasi teknologi kebaruan yang diakibatkan oleh kurangnya mengakses informasi;
5. Keterbatasan dalam memasarkan hasil produksi perikanan karna kurangnya promosi dan pemahaman tentang sistem perdagangan/bisnis perikanan;
6. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya produk dan produksi perikanan dalam pembangunan sektor perikanan.

Masalah-masalah pembangunan perikanan tersebut menjadi tugas seorang penyuluh perikanan untuk mencari cara bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Menurut Purnomo WH, *et al* (2018) bahwa penyuluh perikanan memiliki tugas yang sangat penting dalam pembangunan perikanan. Adapun tugas seorang penyuluh perikanan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai hidup masyarakat dengan cara melakukan perubahan-perubahan pada diri masyarakat dari yang tak bernilai menjadi bernilai melalui pembinaan, sharing permasalahan lalu mengidentifikasi masalah, membantu dan membimbing masyarakat memecahkan masalah dalam tindak laku nyata;
2. Penyediaan laboratorium penyuluhan perikanan yang perlu dipelihara dan dijaga guna meningkatkan sarana dan prasana;
3. Pendampingan dan membimbing masyarakat dalam kegiatan usaha perikanan;
4. Meningkatkan kerjasama antara pelaku utama dan pelaku usaha serta mengembangkan kewirausahaan dalam bisnis sektor perikanan;
5. Mengidentifikasi teknologi kebaruan lalu memberikan pengetahuan/pengajaran tentang teknologi kebaruan tersebut;
6. Menyusun, menerapkan dan mengembangkan materi dan metode penyuluhan perikanan;
7. Menyusun programa rencana kerja penyuluhan perikanan;

8. Pelaporan hasil evaluasi penyuluhan perikanan.

Dari melihat masalah dan tugas seorang penyuluh perikanan maka peran strategis penyuluh dibutuhkan dengan meramuk ide-ide atau gagasan sebagai penetralisir masalah sektor perikanan yang menghambat proses pembangunan perikanan.

1.2 Peran Strategis Penyuluhan Perikanan

Penyuluhan perikanan adalah kegiatan pembelajaran kepada sasaran penyuluh guna menunjang kesejahteraan perekonomian sasaran penyuluh secara mandiri. Pembelajaran dilakukan untuk memberikan informasi pengetahuan baik keterampilan maupun teknologi kebaruan tentang pemanfaatan usaha sumber daya perikanan tepat guna. Hal ini bertujuan untuk menepis kesenjangan ilmu pengetahuan diantara sesama sasaran penyuluh (pelaku utama dan pelaku usaha) dalam mengelola usaha perikanan. Selain itu, pembelajaran juga dilakukan untuk memberikan perubahan-perubahan positif yang membangun dan mengembangkan usaha sektor perikanan. Metode pembelajaran yang kebanyakan dilakukan penyuluh perikanan adalah sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku utama dan pelaku usaha serta masyarakat yang ingin mengguluti dunia usaha perikanan. Materi penyampaian pembelajaran yang disampaikan menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami oleh sasaran penyuluh. Metode, materi dan komunikasi yang baik diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk mengembangkan usaha sektor perikanan. Seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran merupakan langkah dalam mencapai tujuan kegiatan penyuluhan perikanan sebagai bagian dari peran strategis penyuluhan perikanan.

Peran strategis penyuluhan perikanan yaitu aktif dalam meningkatkan dan memajukan pembangunan usaha sektor perikanan. Hal ini dikarenakan penyuluh memiliki keterlibatan secara langsung dengan sasaran penyuluh. Hubungan keterlibatan ini menjadikan penyuluh dan sasaran harus memiliki kedekatan emosional yang intim agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Seorang penyuluh perikanan harus mampu membangun kerjasama terhadap mitra dan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi

dalam memberikan pemahaman, meningkatkan kesadaran masyarakat dan menggerakkan/mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan usaha dan pelestarian sumber daya perikanan berkelanjutan karena pembangunan usaha sektor perikanan tidak hanya berpusat pada peningkatan pertumbuhan produksi perikanan melainkan penerapan usaha perikanan berkelanjutan. Usaha perikanan berkelanjutan ini sebagai penentu keberhasilan tujuan pencapaian dari seorang penyuluh perikanan.

Selain usaha perikanan berkelanjutan, keberhasilan penyuluhan perikanan ditentukan oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Pemerintah/lembaga dan pemangku kepentingan;
Pemerintah/lembaga dan pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang cukup kuat sebagai penarik minat sasaran penyuluh untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan sektor perikanan.
2. Pemilihan metode dan penyampain materi penyuluhan perikanan;
Metode dan materi yang tepat seperti mensosialisasikan tentang isu terkini atau melakukan pelatihan terhadap sasaran penyuluh perikanan mengenai inovasi teknologi kebaruan.
3. Demokrasi;
Memberikan ruang atau kesempatan kepada sasaran penyuluh untuk mengeluarkan dan memberikan pendapat/ide/gagasan dalam suatu kegiatan penyuluhan perikanan.
4. Terjadinya perubahan perilaku positif;
Perubahan perilaku yang positif meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berkualitas.
5. Komunikasi;
Penyampaian informasi dengan tutur kata yang lembut dan bahasa yang mudah dimengerti.

Keberhasilan pencapaian penyuluhan perikanan dalam pembangunan perikanan, tidak terlepas dari adanya peran strategis penyuluhan perikanan itu sendiri. Adapun peran strategis

penyuluhan perikanan dalam pengembangan sumber daya perikanan adalah sebagai berikut (Putri, JA; Yuniarti, T; Dewi, IJP, 2019):

1. Penyampaian informasi penyuluhan perikanan;
2. Penyaluran sarana produksi perikanan;
3. Proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

1.2.1 Penyampaian informasi penyuluhan perikanan

Informasi adalah fakta atau data atau gagasan yang memiliki makna penting bagi penerima informasi. Informasi penyuluhan perikanan adalah data atau fakta atau gagasan yang terkait dengan sumber daya perikanan. Fakta atau data atau gagasan ini dibutuhkan oleh penerima manfaat atau sasaran penyuluh perikanan sebagai ilmu pengetahuan atau keterampilan yang perlu dikembangkan. Informasi penyuluhan perikanan yang disampaikan kepada sasaran penyuluh berupa isu-isu terkini dan teraktual serta inovasi teknologi kebaruan. Penyampaian informasi harus menggunakan bahasa yang sederhana, tutur kata komunikasi yang baik dan sikap yang membimbing dengan tujuan agar sasaran penyuluh mudah memahami dan antusias serta menarik minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan pembangunan sumber daya perikanan. Semakin banyak minat sasaran untuk mau mengikuti dan mencoba menerapkan inovasi teknologi yang disampaikan oleh penyuluh perikanan maka tingkat keberhasilan kegiatan suatu penyuluhan perikanan semakin tinggi.

Informasi sumber daya perikanan perlu disebarluaskan dalam setiap kegiatan penyuluhan perikanan karena pada dasarnya proses kegiatan penyuluhan perikanan harus terus berlanjut sampai sasaran penyuluh mengalami perubahan-perubahan perilaku positif guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (Safrida; Makmur, T; Fachri, H, 2015).

Pada kasus di lapangan, beberapa pelaku utama ogah-ogahan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan perikanan. Seperti contoh, kelompok petani tambak mau mengikuti kegiatan penyuluhan dan sangat mudah diarahkan dalam menerapkan dan memberikan pemahaman serta pembelajaran mengenai pengembangan sumber daya perikanan. Tetapi, ada beberapa para nelayan tidak mau

mengikuti kegiatan penyuluhan perikanan karena mereka masih menganggap kegiatan penyuluhan perikanan tidak memberikan kontribusi nyata terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan para nelayan yang mengikuti kegiatan penyuluhan perikanan tidak mengikuti solusi atau saran dari penyuluh mengenai masalah yang dihadapi saat ini. Meskipun begitu, penyuluh perikanan tetap harus bekerja keras dan pantang menyerah untuk selalu merangkul, mendekatkan diri secara emosional dan membimbing pelaku utama agar mau terus belajar dan mengikuti saran atau solusi yang diberikan penyuluh. Proses monitoring penyuluh terhadap pelaku utama juga terus dilakukan sebagai upaya bentuk tanggung jawab penyuluh untuk mensejahterakan sasaran penyuluh.

Penyampaian informasi tidak terlepas dari adanya komunikasi. Komunikasi yang digunakan penyuluh harus mudah dipahami oleh sasaran penyuluh. Begitu pula, media yang digunakan dan cara menyampaikan informasi harus dimengerti dan dipahami oleh penyuluh dan sasaran. Sistem komunikasi yang digunakan dalam proses penyampaian informasi yaitu sistem komunikasi dua arah dengan tujuan penyuluh dan sasaran bisa saling tukar informasi dan pendapat sehingga menimbulkan rasa saling pengertian diantara keduanya (Ranum, GAR, 2018).

Tabel 1.1. Kepuasan Nelayan terhadap Pelaksanaan Penyuluhan.

Kriteria	Jumlah Total Skor	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Tidak Puas	6 – 13	30	44,1 %
Cukup Puas	14 – 21	25	36,8 %
Puas	22 – 30	13	19,1 %
Jumlah		68	100 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2022 (Metalisa, R; , Zulkarnain; , Mahrunnisa; Yanti, CW, 2023)

Menurut Metalisa, R; Zulkarnain; Mahrunnisa; Yanti, CW (2023) bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpuasan para nelayan selama kegiatan penyuluhan perikanan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Materi informasi yang disampaikan kepada penyuluh perikanan tidak sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi sehingga tidak memberikan pengaruh perubahan nyata terhadap kesulitan nelayan;
2. Penyuluh tidak menguasai materi secara menyeluruh dan kurang terarah sehingga penyampaian informasi yang ingin disampaikan tidak dipahami dan dicerna dalam pemikiran nelayan;
3. Penyuluh kurang kompeten dalam memberikan ide atau gagasan mengenai solusi dari permasalahan yang ada.

Faktor-faktor di atas, jika tidak segera diatasi oleh penyuluh maka akan berdampak buruk terhadap keberhasilan kegiatan penyuluhan perikanan sehingga memberikan efek nyata terhadap penurunan pengembangan sumber daya perikanan yang dapat menghambat pembangunan perikanan seperti pertumbuhan produksi hasil tangkapan ikan yang menurun yang akan berkorelasi dengan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Peran penyuluh sebagai pemberi informasi dalam kegiatan penyuluhan perikanan tidaklah mudah. Penyuluh dituntut untuk menyampaikan informasi dan inovasi teknologi kebaruan yang bisa diterima oleh sasaran penyuluh. Penyampain informasi seorang penyuluh harus mampu menarik minat dan mudah dipahami serta diserap oleh sasaran sehingga seorang penyuluh harus menguasai materi informasi. Bahkan solusi yang ditawarkan pun harus bisa diterima oleh sasaran. Mewujudkan sasaran penyuluh mandiri dan sejahtera bukan hanya membutuhkan kemampuan menguasai materi informasi dan inovasi terbaru, melainkan kerja keras dan kesabaran hati yang lapang dalam menerima segala keluh kesah sasaran penyuluh demi perwujudan pengembangan dan pemanagunaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

1.2.2 Penyaluran Sarana Produksi Perikanan

Sarana merupakan salah satu faktor pembatas dalam pengembangan dan pembangunan sumber daya perikanan. Bantuan sarana dibutuhkan oleh wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya perikanan melimpah. Bahkan penyuluh dan penerima

manfaat/sasaran penyuluh juga membutuhkan sarana untuk menunjang kegiatan penyuluhan perikanan. Tanpa adanya bantuan sarana, kegiatan penyuluhan perikanan tidak akan berjalan secara efisien. Seperti contoh, banyaknya lahan kosong yang tidak termanfaatkan dan penggunaan teknologi tradisional yang dilakukan oleh pelaku utama dikarenakan tidak adanya alat sarana dan prasarana yang dapat membantu pengelolaan kegiatan perikanan (Putri, JA; Yuniarti, T; Dewi, IJP;, 2019). Disinilah, peran pemerintah atau lembaga instansi terkait wajib memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk membantu kelancaran keberhasilan kegiatan penyuluhan perikanan.

Adapun sarana yang paling diminati oleh sasaran penyuluh dan dapat menunjang pengembangan sumber daya perikanan untuk mencapai keberhasilan penyuluhan perikanan adalah bantuan sarana produksi perikanan. Bantuan tersebut adalah berupa teknologi modern pengelolaan kualitas air, bibit ikan, alat-alat perikanan, karamba dan lain sebagainya. Penyediaan bantuan sarana produksi perikanan dapat memberikan efektivitas terhadap kegiatan pengembangan dan pembangunan sektor perikanan. Penyaluran sarana produksi perikanan dilakukan oleh penyuluh perikanan.

Tabel 1.2. Sarana Produksi Perikanan yang disalurkan oleh Penyuluh Perikanan

No	Sarana Produksi Perikanan	Fungsi Sarana Produksi
1.	Karamba	Tempat pembesaran/pemeliharaan ikan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan
2.	Bibit Ikan	Bibit ikan yang digunakan dalam proses budidaya
3.	Kolam peranakan ikan	Tempat ikan bereproduksi
4.	GPS (<i>Global Positioning System</i>)	Membantu nelayan dalam mengetahui posisi ikan di laut

Sumber: Data Primer diolah 2014 (Safrida; Makmur, T; Fachri, H;, 2015)

Penyuluh perikanan tidak hanya membantu penyaluran sarana produksi kepada sasaran penyuluh sesuai kebutuhan tetapi penyuluh juga mensosialisasikan dan mendemonstrasikan cara penggunaan sarana produksi tersebut. Seperti contoh, GPS adalah teknologi modern yang membantu nelayan dalam mencari posisi ikan. Tidak semua nelayan mengetahui penggunaan alat tersebut maka penyuluh perikanan membantu mengajarkan kepada nelayan selaku pelaku utama bagaimana cara penggunaan alat sarana produksi tersebut (Safrida; Makmur, T; Fachri, H., 2015). Selain itu juga, alat tersebut ramah lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem perairan dan pelestarian lingkungan terjaga. Sarana produksi jika termanfaatkan dengan baik maka akan membantu meningkatkan keberhasilan pertumbuhan produksi perikanan bagi para sasaran penyuluh yang tentunya akan berdampak pada pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

1.2.3 Proses Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Produksi pertumbuhan sumber daya perikanan yang terus meningkat tidak pernah terlepas dari adanya proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan karna kegiatan perikanan merupakan rangkaian dari kegiatan bisnis usaha perikanan yang menambah nilai ekonomi bagi pelaku utama dan pelaku usaha sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan serta pembangunan perikanan.

Hasil produksi perikanan terbagi menjadi dua yaitu produk mentah dan produk konsumsi. Produk mentah membutuhkan proses pengolahan sementara produk konsumsi dan produk hasil pengolahan membutuhkan pasar. Pada tahap inilah, peran penyuluhan perikanan dibutuhkan sebagai agen fasilitator bagi para sasaran penyuluh (pelaku utama dan pelaku usaha).

Penyuluh perikanan akan membantu pelaku usaha dalam mengolah bahan mentah hasil perikanan. Biasanya penyuluh akan melakukan pelatihan dan demonstrasi bagaimana melakukan proses pengolahan bahan mentah hasil perikanan menjadi suatu produk ekonomi. Misalnya, dalam proses pengolahan produk kripik lele, penyuluh akan melakukan metode demonstrasi cara pengolahan produk tersebut. Penyuluh akan mempersiapkan materi pengolahan

produk kripiik lele dan akumulasi anggaran produk serta menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan demonstrasi cara (Mustaqim, NA; Nuraini, Y., 2019).

Tabel 1.3. Aspek Pengetahuan Olahan Hasil Perikanan

No	Nama	Jumlah <i>Pre-test</i>	Jumlah <i>Post-test</i>
1.	Fitria Anggraeni	8	10
2.	Dewi Safitri	8	10
3.	Fadma Wati	8	10
4.	Sulisti Awati	6	9
5.	Resmi Nur Z	8	10
6.	Safitri Rizkia	9	10
7.	Siti Nur A	9	9
8.	Qori'atun	5	10
9.	Seiska Idelia S	8	9
10.	Azizah D	8	10
Jumlah		77	97
Rata-rata		7.7	9.7

Sumber: Buletin JSJ, 2019 (Mustaqim, NA; Nuraini, Y., 2019)

Pada umumnya, sasaran penyuluh tidak begitu mengetahui bagaimana cara mengolah produk mentah hasil perikanan sehingga penyuluh perikanan hadir untuk mengajarkan dan membimbing sasaran hingga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola hasil perikanan. Seperti dilihat pada tabel 3.1 bahwa sasaran yang telah menjalani “demonstrasi cara” dalam melakukan pengolahan hasil perikanan mengalami kemajuan dan perubahan ilmu pengetahuan serta keterampilan inovasi olahan hasil perikanan

dari “tidak tahu” menjadi “tahu” sehingga memberikan dampak positif bagi keberhasilan kegiatan penyuluh perikanan (Mustaqim, NA; Nuraini, Y., 2019). Hal ini dikarenakan metode demonstrasi cara yang dilakukan penyuluh adalah agar sasaran penyuluh dapat melihat dan mempraktekan secara langsung proses pengolahan produk mentah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis dengan harapan bahwa sasaran penyuluh mau mengembangkan produk pengolahan tersebut sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup.

Penyuluh perikanan juga membantu sasaran penyuluh dalam memasarkan produk konsumsi maupun produk hasil olahan perikanan. Penyuluh mencari jaringan pemasaran dan relasi sebagai tempat untuk memasarkan produk hasil perikanan. Tidak hanya sampai disitu, penyuluh juga harus melakukan pengembangan jaringan pemasaran dan melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagai upaya penyaluran hasil produksi perikanan. Biasanya produk hasil perikanan langsung dijual ke pasar tradisional, pasar modern bahkan pasar internasional. Distribusi produk konsumsi yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap sasaran penyuluh seperti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup. Misalnya ikan hasil tangkapan nelayan dijual kepada pabrik-pabrik yang bergerak dibidang perikanan seperti pabrik tepung ikan dan pabrik pengalengan (Suherman, A; Dault, A., 2009).

Di zaman modern saat ini, permintaan pasar akan produk olahan hasil perikanan semakin meningkat. Penyuluh perikanan dituntut untuk memberikan informasi dan inovasi terbaru kepada sasaran penyuluh (pelaku utama dan pelaku usaha) terkait produk-produk olahan yang disukai atau paling diminati di pasaran. Ada beberapa kriteria yang menjadi penentu pemasaran suatu produk diantaranya adalah jenis komoditas, sifat dan karakteristik produk. Kriteria-kriteria tersebut menjadi penentu pemasaran produk perikanan Indonesia untuk bersaing di kanca internasional sehingga mutu dan kualitas produksi hasil perikanan perlu diperhatikan.

Indonesia telah mengekspor beberapa jenis hasil perikanan dan produk hasil olahan perikanan ke pasar internasional. Hal ini membuktikan bahwa produk hasil perikanan Indonesia memiliki mutu dan kualitas yang mampu bersaing di mancanegara. Meskipun

begitu, pengembangan perikanan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan tetap harus terjaga sehingga ekosistem perairan tetap bisa memproduksi sumber daya perikanan yang melimpah.

Peran strategis penyuluh perikanan dalam menentukan keberhasilan kegiatan penyuluhan perikanan terhadap sasaran penyuluh (pelaku utama dan pelaku usaha) sangat bergantung pada keberhasilan seorang penyuluh dalam menyampaikan informasi/materi dengan menggunakan bahasa yang baik sehingga mudah dipahami, seorang penyuluh juga harus menguasai teknologi inovasi terbaru sehingga ketika ada bantuan sarana dari pemerintah dan lembaga maka penyuluh dapat mengajarkan dan memberikan pelatihan tentang pengaplikasian sarana tersebut. Hasil perikanan pun tidak akan bermanfaat tanpa pasar maka tugas penyuluh untuk membangun relasi dan membuka jalan sebagai pasar bagi sasaran penyuluh. Semakin tepat pemasaran hasil produksinya maka semakin tinggi pendapatan dan kesejahteraan hidup sasaran penyuluh pun ikut meningkat. Jika semua itu berkorelasi dengan baik maka pembangunan dan pengembangan sumber daya perikanan berkelanjutan bisa terwujud serta tujuan dan pencapaian para penyuluh perikanan dikatakan berhasil.

1.3 Langkah Strategis Penyuluhan Perikanan

Penyuluhan perikanan adalah suatu kegiatan kolaborasi strategis yang dilakukan penyuluh terhadap sasaran penyuluh (pelaku utama dan pelaku usaha) sebagai upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta kesejahteraan hidup sasaran penyuluh. Kegiatan kolaborasi strategis dimaksudkan agar penyuluh dan sasaran penyuluh bekerjasama saling bantu membantu dalam mewujudkan pengembangan dan pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Sumber daya perikanan yang berkelanjutan menjadi warisan bagi anak dan cucu kita di masa depan.

Perwujudan pengembangan dan pembangunan perikanan berkelanjutan membutuhkan langkah-langkah strategis yang tepat dan efisien. Langkah-langkah strategis tersebut diantaranya meliputi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi perikanan;

Identifikasi wilayah yang memiliki potensi perikanan bukan hanya sekedar melihat potensi sumber daya perikanan yang melimpah melainkan sumber daya manusianya juga. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyuluh dalam menyusun program penyuluhan perikanan sehingga program kegiatan penyuluhan lebih terstruktur dan efektif. Sebagai contoh, wilayah yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah sangat perlu dilestarikan sebagai perikanan berkelanjutan. Penyuluh diwajibkan melakukan sosialisasi, pelatihan, diskusi kelompok, ceramah, seminar dan metode penyuluhan lainnya. Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan perlu diterapkan dan berdayakan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan perairan beserta ekosistemnya. Begitu pula dengan sumber daya manusianya yang mau belajar, cepat tanggap dan mau melakukan perubahan positif maka akan lebih membantu para penyuluh dalam melakukan pencapaian keberhasilan kegiatan penyuluhan yang dapat membangun dan mengembangkan sektor perikanan.

2. Pendekatan terhadap pemangku kepentingan umum;

Di dalam kegiatan penyuluhan perikanan, seorang penyuluh harus melakukan pendekatan yang intim dan intens terhadap pemangku kepentingan karena pemangku kepentingan memiliki andil yang luar biasa dalam tercapainya keberhasilan kegiatan penyuluhan. Pemangku kepentingan meliputi pemerintah, lembaga terkait, peneliti, ketua adat, pers, dan lain sebagainya. Pemerintah atau lembaga terkait berperan dalam membantu penyediaan modal, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sasaran penyuluh. Ide ataupun hasil *research* dari seorang peneliti dibutuhkan sebagai penambahan ilmu pengetahuan seorang penyuluh terutama mengenai teknologi inovasi kebaruan seperti inovasi pengolahan produk hasil perikanan. Ketua adat juga memiliki peran yang sangat bermanfaat yaitu sebagai penghubung yang baik antara sasaran penyuluh dan

penyuluh. Demikian pula dengan pers, bisa menjadi sumber publikasi ataupun promosi bagi produk hasil perikanan sehingga produk hasil perikanan yang telah dihasilkan oleh sasaran penyuluh bisa dikenal masyarakat luas. Begitu pula pemangku kepentingan lainnya, memiliki andil yang bermanfaat untuk penyuluh dan sasaran penyuluh.

3. Pendekatan komunikasi

Komunikasi adalah kunci penghubung interaksi diantara manusia. Penyuluh perikanan harus mampu berkomunikasi dengan baik terhadap sasaran penyuluh dan pemangku kepentingan serta tokoh-tokoh yang ikut serta dalam kegiatan penyuluhan. Komunikasi yang baik artinya penyuluh dituntut untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami sehingga artikulasi harus jelas. Bahkan tutur kata seorang penyuluh harus lembut dan ramah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan-pesan yang bermakna antara individu yang satu dengan individu yang lainnya (Ranum, GAR, 2018). Penyampaian pesan-pesan oleh penyuluh berupa penyampaian materi yang berisi informasi tentang perikanan dan diharapkan adanya respon dari sasaran penyuluh. Respon ini tidak boleh diabaikan oleh penyuluh melainkan harus ditanggapi dengan menggunakan tutur bahasa yang baik dan mudah dipahami. Komunikasi juga bisa diandalkan dalam mengidentifikasi permasalahan sasaran penyuluh.

4. Pendekatan kerjasama

Membangun kerjasama dan relasi sangat diperlukan dalam kegiatan penyuluhan perikanan. Penyuluh harus mengembangkan kerjasama kepada perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak pada sektor perikanan. Hal ini untuk mempermudah penyuluh dalam mendapatkan pangsa pasar yang tentu saja akan berguna bagi sasaran penyuluh. Selain itu, penyuluh juga harus membangun kerjasama dengan perusahaan periklanan agar sasaran penyuluh mendapatkan

kemudahan dalam mempromosikan produk hasil perikanannya.

Penerapan langkah-langkah strategis di atas diharapkan dapat memiliki efektifitas dalam mengubah perilaku sasaran penyuluh/penerima manfaat dan masyarakat sehingga keberhasilan penyuluh perikanan dalam mencapai tujuan kegiatan penyuluhan terlaksana dengan baik. Pemberdayaan, pengembangan dan pembangunan sektor perikanan berkelanjutan adalah salah satu pencapaian tertinggi dari seorang penyuluh perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidore, A.E., Rumate, V. A., & Rotinsulu, T. O. 2020. Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Produksi Sektor Perikanan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Absolut Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.21 No.1.
- Metalisa, R; , Zulkarnain; , Mahrurnisa; Yanti, C.W;. 2023. Kepuasan Nelayan Terhadap Kegiatan Penyuluhan Perikanan Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. *Berkala Perikanan Terubuk*, Vol 51 No 1.
- Mustaqim, N.A; Nuraini, Y;. 2019. Kegiatan Penyuluhan Perikanan Di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. *Buletin JSJ*, 1 (1), 37-43.
- Purnomo, W.H; Leilani, A; Nurfitriana, N;. 2018. *Penyuluhan Perikanan*. Jakarta Pusat: AMAFRAD Press.
- Putri, J.A; Yuniarti, T; Dewi, I.J.P;. 2019. Analisis Permasalahan Perikanan: Strategi Penyuluhan Perikanan di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, Volume 13(2) Halaman 149-168.
- Ranum, G.A.R;. 2018. Komunikasi Penyuluhan pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, Volume 12(2) Halaman 129-147.
- Safrida; Makmur, T; Fachri, H;. 2015. Peran Penyuluh Perikanan Dalam Pengembangan Sektor Perikanan Di Kabupaten Aceh Utara. *Agrisep*, Vol (16) No. 2.
- Suherman, A; Dault, A;. 2009. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan Jembrana Bali. *Jurnal Saintek Perikanan*, Vol. 4, No. 2, : 24 - 32.

BAB 2

PERKEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN DI INDONESIA

Oleh Muh. Azril

2.1 Pendahuluan

Istilah penyuluhan tentu sangat erat kaitannya dengan kegiatan pembangunan pertanian. Kegiatan penyuluhan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan dan pembangunan sektor agraris dan bahari baik di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sering dengan kemajuan teknologi dan peningkatan produksi di bidang agraris, tentunya kegiatan penyuluhan menjadi penting dalam menunjang keberhasilan tersebut. Peranan kegiatan penyuluhan di Indonesia tentunya sangat membantu para pelaku utama dan pelaku usaha di sektor agraris dalam menerapkan kebaruan teknologi dan informasi dalam usaha mereka yang berlangsung dari masa ke masa dari masa sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, hingga masa sekarang ini.

Pada bab 2 dalam buku ini, akan disajikan bagaimana sejarah perkembangan penyuluhan pembangunan khususnya di bidang pertanian yang menjadi cikal bakal ilmu penyuluhan di Indonesia. Kemudian, dilanjutkan pembahasan mengenai dinamika perkembangan kegiatan penyuluhan pertanian ke dalam sektor perikanan seiring dengan perkembangan struktur kelembagaan pertanian ke kelembagaan khusus perikanan.

2.2 Sejarah Perkembangan Penyuluhan Pembangunan di Indonesia

Perkembangan ilmu penyuluhan pertanian mengilhami berkembangnya ilmu penyuluhan pembangunan di Indonesia. Pada jaman penjajahan Belanda, penyuluhan pertanian disebut *landbouw voorlichting*. Istilah penyuluhan juga banyak digunakan di berbagai

negara lainnya seperti, di Jerman penyuluhan disebut *aufklarung* yang memiliki arti sebagai pencerahan. Di Austria dikenal dengan istilah *forderung* diartikan sebagai bimbingan pedesaan. Di Spanyol dikenal dengan istilah *capacitation* atau keinginan untuk meningkatkan kemampuan atau pelatihan, dan di Prancis istilah penyuluhan di sebutkan sebagai *vulgarisation* yang artinya menyederhanakan pesan bagi orang awam (Amanah, 2006).

Awal mula munculnya istilah penyuluhan (*university extension*) pertama kali diperkenalkan di Inggris pada periode tahun 1840-an. Pada tahun 1852, William Sewell bersama tokoh-tokoh lain membentuk *Royal Commission on the University and Colleges of Oxford*. Salah satu tujuannya adalah mengusulkan penyebarluasan Informasi dari Universitas ke kalangan buruh industri (*Suggestions for the Extension of the University*). Kemudian, pada tahun 1867-1968, secara praktis, penyuluhan pertama kali dilakukan oleh James Stuart dari *Fellow of Trinity College, Cambridge*. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan pada masa tersebut berupa kegiatan pendidikan sebagai upaya untuk pembangunan masyarakat (Community Development). Seiring dengan perkembangan zaman, penyuluhan terus mengalami perubahan-perubahan baik dalam hal organisasi, perencanaan strategi, re-organisasi, maupun penentuan prioritas baru. Namun, secara prinsip, penyuluhan merupakan sebuah proses yang sistematis untuk membantu petani, nelayan, pembudidaya, atau komunitas agar mampu memecahkan masalahnya sendiri (*self-help*). Oleh karenanya, penyuluhan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan para sasaran kegiatan penyuluhan itu sendiri (Amanah, 2006).

Adapun perkembangan penyuluhan di Indonesia menurut Harijati (2014) terbagi kedalam beberapa "kelompok masa" sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah pada era tersebut yang meliputi: masa sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan, masa orde baru, dan masa setelah reformasi atau otonomi daerah. Sedangkan menurut Pambudy (1998) dalam (Gitosaputro & Listiana, 2018), perkembangan penyuluhan di Indonesia terbagi kedalam lima tahapan perkembangan yang sejalan dengan perkembangan pembangunan pertanian yaitu penyuluhan pertanian sebelum 1945, perkembangan tahun 1945-1969, zaman Orde Baru/ pembangunan

jangka panjang tahap (PJPT) I, antara tahun 1984-1988, dan penyuluhan pertanian pembangunan jangka panjang tahap (PJPT) II. Adapun menurut Rhodes (1990) dalam (Amanah, 2006) mendeskripsikan bahwa hubungan antara penelitian dan penyuluhan terbagi ke dalam empat era meliputi: era produksi, era ekonomi, era ekologi, dan era institusional dengan karakteristik yang berbeda-beda di setiap eranya. Pada tahun 1950-1975 dikenal dengan era produksi, dimana disiplin ilmu yang sangat banyak dibahas adalah pengembangbiakan dan genetika. Petani merupakan penerima teknologi pada era ini. Tahun 1975-1985 merupakan era ekonomi, dimana kajian terkait sistem usaha tani diprakarsai oleh para ahli ekonomi dan para ahli agronomi. Pada era ini, petani merupakan sumber informasi bagi rancangan teknologi. Kemudian, pada era ekologi di tahun 1985-1995, peranan yang begitu penting diperlihatkan oleh para antropologi, agro-ekologi, dan geografi. Petani yang memberikan sumbangsih dalam pengembangan pengetahuan lokal diklaim sebagai korban dan penyebab ketidakberkelanjutan pembangunan. Akhirnya pada periode pasca tahun 1995, yang merupakan era institusional, manajemen spesialis, psikolog, ahli sosiologi organisasi, ahli ilmu politik, pakar pelatihan dan penyuluhan memiliki peranan yang sangat penting dan pada masa ini terjadi perkembangan berbagai lembaga (Amanah, 2006).

2.2.1 Masa Sebelum Kemerdekaan (1817-1945)

Pada masa ini, tepatnya pada 17 Mei tahun 1817 didirikan Kebun Raya Bogor oleh C.G.L. Reinwardt dan dikenal sebagai awal mula dari usaha pembangunan pertanian di Indonesia (Harijati, 2014). Pada tahun 1831, dimulai sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) oleh penjajaan Belanda bagi para petani untuk menanam komoditas-komoditas tertentu. Pada saat itu didirikan suatu badan yang disebut Pangreh Praja yang merupakan penguasa lokal yang berhadapan langsung dengan para petani. Kemudian pada tahun 1876-1880, didirikan Kebun Tanaman Dagang (*cultuurtuin*), pusat-pusat penyelidikan (lembaga penelitian), dan sekolah pertanian (*Land-en Tuinbouw Cursus*) sebagai upaya untuk memperbaiki jenis dan jumlah produksi tanaman. Hingga abad 19, upaya perbaikan produksi pertanian masih dilakukan atas perintah atau paksaan,

bukan atas keinginan para petani untuk melakukan perbaikan dalam usaha pertanian. Lulusan sekolah pertanian didapuk menjadi penyuluh namun tidak memiliki peranan yang begitu signifikan dalam perbaikan pertanian karena para petani beranggapan petani hanya dapat dipengaruhi oleh Pangreh Praja dengan sistem paksaan. Dalam rentan periode 1817-1900, pemerintah menyadari sistem tanam paksa tidak membuahkan hasil (Harijati, 2014). Pada akhirnya pada tahun 1905, dilakukan perubahan-perubahan administrasi sehingga pengelolaan pertanian menjadi lebih terdesentralisasi dengan berdirinya Departemen Pertanian (*Van Landbouw*), dimana salah satu tugas dari departemen tersebut yaitu mendesiminasikan hasil penelitian pertanian kepada para petani (Karsidi, 2001; (Gitosaputro & Listiana, 2018). Sejak berdirinya Departemen Pertanian, kegiatan penyuluhan di Indonesia mulai perkembangan.

Tahun 1910-1918, melalui tangan direktur Departemen Pertanian Dr.N.J. Lovink, terbentuklah Dinas Penyuluhan Pertanian (*Landbouw Voorlichtings Dienst/LVD*) di tahun 1911 dan didirikan Sekolah Pertanian Menengah Atas (*Middelbare Landbouw School/MLS*) pada tahun 1913. Departemen Pertanian, pada era kepemimpinan Sibinga Mulder tahun 1918-1922 membentuk Balai Besar Penelitian Pertanian (*het Algemeene Proefstation voor den Landbouw/APL*). Selain itu, Mulder juga memberikan kesempatan pengembangan pertanian masing-masing daerah melalui penetapan kepala daerah pertanian. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa sejak kepemimpinan Mulder, perhatian terhadap perkembangan penyuluhan pertanian semakin terlihat. Sejak tahun 1921, akhirnya Dinas Penyuluhan Pertanian terlepas dari Pangreh Praja dan mampu menumbuhkan kesadaran para petani untuk melakukan perbaikan pertanian dengan penuh tanggung jawab. Sehingga, tidak ada lagi rasa paksaan yang dialami oleh para petani dalam melaksanakan kegiatan perbaikan pertanian mereka. Namun, kedatangan penjajah Jepang di tahun 1942, kembali menerapkan sistem tanam paksa dan berakhir ketika masa kemerdekaan Indonesia tiba di tahun 1945 (Harijati, 2014)

2.2.2 Masa Kemerdekaan (1945-1966)

Pasca Proklamasi Kemerdekaan (1945-1950), lahirilah Rencana Kasimo (Kasimo Plan). Rencana Kasimo merupakan rencana produksi pertanian tiga tahun (1948-1950), akan tetapi tidak dapat berjalan akibat gejolak revolusi fisik dan agresi militer penjajah. Pada tahun 1950-1959, pasca diakuinya kedaulatan Republik Indonesia, penyuluhan pertanian dikelola dengan cara yang lebih sistematis. Rencana Kasimo yang sebelumnya belum sempat dijalankan, pada akhirnya digantikan dengan Rencana Wacaksono, yang selanjutnya menjadi Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) yang memiliki tujuan: (1) meningkatkan produksi benih unggul melalui pendirian Balai Benih dan Kebun Bibit; (2) perbaikan dan perluasan pengairan pedesaan; (3) peningkatan penggunaan pupuk; (4) peningkatan pemberantasan hama; dan (5) meningkatkan pendidikan masyarakat pedesaan melalui pendirian Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) (Gitosaputro & Listiana, 2018). Pada tahun 1959-1968, pendekatan penyuluhan pertanian mengalami perubahan dengan penerapan pendekatan gerak, cepat, dinamis, dan tepat melalui pendekatan kelompok. Namun, perubahan tersebut tidak mengalami perbaikan yang signifikan karena sistem pemerintahan yang diterapkan pada era tersebut bersifat terpusat yang artinya kegiatan bersifat komando, akibatnya petani semakin jauh dari dampingan penyuluh (Harijati, 2014).

2.2.3 Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada tahun 1966 di awal pemerintahan orde baru, upaya untuk mengembalikan asas-asas penyuluhan pertanian yakni sukarela dan demokratis kembali digaungkan. Upaya yang dilakukan oleh Departemen Pertanian adalah dengan membentuk organisasi penyuluhan pertanian yang kuat di tingkat desa dengan memassivkan pendekatan dan cara penyuluhan pertanian. Pada masa orde baru, diterapkan pula kebijakan nasional "Panca Usahatani" yang merupakan sistem Bimbingan Masssal (BIMAS). BIMAS ini didasarkan pada usaha pembinaan petani oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan pendekatan kelompok tani, dengan harapan petani menjadi lebih mandiri. Selain penyuluh dari Departemen Pertanian, juga didukung oleh petani sukarela yang

merupakan kesediaan kelompok tani untuk menjadi penyuluh (Harijati, 2014).

Pada tahun 1970, timbul Gerakan Swasembada Bahan Makanan (GSBM) yang mengusung ide dan gagasan untuk mengembalikan konsep Penyuluhan Pertanian dengan asas-asas kesukarelaan, otoaktivitas, demokratis, dan lain-lain. Gerakan ini diprakarsai oleh Departemen Pertanian dan didukung oleh para pihak terkait, seperti Pelaksana Penyuluh Pertanian, Jawatan Pertanian Rakyat, Fakultas-Fakultas Pertanian, Organisasi Masa Tani, dan tokoh-tokoh penyuluhan pertanian. Adapun dua tujuan utama GSBM adalah: menggalakkan pendekatan penyuluhan dan menumbuhkan organisasi-organisasi maupun lembaga-lembaga penyuluhan pertanian (Gitosaputro & Listiana, 2018).

Seiring perkembangan penyuluhan, berbagai pola, cara, dan pendekatan penyuluhan juag terus berkembang baik pendekatan secara massal/ kelompok maupun individu melalui Dinas Pertanian dan para penyuluh pertanian dan terbentuknya berbagai macam bentuk kelembagaan penyuluhan seperti pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Sekolah Pertanian Pembangunan, Balai Latihan Pegawai Pertanian, Balai Informasi Pertanian, Balai Benih, dan Balai Proteksi Tanaman (Harijati, 2014).

Pada masa orde baru ini, (Gitosaputro & Listiana, 2018) menjelaskan perkembangan penyuluhan kedalam beberapa kategori mulai dari Repelita I hingga Repelita V. Repelita I (1969-1974), penyuluh pertanian fokus pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan dipisahkan dari tugas-tugas pengaturan dan pelayanan. Pada era ini, dilakukan peningkatan kemampuan aparat penyuluh, melalui pengangkatan tenaga sarjana pertanian menjadi Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS), sarjana muda menjadi Penyuluh Pertanian Madya (PPM), dan lulusan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) menjadi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat. Adapun tugas utama para penyuluh tersebut adalah mewujudkan pelaksanaan pembangunan pertanian yang tidak berfokus hanya pada kegiatan menyuluh, tetap juga melaksanakan pelayanan dengan sasaran utama para petani dan peserta Bimas yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, kredit, penyaluran, dan penagihan kredit. Pada Repelita II (1974-1979),

dikeluarkannya Kepres No. 44 dan 45 serta SK Mentan No. 468/Kpts/Org/12/1975 tanggal 25 Desember 1975 menyempurnakan organisasi penyuluhan dengan memisahkan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan. Hal ini mempertegas bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab pembinaan teknis penyelenggaraan pendidikan, latihan dan penyuluhan pertanian yang berada di daerah, beralih dari semua Direktorat Jenderal Lingkungan Departemen Pertanian kepada Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian (Diklatlth), Departemen Pertanian (BPLPP). Selama Repelita III (1979-1984), Organisasi Departemen Pertanian semakin diperkuat, dengan terbentuknya Direktorat Penyuluhan di tiap Direktorat Jenderal. Hal ini semakin memperkuat peranan BPLPP. Hal penting lainnya yang terjadi selama periode ini adalah berdirinya Direktorat Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, dan Direktorat Penyuluhan Perternakan di tingkat pusat, yang dikoordinasikan oleh Diklatlth, Departemen Pertanian. Pada Repelita IV (1984-1988) dan Repelita V (1989-1993), penataan organisasi penyuluhan pertanian kembali mengalami perubahan, khususnya terkait pedoman penyelenggaraan penyuluhan dan status para penyuluh. Pada era ini, peristiwa pentingnya adalah terbitnya pedoman penyelenggaraan penyuluhan dengan dikeluarkannya SK Mentan No. 482/Kpts/LP.120/7/1985; SK Mentan No. 143/Kpts/ LP.120/3/1985. Kemudian pedoman pelaksanaan penyuluhan dikeluarkan oleh Diklatlth (Gitosaputro & Listiana, 2018). Pada akhir tahun 1986, dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 73/Menpan/1985 yang memberikan pengakuan jabatan fungsional penyuluh pertanian. Pada akhirnya para penyuluh dapat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan peranan penyuluh dapat dilaksanakan dengan lebih berkualitas, yang pada akhirnya mampu mewujudkan perkembangan penyuluhan pertanian menjadi lebih baik (Harijati, 2014).

Selama periode tahun 1986-1991, perubahan dalam pengorganisasian penyuluh terus terjadi perubahan. Peran penyuluh yang awalnya bersifat polivalen menjadi monovalen, dengan harapan penyuluh monovalen dapat lebih intensif melakukan kegiatan penyuluhan dalam subsektor tertentu. Perubahan lainnya adalah,

penyuluh pertanian semula berada di bawah naungan Dinas Pertanian Pangan kemudian menjadi bagian dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perkebunan sesuai bidang tugas monovalennya. Perubahan sistem kerja penyuluhan pertanian telah mempengaruhi eksistensi diri penyuluh yang pada akhirnya mengakibatkan tingkat penerimaan masyarakat akan kegiatan-kegiatan pendampingan para penyuluh juga mengalami degradasi. Namun, angin segar dan memberi harapan kembali bagi para penyuluh dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian yakni SKB nomor 54 tahun 1996 dan nomor 301/Kpts/LP.120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Dengan adanya SKB ini, memberikan keleluasaan kepada penyuluh dalam menjalankan perannya secara terintegrasi antar subsektor. Sayangnya, hingga akhir masa orde baru, penerapan SKB ini belum sesuai harapan karena masih dominannya kepentingan subsektor tertentu jika dibandingkan integrasi semua subsektor (Harijati, 2014).

2.2.4 Masa Setelah Reformasi atau Otonomi Daerah (1998-sekarang)

Masa setelah reformasi tentunya juga sangat mempengaruhi sistem penyuluhan di Indonesia mulai dari individu penyuluh dengan lembaga penyuluhan, kegiatan penyuluhan, kebijakan pemerintah, dan para petaninya. Pada periode ini, lahir sistem otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Harijati, 2014). Sejak implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kelembagaan penyuluhan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat cepat. Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) yang merupakan struktur kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten yang sudah dibangun selama 30 tahun, akhirnya berubah menjadi Balai Informasi Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kantor Informasi Penyuluhan (KIP), Sub Dinas, atau Seksi (Amanah, 2006).

Otonomi daerah juga mengakibatkan perubahan pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian, yang semula diambil alih oleh pemerintah pusat kemudian dilimpahkan

kepada pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada perubahan kebijakan dan program-program penyuluhan dari yang bersifat nasional penyeragaman menjadi spesifik berbasis pada potensi lokal daerah masing-masing. Penyuluhan pertanian menghadapi banyak tantangan dengan penerapan otonomi daerah, seperti tidak adanya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal kegiatan penyuluhan dan permasalahan terhadap komitmen serta kemampuan para penyuluh. Melihat problematika yang ada, agar tujuan penyuluhan pertanian tetap tercapai, maka penyempurnaan metode, pendekatan, dan program penyuluhan terus dilakukan (Harijati, 2014).

Pada era ini juga terjadi perkembangan pembangunan yang begitu cepat, khususnya kemajuan teknologi dan sistem pemasaran global. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan daya saing produk pertanian dan semakin terbatasnya lahan pertanian, serta sistem penyuluhan pertanian juga mengalami perubahan. Penyuluhan pertanian sebagai sistem pendidikan nonformal dengan penyampaian data dan informasi mengenai bidang pertanian, masih menjadi ujung tombak dalam pendampingan para pelaku utama dan pelaku usaha dengan di bidang pertanian baik untuk para petani, peternak, pembudidaya, dan nelayan beserta keluarganya. Hal ini didukung dengan kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten, terdapat Dinas Pertanian yang memiliki bidang atau seksi yang membawahi penyuluhan pertanian dan menjadi unit kerja penyuluhan pertanian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Di tingkat kecamatan, terdapat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang merupakan lembaga dengan tugas menyusun program penyuluhan, membimbing penyusunan rencana kerja penyuluh, dan melakukan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah satu kecamatan. Pada periode saat ini, sering dengan dinamika kelembagaan penyuluhan, tenaga fungsional penyuluh yang menjalankan tugas-tugas penyuluhan tidak hanya berada di Kementerian Pertanian tetapi juga dari berbagai sektor lain seperti bidang perindustrian, bidang kependudukan dan KB, bidang hukum, bidang kesehatan dan gizi, dan lain sebagainya (Gitosaputro & Listiana, 2018).

2.3 Perkembangan Penyuluhan Perikanan di Indonesia

Pada era pasca reformasi, penyuluhan perikanan sebagai bagian dari penyuluhan pertanian pada akhirnya berkembang dengan kelembagaan sendiri. Perkembangan kelembagaan perikanan mulai dari periode sebelum kemerdekaan sampai pasca proklamasi kemerdekaan, khususnya yang menjadi momentum yaitu di tahun 1999 pada era presiden Abdurrahman Wahid (Purnomo et al., 2018). Lahirnya bidang perikanan diakui dengan berdirinya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) di era Reformasi berdasarkan Keppres 147/1999 tanggal 1 Desember 1999 yang terdiri dari lima direktorat jenderal: (1) Direktorat Jenderal Penyerasian Riset dan Eksplorasi; (2) Direktorat Jenderal Perikanan; (3) Direktorat Jenderal Urusan Pesisir, Pantai, dan Pulau-Pulau Kecil; (4) Direktorat Jenderal Pengawasan dan Perlindungan Laut; dan (5) Direktorat Jenderal Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan (Tribawono, 2013). Kemudian di tahun 2000 terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai dengan Keppres/165/2000 tanggal 23 November 2000. Tahun 2009 sesuai dengan PP No 47/2009, terjadi perubahan nomenklatur dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga sekarang (Tribawono, 2013; Purnomo et al., 2018).

2.3.1 Masa Sebelum Kemerdekaan

Kelembagaan perikanan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah terbentuk Departemen Pertanian pada zaman pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 23 September 1904 yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 20 *Staatsblaad* 982 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (*Staatsblaad* No. 380) tahun 1904. Selain membentuk Departemen Pertanian, juga dibentuk dinas-dinas seperti dinas Pertanian, Perikanan, dan Kerajinan. Khusus Dinas Perikanan terdiri dari dua bidang yaitu bidang perikanan laut dan perikanan darat. Seluruh pejabat dan tenaga yang dipekerjakan pada era tersebut belum terdapat tenaga kerja pribumi. Namun, menjelang perang Dunia II, dalam rentan waktu tahun 1930-1942, pemerintah

kolonial Belanda akhirnya mengangkat beberapa orang Indonesia yang jumlahnya masih sedikit kala itu, sebagai pegawai perikanan laut pemerintahan (Purnomo et al., 2018).

1.3.2 Masa Setelah Kemerdekaan

Pasca Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 2 September 1945, pemerintah Indonesia membentuk kabinet yang didalamnya terdapat Kementerian Kemakmuran yang membawahi Jawatan Perikanan Laut/Darat (Tingkat Pusat) melalui Koordinator Pertanian. Namun, Kementerian Kemakmuran kemudian dilebur menjadi Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1950. Kementerian Pertanian ditunjuk untuk menangani sektor Perikanan, kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 1/1951, urusan Perikanan dikelola oleh Pusat Jawatan Perikanan laut dan Pusat Jawatan Perikanan Darat. Pada tahun 1957, susunan organisasi Kementerian Pertanian kembali mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Presiden No. 108 Th 1957. Perubahannya adalah urusan perikanan diamanahkan kepada Direktorat Jenderal Perikanan yang membawahi Jawatan Perikanan Laut, Jawatan Perikanan Darat, Balai Penyelidikan Perikanan Darat, dan Yayasan Perikaan Laut (Purnomo et al., 2018)

Pada tanggal 13 Februari 1962, terbentuk Kabinet Kerja yang berdasarkan Keputusan Presiden No 94 Tahun 1962. Dalam Kabinet Kerja, terdapat Departemen Pertanian dan Agraria yang didalamnya juga terdapat Direktorat Jenderal Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 1 Tahun 1962. Direktorat Jenderal Perikanan terdiri dari Pusat Jawatan Perikanan Darat, Pusat Jawatan Perikanan Laut, Lembaga Penelitian Perikanan Darat, Lembaga Penelitian Perikanan Laut, Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan, dan Laboratorium perikanan Darat Bogor. Pada Kabinet Dwikora yang telah mengalami penyempurnaan di Tahun 1964, berdiri kompartemen Pertanian dan Agraria yang mengelola enam departemen, salah satunya yaitu Departemen Perikanan Darat/Laut. Pada tanggal 7 Juli 1965, keluar Keputusan Presiden yang mengamanahkan tugas Perikanan Laut kepada Kompartemen Maritim sebagai Departemen Perikanan dan Pengolahan Kekayaan

Laut. Sedangkan urusan Perikanan Darat tetap dikelola oleh Departemen Pertanian, Departemen Pertanian. Terbentuknya Kabinet Ampera tahun 1966, menjadikan Departemen Perikanan dan Pengolahan Kekayaan laut mengalami perubahan menjadi Direktorat Jenderal Pengolahan Kekayaan Laut dibawah Departemen 3 Maritim. Kemudian, di Era Orde Baru, Perikanan Laut dan Perikanan Darat dilebur menjadi Direktorat Jenderal Perikanan dibawah naungan Departemen Pertanian berdasarkan Keputusan Presiden No. 184 Tahun 1968. Sejalan dengan perubahan tersebut, di daerah hanya terdapat di Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I (Purnomo et al., 2018).

Pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999, dikeluarkannya Keputusan Presiden No 335/M Tahun 1999 yang menunjuk Ir. Sarwono Kusumatmodjo menjadi Menteri Eksplorasi Laut. Kemudian, terbentuklah Departemen Eksplorasi Laut (DEL) sesuai Keputusan Presiden No. 136 Tahun 1999. Namun, di tahun yang sama, terbit Keputusan Presiden No. 145 Tahun 1999 yang mengubah penyebutan yang awalnya Menteri Eksplorasi laut menjadi Menteri Eksplorasi laut dan Perikanan. Kemudian dilanjutkan dengan perubahan nomenklatur yang semula Departemen Eksplorasi Laut (DEL) menjadi Departemen Eksplorasi laut dan Perikanan (DELP). Berdirinya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 147 tahun 1999. Dalam perkembangannya, pada tahun 2000 setelah sidang tahunan MPR terjadi perubahan susunan kabinet, sesuai Keputusan Presiden RI No. 165 Tahun 2000 terjadi perubahan nomenklatur dari Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Pada Tahun 2009, berdasarkan Perpres No. 47 Tahun 2009, nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) kembali berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Purnomo et al., 2018).

Berdasarkan sejarah perkembangan kelembagaan mulai sejak sebelum kemerdekaan sampai pasca proklamasi kemerdekaan, sektor perikanan merupakan bagian dari pertanian, termasuk juga dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Namun, dinamika perkembangan dan perubahan kelembagaan yang menangani sektor

perikanan, dari awal sejak tahun 1999 yang berada dibawah naungan Departemen Eksplorasi laut dan Perikanan sampai dengan dikeluarkannya Perpres No 47 tahun 2009 yaitu menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan penyuluhan perikanan di Indonesia. Pelaksanaan penyuluhan perikanan dikelola oleh lembaga yang mengurus perikanan dimulai dari Pusat Pendidikan Latihan penyuluhan dibawah Sekretariat jendral Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) hingga tahun 2007, kemudian ditangani oleh Pusat Penyuluhan yang berada dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Purnomo et al., 2018). Hingga tahun 2023, pelaksanaan penyuluhan perikanan berada di bawah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pasca dijalankannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, organisasi penyuluhan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Lembaga penyuluhan di berbagai lembaga mengalami perubahan, ada yang menguat, melemah, dan ada pula yang betul-betul terhapus dalam struktur lembaga pemerintah (Amanah, 2008). Termasuk kelembagaan penyuluhan perikanan di daerah, dimana pada akhir tahun 2017, seluruh lembaga penyuluhan di daerah dihapuskan dalam struktur lembaga pemerintah daerah, dan kewenangan penyuluhan perikanan dia atur oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Terkait penyelenggaraan penyuluhan perikanan, sejak tahun 2002, telah diterbitkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No. Kep.44/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan sebagai upaya untuk pengembangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang efisien , efektif, dan profesional. Namun, masih tidak ada kepastian dasar hukum yang menjamin penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dikarenakan peraturan yang ada pada periode tersebut masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Maka, pada tahun 2006, dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) (Purnomo et al., 2018). Dengan lahirnya Undang-Undang (SP3K) yang sudah dinantikan oleh seluruh penyuluh dan pakar penyuluhan pertanian, akhirnya memperkuat langkah dalam pengembangan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga terwujudnya sebuah sistem penyuluhan yang adaptif, inovatif, dan teruji (Amanah, 2008). Dalam amanat UU SP3K, disebutkan bahwa *"Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan"*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S. 2006. PENYULUHAN PERIKANAN. Jurnal Penyuluhan, 2(4). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v2i4.2117>
- Amanah, S. 2008. Sistem Penyuluhan Perikanan Dalam Mengantisipasi Era Perubahan. Jurnal Penyuluhan, 4(2). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i2.2180>
- Gitosaputro, S., & Listiana, I. 2018. DINAMIKA PENYULUHAN PERTANIAN: DARI ERA KOLONIAL SAMPAI DENGAN ERA DIGITAL. CV. Anugrah Utama Raharja (AURA Publishing).
- Harijati, S. 2014. Sejarah dan Pengertian Penyuluhan Pertanian. In Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian (1st ed.). Repositori Universitas Terbuka.
- Pemerintah Indonesia. 2006. Undang Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Sekretariat Negara.
- Purnomo, W. H., Leilani, A., & Nurfitriana, N. 2018. Penyuluhan Perikanan. AMAFRAD Press.
- Tribawono, D. 2013. Hukum Perikanan Indonesia (2nd ed.). PT Citra Aditya Bakti.

BAB 3

FILOSOFI, DEFINISI, PRINSIP DAN TUJUAN PENYULUHAN PERIKANAN

Oleh Sri Herlina

3.1 Pendahuluan

Istilah penyuluhan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata “suluh” yang berarti memberi penerang di tengah kegelapan. Penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebaran informasi terkait perbaikan cara-cara perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan keluarga. Sedangkan penyuluhan secara umum merupakan proses pendidikan, namun banyak juga kegiatan yang menggunakan pendekatan kekuasaan melalui pemaksaan (Purnomo et al., 2018).

3.2 Filosofi Penyuluhan

Makna secara filosofi “penyuluhan” berarti cinta dan kebijaksanaan. Kebijakan sendiri memiliki pengertian yang mendalam yang mengeksplorasi semua aspek kehidupan manusia (Siswanto, 2012). Filosofi penyuluhan adalah mendorong masyarakat untuk menolong sebagai sesama manusia (*helping people to help themselves*) (Kelsey and Hearne ,1955). Filosofis penyuluhan dapat diartikan sebagai “asah, asih dan asuh” yang bercorak ketimuran artinya penyuluhan adalah kegiatan belajar yang memiliki sifat memberi dan menerima inovasi serta menghargai pandangan orang lain (Purnomo et al., 2018).

Selain itu filosofi 3-T yaitu: teach, truth dan trust (pendidikan, kebenaran dan keyakinan) telah lama di kembangkan di Amerika Serikat. Artinya penyuluhan adalah suatu kegiatan pendidikan yang mengkomunikasikan apa yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Dengan kata lain, dalam kegiatan penyuluhan, pembudidaya, pengolahan dan nelayan dilatih untuk menerapkan informasi apa pun yang mereka yakini terbukti kebenarannya

membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (Enslinger,1962). Dalam kaitan dengan hal tersebut, filosofi penyuluhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penyuluhan merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan agar dapat mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat.
2. Penyuluhan menjangkau seluruh masyarakat untuk menanggapi kebutuhan dan aspirasi mereka. Penyuluhan juga mengajarkan masyarakat tentang apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mewujudkan keinginan tersebut.
3. Tujuan penyuluhan adalah agar masyarakat mampu menolong diri mereka sendiri.

3.2.1 Penyuluh sebagai ilmu

Manusia merupakan makhluk yang memerlukan pendidikan. Hal ini dapat dijelaskan melalui prinsip dasar antropologi pendidikan diantaranya yaitu: kesosialan, individualitas, identitas moral dan kesatuan. Dari Keempat prinsip antropologi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip kesosialan berarti bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Untuk bertahan hidup manusia pada dasarnya perlu berhubungan dengan orang lain. Dalam interaksinya manusia saling mempengaruhi satu dan lainnya yang terlibat didalamnya.
2. Prinsip individualitas bahwa setiap individu mempunyai kebenarannya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat namun setiap orang tetap mempunyai ciri khas masing-masing.
3. Prinsip identitas moral pada hakikatnya dapat dijelaskan pada seluruh manusia memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan perbuatan baik. Ketika prinsip moral ini digabungkan dengan prinsip kesosialan, yang menempatkan individu di dalam masyarakatnya dan prinsip individualitas, termasuk kemampuan individu untuk muncul dengan sifat-sifat sendiri, maka akan muncul seseorang yang dapat bertanggung jawab atas semua tindakannya.

4. Prinsip kesatuan menyatakan bahwa semua individu adalah unik dan tidak ada individu yang sepenuhnya identik dengan individu lainnya (Purnomo et al., 2018)

3.2.2 Penyuluhan Membantu Diri Sendiri

Filosofi penyuluhan perikanan swadaya tetap terkait dengan filosofi penyuluhan sebagai suatu ilmu. Filosofi ini didasari oleh tujuan penyuluhan, yaitu untuk mengubah perilaku kelompok masyarakat, sehingga sasaran penyuluhan baik nelayan, pembudidaya dan pihak-pihak yang terlibat dalam usaha perikanan mampu untuk mengubah nasibnya.

Sebagai sumber perubahan penyuluh harus mampu mencari inovasi untuk mencapai tujuan. Penyuluhan juga harus melalui tahapan perubahan yang terencana. Setelah itu penyuluh dapat mengintegrasikan inovasi dalam masyarakat dan menjadi satu dengan tujuan melalui interaksi sosial yang berkelanjutan. Sasaran penyuluhan harus mampu mengubah perilakunya secara mandiri, secara umum dapat meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya meningkat kesejahteraan (Nurfitriana et al., 2020)

3.2.3 Penyuluhan Demokrasi

Filosofi penyuluhan perikanan demokratis adalah merupakan pendekatan yang melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini berarti semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri perikanan seperti nelayan, petani ikan, pemerintah dan masyarakat umum memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Inovasi yang dilakukan melalui komunikasi dua arah merupakan inovasi yang dibutuhkan dari sasaran. Hasil inovasi tersebut harus dinikmati oleh sasaran dan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan penyuluhan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dalam proses difusi suatu inovasi disebarkan dengan adanya komunikasi yang terjalin antara anggota dalam suatu sistem sosial, inovasi dapat diadopsi melalui proses yang melibatkan penyuluh dan sasaran penyuluh. Inovasi tersebut dapat berupa objek, pengetahuan, teknologi atau penemuan baru.

3.2.4 Penyuluhan Kontiyu

Penyuluhan adalah proses yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang sampai tujuan untuk mengubah perilaku kelompok sasaran tercapai dan bukan proses yang terputus-putus. Proses penyuluhan tidak terputus-putus dan penyuluh harus memberikan dukungan hingga inovasi tersebut dapat diimplementasikan. Jika inovasi berhasil diimplementasikan, penyuluh harus meninggalkan sasaran dalam sebuah sistem sosial sehingga dapat mandiri dan tidak bergantung dengan penyuluh. Dalam beberapa kasus program penyuluhan yang didanai oleh anggaran pemerintah hanya berakhir sebagai proyek tanpa proses pendampingan lanjutan, setelah periode program berakhir karena keterbatasan anggaran. Hal ini sangat bertentangan dengan filosofi penyuluhan yang berkelanjutan dimana dukungan berkelanjutan harus diberikan agar sasaran dapat mengadopsi inovasi yang telah disebarkan oleh penyuluh. Lima tahapan sasaran dalam proses pengambilan keputusan sebuah inovasi.

Pengetahuan adalah tahap dimana sasaran mendapatkan informasi tentang sebuah inovasi melalui komunikasi interpersonal dan media komunikasi. Persuasi adalah tahap pertimbangan sasaran, keputusan adalah tahap sasaran menerima atau menolak inovasi, implementasi adalah tahap dimana sasaran mulai mengaplikasikan inovasi, dan konfirmasi adalah tahap pengecekan kembali (pembenaran) terhadap inovasi tersebut. Dengan kata lain penerapan suatu inovasi bukanlah hal yang mudah untuk mengubah perilaku sasaran dan membutuhkan proses yang berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama (Nurfitriana et al., 2020).

3.2.5 Penyuluhan Kerjasama

Kerjasama penyuluhan dapat dicapai melalui proses interaksi antara penyuluh dan sasaran. Kerjasama ini melibatkan penyuluh yang bertindak sebagai agen yang membawa sebuah inovasi untuk diadopsi sehingga tujuan perubahan perilaku dalam tatanan sosial sasaran tercapai. Disisi lain, penerima inovasi yaitu sasaran tidak dipisahkan dari proses pengajaran oleh penyuluh sampai inovasi tersebut diterapkan oleh sasaran dan mampu mandiri. Selain itu penyuluh harus memahami latar belakang sasaran

baik dari segi pendidikan, budaya, agama, bahasa dan tingkat ekonomi sehingga dapat memudahkan menjadi bagian dari sasaran di komunitasnya. Disisi lain target sasaran juga secara bertahap harus dapat inovasi yang disebarakan oleh agen perubahan atau penyuluh.

3.3 Pengertian Penyuluhan

Dari bahasa belanda penyuluhan dikenal dengan istilah *extension* yang artinya memberikan penerangan untuk membantu seseorang. Sementara itu di Indonesia penyuluhan dikenal dengan istilah *voorlichting* dan di Malaysia istilah *Extension* (pengembangan) dan pentingnya penyederhanaan pesan bagi masyarakat (Budi, 2018). Terdapat berbagai definisi literal nasional tentang penyuluhan, seperti halnya pendapat-pendapat berikut. *Erziehung* di Amerika Serikat yang menekankan tujuan penyuluhan yang berarti melatih seseorang untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah mereka sendiri dan *Forderung* di Austria yang berarti menggiring seseorang kearah yang diinginkan dan *Capasitacion* di Spanyol yang menunjukkan adanya keinginan untuk meningkatkan kapasitas manusia dan diartikan sebagai pelatihan atau training.

Penyuluhan memiliki definisi yang beragam dari beberapa ahli. Dalam kaitannya dikaitkan dengan salah satu sasaran penyuluhan yaitu pelaku utama perikanan khususnya pembudidaya ikan, kegiatan penyuluhan perikanan pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas perikanan budidaya air tawar, air laut dan air payau. Peningkatan pendapatan dalam artian meningkatkan kesejahteraan secara sukarela atau mandiri dengan usaha mereka sendiri melalui perubahan perilaku baik itu pengetahuan, sikap maupun keterampilan (Anawarudin, 2021). Perubahan perilaku dapat terwujud karena adanya adopsi terhadap inovasi baru di bidang budidaya perikanan, setelah sasaran penyuluhan dapat mengadopsi inovasi tersebut tahap selanjutnya mereka menyebarkan inovasi baru yang telah berhasil diadopsi dari sasaran penyuluhan kepada sasaran penyuluhan lainnya.

Dalam prosesnya istilah penyuluhan dapat diartikan dalam beberapa pengertian yaitu :

1. Penyebaran hasil penelitian dari perguruan tinggi dan pusat penelitian akan bermanfaat jika dibagikan kepada masyarakat pengguna. Selain itu penyampaian tentang program pemerintah juga merupakan kegiatan penyebaran informasi. Kegiatan tersebut merupakan tugas penyuluh dalam menyebarluaskan informasi dengan harapan mampu menambah pengetahuan, keterampilan masyarakat
2. Pendidikan non formal
Penyuluhan adalah pendidikan nonformal di luar sekolah. Pendidikan nonformal bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan sasaran penyuluhan, keterampilan dan keberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup. Penyuluhan dikatakan pendidikan non formal karena prosesnya dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja, pesertanya beragam, tidak ada kurikulum, tidak ada sanksi atas ketidak hadiran atau ketidak disiplin dalam belajar, penyuluh dan peserta memiliki hubungan yang erat antara peserta penyuluh dan tidak adanya penandaan kelulusan (Gitasaputa & Listiana, 2018).
3. Proses Penerangan
Sebagai sebuah proses penerangan, penyuluhan tidak hanya sebagai memberi informasi tetapi juga memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami sesuai dengan harapan penyuluh.
4. Perubahan Perilaku
Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku, dan diharapkan antusiasnya sasaran mengikuti pendidikan non formal dan berinteraksi yang terus menerus dengan penyuluh akan secara bertahap dapat mengubah pola pikir sasaran sesuai dengan yang diharapkan dari kegiatan penyuluhan. Oleh karena itu sosialisasi harus dilakukan untuk mengubah perilaku dan sikap para penerima manfaat.
5. Pemasaran inovasi
Sebagai penghubung dari lembaga penelitian (pusat penelitian dan perguruan tinggi) yang menciptakan inovasi dan teknologi bidang perikanan. Maka penyuluhan merupakan wadah untuk

memasarkan. Inovasi yang dihasilkan dapat disampaikan kepada petani ikan serta masyarakat melalui program penyuluhan perikanan. Sehingga masyarakat dan petani ikan menjadi tertarik untuk mengadopsi inovasi tersebut.

6. Pemberdayaan masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat berarti memberdayakan masyarakat menjadi mandiri melalui modal sosial dan sumberdaya yang dimiliki. Prosesnya mencakup penguatan keberanian, kemampuan dan keterbatasan masyarakat yang berada di bawah agar memiliki kepercayaan diri dan kemandirian (Setiawan, 2012). Pemberdayaan diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang madani dan mandiri, artinya memberikan akses lebih besar terhadap sumber daya untuk meningkatkan kapasitas dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kemandirian ekonomi (Nurfitriana et al., 2020).

3.4 Prinsip-prinsip penyuluhan

Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan atau pedoman yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan penyuluhan di bidang perikanan. Penyuluh dalam melaksanakan kegiatan hendaknya selalu berpedoman pada prinsip. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati.

Kegiatan penyuluhan mempunyai prinsip-prinsip yang meliputi :

1. Mengerjakan, yaitu kegiatan penyuluhan diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam melakukan sesuatu. Dengan mengerjakan, maka akan mengalami proses belajar (baik dalam menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilan) yang akan terus diingat.
2. Akibat, yaitu kegiatan penyuluhan harus mampu memberikan hasil yang baik dan bermanfaat. Perasaan senang, puas atau tidak puas dapat mempengaruhi semangat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan di kemudian hari.
3. Asosiasi, yaitu kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan yang lain. Hal ini dikarenakan setiap orang selalu mengaitkan aktivitasnya dengan aktivitas lainnya (Budi, 2018).

Prinsip penyuluhan menurut para ahli :

Prinsip mencakup faktor-faktor seperti lingkungan dan pihak lain yang terlibat. Prinsip-prinsip tersebut adalah (1) Penyuluhan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, (2) Penyuluhan harus mengenai kebutuhan dan keinginan sasaran, (3) Penyuluhan harus melibatkan seluruh keluarga, (4) Penyuluhan adalah cara untuk belajar demokrasi (5) Penyuluhan, penelitian, pendidikan harus berjalan bersama-sama (6) Perencanaan harus dibuat oleh masyarakat dan penyuluh secara bersama-sama, (7) Penyuluhan dapat berubah dan beradaptasi, (8) Metode demonstrasi adalah gagasan dasar bagi kegiatan penyuluhan perikanan, (9) Penilaian hasil penyuluhan dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada sasaran (Wiriaatmadja, 1985).

Penyuluhan adalah suatu sistem pendidikan yang proses belajar mengajarnya secara langsung dan didikan umumnya orang dewasa, sehingga prinsip penyuluhan harus diselaraskan dengan prinsip dalam pendidikan orang dewasa. Tujuh prinsip belajar orang dewasa, khusus untuk kegiatan penyuluhan yaitu (1) Orang dewasa belajar dengan baik ketika mereka berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan (2) Orang dewasa belajar dengan sebaik ketika mereka tertarik berhubungan dengan kehidupan setiap orang (3) Orang dewasa belajar sebaik-baiknya jika apa yang dipelajari bermanfaat dan praktis (4) Dorongan semangat dan pengulangan yang terus menerus akan membantu seseorang belajar lebih baik (5) Orang dewasa belajar dengan sebaik-baiknya jika diberi kesempatan untuk memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam jangka waktu yang cukup lama (6) Proses belajar dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan kemampuan berpikir warga belajar (7) Saling pengertian baik dan sesuai dengan ciri-ciri utama orang dewasa membantu pencapaian tujuan pembelajaran (Nurfitriana et al., 2020).

3.5 Tujuan Penyuluhan

Sebagai suatu sistem pendidikan maka penyuluhan perikanan mengajarkan para nelayan dan keluarganya tentang apa yang diinginkan. Pada dasarnya tujuan ditetapkan harus dapat dipahami oleh orang dengan persepsi yang sama, sehingga dalam

pencapaian tujuan tersebut dapat mudah dicapai. Terdapat rumusan atau kriteria yang harus dipenuhi supaya keberhasilan pencapaian tujuan dapat tercapai. Rumusan yang harus biasa dikenal dengan singkatan SMART yang mencakup indikator Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timebound.

Kriteria SMART dalam pencapaian tujuan sangat berperan penting dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Apabila rumusan tersebut telah ditetapkan sehingga setiap orang yang terlibat dalam pencapaian tujuan tersebut memiliki pedoman atau arah yang jelas. Hal ini dapat mengurangi resiko terjadinya penyimpangan atau kesalahan besar yang terjadi karena dengan adanya rumusan tersebut dapat memprediksi (a) waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya (b) memperhitungkan kebutuhan sumber daya (manusia, finansial, sarana dan prasarana (c) memberikan pedoman dan arah kegiatan (d) memudahkan kegiatan usaha monitoring dan evaluasi (e) perbaikan lebih mudah dilakukan sebelum kesalahan besar. Namun rumusan atau kriteria tujuan saja tidak cukup untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Kriteria tersebut harus dilengkapi dengan rincian kegiatan guna mencapai tujuan.

Jenis -jenis tujuan berdasarkan pada (1) dampak yang dihasilkan (2) tingkat tujuan (3) jangka waktu untuk mencapai tujuan (4) perilaku sasaran yang diubah (5) aspek usaha perikanan dan kelautan. Lima jenis tujuan ini harus dipahami dengan jelas agar dapat menggunakan istilah jenis tujuan dengan tepat. Adapun jenis-jenis tujuan penyuluhan sebagai berikut (Purnomo et al., 2018).

3.5.1 Waktu Pencapaian

Dilihat dari segi waktu pencapaian, tujuan penyuluhan terdiri dari tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang dapat tercapai dalam jangka waktu yang sangat lama berkisar 25-30 tahun. Pencapaian tujuan tersebut biasanya secara berkelanjutan (*continue*) serta berkesinambungan (*sustainability*) misal tercapainya hidup yang sejahtera bagi pelaku utama perikanan baik nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan secara berkelanjutan. Tujuan jangka pendek dapat tercapai dalam jangka waktu yang lebih singkat berkisar 5-10 tahun merupakan tujuan yang dapat dicapai dalam waktu dekat misalnya bertambah

pengetahuan, keterampilan sehingga produksi usaha perikanan meningkat.

3.5.2 Perubahan Perilaku Sasaran

Perubahan perilaku sasaran mempunyai tiga bagian yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jika ketiga bagian tersebut berubah, maka sasaran penyuluhan tersebut tercapai. Penyuluh sebagai agen perubahan harus mempunyai strategi dalam berkomunikasi untuk menjamin keberhasilan. Komunikasi yang sukses dapat dicapai dengan memperlihatkan lima indikator yaitu media yang tepat, kondisi lingkungan dan tujuan yang diinginkan, materi dan metode yang digunakan (Taksoomo blomm 1998). Tahapan belajar dimulai dari tahapan mengingat, kemudian memahami, menggunakan, mencari tahu, kemudian memutuskan apakah itu baik atau buruk dan akhirnya menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan, komponen sikap (afektif) mengaitkan perilaku dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti perasaan, nilai-nilai, penghargaan, antusiasme, motivasi dan sikap. lima kategori tersebut, dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Aspek keterampilan (psikomotorik) berkaitan dengan perubahan kemampuan menggerakkan anggota tubuh yang membutuhkan koordinasi mulai dari tindakan yang bersifat reflek sampai dengan tindakan yang kreatif dan keahlian tertentu, sehingga dalam kegiatan penyuluhan perikanan bisa didukung dengan kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan sasaran (Nurfitriana et al., 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Anawarudin, O. 2021. *Sistem Penyuluhan Pertanian* (J. Simarmata, Ed.; I). Yayasan Kita Semua.
- Budi, S. 2018. *Penyuluhan Pertanian :Teori dan Penerapannya* (I). Sefa Bumi Persada.
- Siswanto, D. 2012. Urgensi Falsafah Penyuluhan Pembangunan Dan Etos Kerja Dalam Pemberdayaan Masyarakat. In *Jurnal Ilmiah CIVIS: Vol. II* (Issue 1).
- Gitasaputa, S., & Listiana, I. 2018. *Dinamika Penyuluhan Pertanian" Dari Erakolonial Sampai Dengan Era Di Gital"* (1st ed.). Anugrah Utama Raharja.
- Nurfitriana, N., Sabariah, N., & Aulia, D. 2020. *Penyuluhan Budidaya Perikanan* . AMAFRAD Press.
- Purnomo, W. H., Leilani, A., & Nurfiana, N. 2018. *Penyuluhan Perikanan*. AmaFRaD Fress.

BAB 4

DINAMIKA KELOMPOK NELAYAN

Oleh Endang Gunaisah

4.1 Pendahuluan

Membahas dinamika kelompok nelayan pada hakikatnya adalah mempelajari kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai pelaku utama perikanan. Aktivitas masyarakat pesisir baik secara individu maupun kelompok yang memperlihatkan kegiatan-kegiatan masyarakat nelayan dalam melakoni kehidupan yang memanfaatkan sumber daya perikanan sebagai mata pencaharian pokok. Sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri kelautan dan perikanan yang tertuang di dalam KEPMEN nomor 14/MEN/2012 pelaku utama perikanan adalah kumpulan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan.

Dinamika kelompok nelayan memperlihatkan sebuah kegiatan dari sebuah komunitas yang dilakukan secara komunal dalam kelompok-kelompok usaha baik berupa kelompok keluarga ataupun kelompok-kelompok yang berbentuk lembaga masyarakat seperti KUB (Kelompok Usaha Bersama), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau kapasitas berorganisasi masyarakat, dan sebagainya.

Pengetahuan dinamika kelompok nelayan dapat disajikan melalui penelusuran mengenai pengertian dinamika, jenis-jenis, aspek-aspek yang mempengaruhi dinamika kelompok dan beberapa hasil kajian terkait dinamika kelompok nelayan yang berada di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu dinamika kelompok juga merupakan salah satu metode pelatihan yang digunakan oleh para pelatih/instruktur bagi masyarakat umumnya, dan kelompok nelayan khususnya. Sedemikian hingga tulisan ini menyajikan sedikit pemahaman penulis tentang dinamika kelompok nelayan yang diambil dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan perikanan, dan pengalaman penyelenggaraan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi poin pengabdian kepada masyarakat.

4.2 Pengertian Dinamika

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinamika merujuk pada gerakan internal, energi yang menggerakkan, atau semangat. Dalam konteks ini, dinamika diartikan sebagai pergerakan atau kekuatan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang terus-menerus dilakukan, menyebabkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Penggunaan istilah dinamika sering ditemui dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya.

Asal kata dinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*dynamics*," yang berarti kekuatan. Secara lebih spesifik, dinamika diartikan sebagai perilaku masyarakat yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka sendiri atau kelompok lain secara timbal balik. Dinamika memiliki sifat dinamis, yang berarti tidak diam dan selalu bergerak, menjadi sumber kekuatan untuk terus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan (Aris).

Dinamika juga dapat diartikan sebagai suatu pola atau proses pertumbuhan, perubahan, atau perkembangan dalam suatu bidang atau sistem ikatan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Ini berarti jika salah satu unsur dari suatu organ mengalami gangguan atau perubahan, maka akan membawa perubahan pada unsur lainnya, mengakibatkan perubahan pada sistem atau kelompok secara keseluruhan (Haqiqiansyah, 2016)

4.3 Dinamika Kelompok

Pada aspek pengetahuan sosial yang fokus pada pemahaman tentang kehidupan kelompok. Studi ini mengamati perilaku dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman mengenai sifat kelompok, perkembangan kelompok, interaksi antar anggota kelompok, serta hubungan kelompok dengan kelompok lain atau kelompok yang lebih besar (Johnson, 2012). Lestari (2015) menyatakan bahwa dinamika kelompok memiliki dampak langsung terhadap tingkat kemandirian anggota kelompok, khususnya dalam konteks kelompok tani nelayan yang berusaha bertani dan menangkap ikan. Keberadaan kelompok tani nelayan juga mampu memajukan pembangunan masyarakat pesisir melalui kegiatan

bersama yang menjadi kekuatan utama dengan dampak signifikan pada kehidupan anggota dan masyarakat umumnya.

Menurut Hariadi (2011), kelompok memiliki ciri-ciri tertentu, seperti terdiri dari dua orang atau lebih, adanya interaksi antaranggota, memiliki tujuan bersama, dan membentuk satu kesatuan yang memiliki struktur dan pola hubungan untuk mencapai tujuan tersebut. Pembentukan kelompok, baik secara formal maupun informal, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan, kedekatan fisik, ketertarikan, tujuan bersama, dan pertimbangan ekonomi. Oleh karena itu, kelompok nelayan merupakan gabungan dari beberapa nelayan yang memiliki tujuan serupa dan latar belakang sosial-ekonomi yang mirip sebagai nelayan.

4.4 Unsur-Unsur Dinamika Kelompok

Unsur-unsur Dinamika Kelompok, Menurut Huraerah dan Purwanto (2010), Dinamika kelompok terdiri dari beberapa unsur, di antaranya tujuan kelompok, kekompakan kelompok, struktur kelompok, fungsi dan manfaat dinamika kelompok, kedinamisan kelompok, kesatuan dan kekompakan kelompok, suasana kelompok, ketaatan kelompok, dan maksud tersembunyi. Pembahasan beberapa elemen dinamika kelompok dapat dijelaskan pada uraian berikut.

4.4.1 Tujuan Kelompok

Tujuan kelompok menjadi unsur krusial bagi anggota kelompok, oleh karena itu, tujuan tersebut perlu disusun dengan jelas dan diketahui oleh seluruh anggota. Aktivitas bersama oleh seluruh anggota kelompok diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan kelompok yang dinamis seharusnya memiliki aspek-aspek pendukung, seperti memiliki makna yang relevan dan dapat diterima, orientasi anggota terhadap tujuan yang telah ditetapkan, kesetaraan tugas dan aktivitas, daya tarik yang menantang, kemudahan untuk menjelaskan dan mengubah tujuan kelompok, serta estimasi waktu yang dibutuhkan kelompok dalam mencapai tujuan.

4.4.2 Kekompakan Kelompok

Kekompakan kelompok dapat terlihat melalui rasa loyalitas, memiliki, keterlibatan, dan keterkaitan dalam kelompok. Faktor-faktor yang memengaruhi kekompakan kelompok meliputi kepemimpinan kelompok, keanggotaan, nilai tujuan kelompok, homogenitas anggota, keterpaduan kegiatan, dan jumlah anggota kelompok. Kekompakan menggambarkan kesatuan dalam menanggapi dan menghadapi permasalahan bersama.

4.4.3 Struktur Kelompok

Struktur kelompok mencakup hubungan antarindividu dalam kelompok sesuai dengan posisi dan peran masing-masing. Aspek-aspek yang terkait dengan struktur kelompok meliputi komunikasi, tugas dan pengambilan keputusan, kekuasaan, dan sarana interaksi. Beberapa faktor yang memengaruhi struktur kelompok antara lain ketidakjelasan tujuan perubahan kepada anggota, orientasi pada kepentingan pribadi, perubahan mendadak, kurangnya manfaat perubahan, ketidakikutsertaan unsur pimpinan kelompok, dan kepuasan kelompok terhadap kondisi saat ini.

4.4.4 Fungsi dan Manfaat Dinamika

Fungsi dinamika kelompok mencakup kemudahan kerjasama, pemecahan masalah, efisiensi pekerjaan, dan penciptaan iklim demokratis dalam masyarakat. Dinamika kelompok memberikan manfaat dalam mengatasi tantangan hidup, memfasilitasi pekerjaan, mengurangi beban kerja, dan menciptakan lingkungan yang dinamis dan efisien.

4.4.5 Kedinamisan Kelompok

Kedinamisan kelompok merupakan kualitas kelompok dalam mencapai tujuan, dapat dilihat dari jumlah tujuan yang sudah dicapai kelompok. Keberhasilan kelompok meningkatkan dinamika kelompok dari berbagai sudut, termasuk produktivitas, moral kelompok, dan tingkat kepuasan anggota. Sukses mencapai tujuan kelompok membuat anggota bangga dan puas, yang pada gilirannya meningkatkan dinamika kelompok. Kelompok yang dinamis terlibat

dalam aktivitas dasar seperti pencapaian tujuan, pemeliharaan internal, dan upaya untuk meningkatkan kedinamisan kelompok.

Penjelasan unsur-unsur dinamika kelompok lainnya tidak semuanya diuraikan, selanjutnya pemahaman mengenai dinamika kelompok nelayan sebagaimana di bawah ini.

4.5 Dinamika Kelompok Nelayan

Masyarakat pelaku utama perikanan yang tergabung dalam kelompok nelayan memiliki aktivitas kehidupan yang dapat ditinjau sebagai dinamika kelompok nelayan yang berdomisili di wilayah pesisir Nusantara. Pembahasan terkait dinamika masyarakatnya dapat diselaraskan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan. Pasal 4 ayat (1) mencantumkan penetapan jalur penangkapan ikan di WPPNRI mempertimbangkan karakteristik perairan, dan ayat (2) Karakteristik perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di WPPNRI di perairan laut tentang wilayah pengelolaan perikanan (WPP) di Negara Republik Indonesia.

Dinamika kelompok nelayan penulis coba sajikan secara sederhana dengan mengambil contoh-contoh di beberapa WPPNRI. Kita mulai dari WPP 716 yang meliputi Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera, diwakili nelayan tradisional kelurahan Malalayang Satu Timur Sondakh, Andaki dan Wasak (2017) mendapatkan kondisi masyarakat nelayan, yang dapat diutarakan sebagai berikut, aktivitas sehari-hari masyarakat nelayan sesuai dengan dinamikanya antara lain, pertama adalah kegiatan nelayan menangkap ikan dan memasarkan/menjual hasil tangkapan, nelayan juga membuat rumpon, merawat dan memperbaiki jaring, dan mesin kapal yang rusak termasuk merawat dan memperbaiki perahunya, serta kerja bakti membersihkan lingkungan pesisir pantai. Kedua nelayan aktif melaksanakan pertemuan rutin dalam bentuk arisan simpan pinjam. Ketiga Masyarakat nelayan juga melakukan aktivitas sosial dengan membantu nelayan yang terkena musibah misalnya pada kasus kebakaran atau kedukaan-kedukaan lainnya. Pada situasi

normal dinamika kelompok nelayan menunjukkan kelompok nelayan yang selalu bergerak naik, tetap, atau turun sesuai keadaan sekitarnya. Keberadaan kelompok nelayan di dalam komunitasnya memberikan proses perubahan positif bagi masing-masing anggota nelayan, yaitu dengan adanya budaya kelompok yang membantu nelayan dalam memecahkan masalah dengan meningkatkan kerja sama (gotong royong) sehingga pekerjaan lebih ringan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada umumnya.

Dinamika kelompok nelayan di WPPNRI 713 yang meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali diwakili nelayan-nelayan dari Kota Bontang (Haqiqiansyah dkk, 2016) menyampaikan dinamika kelompok tani nelayan tergolong tinggi diperlihatkan dengan adanya situasi dan kondisi masyarakat yang aktif, dimana sesama anggota nelayan mampu kerja sama yang baik. Berikutnya nelayan-nelayan Kutai Ardhana, Ahmad dan Rijal (2021) menunjukan adanya dinamika kelompok nelayan yang tergolong dinamis, hal ini diperlihatkan dengan adanya pembagian tugas yang lebih teratur.

Masih di WPPNRI 713 salah satu wilayahnya adalah Desa Kuranji Dalang di Kecamatan Labuapi, Nusa Tenggara Barat memperlihatkan dinamika kelompok nelayan berupaya memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Faktor internal antara lain pengalaman menjadi nelayan, teknologi yang masih sederhana, tidak adanya pelatihan khusus untuk nelayan, pendidikan rendah. Sedangkan faktor eksternal yang dapat dirangkum adalah bantuan dan pinjaman lunak dari pemerintah; pelatihan dan bimbingan dari pemerintah tentang teknologi penangkapan; potensi sumberdaya ikan; penangkapan ikan tergantung musim dan cuaca; kerusakan ekosistem laut. Dari kondisi ini perlu adanya pendampingan oleh penyuluh perikanan sehingga dinamika kelompok nelayan semakin terbina dengan baik (Suparyana, Indrawan and Septiadic, 2022). Satu lagi dinamika kelompok nelayan yang berada di Kelurahan Lappa Kabupaten Sinjai sebagaimana diungkapkan Ramdani (2016), terkait adanya perkembangan investasi, teknologi dan manajemen adalah stimulan perubahan sosial dalam konteks transformasi industri, yang mendorong diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan. Munculnya

ketimpangan penghasilan antara pemilik modal dengan pekerja menyebabkan kemunduraan nelayan, sedangkan masuknya alat tangkap modern berpengaruh positif terhadap meningkatnya hasil tangkapan yang menjadi indikator kemajuan nelayan. Dan masalah klasik masih terlihat adanya ketimpangan sistem pembagian hasil yang menyebabkan nelayan masih berada di garis kemiskinan.

Kota Sorong, salah satu wilayah yang masuk ke dalam WPPNRI 715 yang meliputi Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, laut Seram, dan Teluk Berau. Kawasan ini menyebar di enam provinsi di antaranya Papua Barat. Dinamika kelompok nelayan dapat digambarkan sebagaimana disampaikan Alwiarumatiga (2016) mengambil fokus di wilayah Soop dan mengutarakan adanya dinamika kelompok nelayan yang masih rendah, dikarenakan beberapa faktor penyebabnya antara lain belum terpenuhinya sarana transportasi, komunikasi, dan informasi. Letak geografis, sebagai salah pulau yang berdiri sendiri, dengan penduduk rata-rata sebagai nelayan. Masyarakat menangkap ikan tergantung musim, dengan alat tangkap yang sangat sederhana, menjual hasil tangkapannya kepada pengepul dengan harga yang murah. Berbeda jika nelayan menjual sendiri ke pasar di Kota Sorong, namun untuk menuju ke pasar harus menggunakan transportasi yang berbayar. Masyarakat kelurahan Soop juga berada di tingkat pendidikan yang rendah, sebagian masyarakat dengan kebiasaan pola hidup yang konsumtif. Adanya dinamika kelompok nelayan di Kota Sorong yang demikian memerlukan sentuhan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam meningkatkan taraf hidup berkemajuan trampil dan mampu mengelola sumber daya perikanan yang melimpah di wilayahnya.

Kajian-kajian di atas hanya sebagian kecil, yang diangkat sebagai pembelajaran tentang dinamika kelompok nelayan dari seluruh WPPNRI, sehingga dapat dijadikan sebagai masukan tentang pengetahuan dinamika kelompok nelayan dari segi kesamaan-kesamaannya maupun perbedaan-perbedaan yang muncul di setiap WWP di wilayah Indonesia.

4.6 Metode Dinamika Kelompok

Pelatihan masyarakat umumnya mengintegrasikan dinamika kelompok pada tahap awal kegiatan sebagai pengantar. Pelatih sering menggunakan prinsip-prinsip atau berbagai permainan dinamika kelompok dalam berbagai pelatihan. Di sini, dinamika kelompok tidak hanya dianggap sebagai sekadar acara pengenalan yang bersifat formalitas atau membuang waktu, melainkan dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan pelatihan itu sendiri, Rijanto Rudy (2020). Sebagai metode pelatihan, dinamika kelompok merupakan cara terstruktur yang diterapkan dalam proses untuk meningkatkan nilai-nilai kerjasama dalam kelompok. Dengan kata lain, metode dan proses dinamika kelompok ini bertujuan untuk membentuk dan membangun kelompok. Awalnya, kelompok terdiri dari individu-individu yang belum saling mengenal, namun melalui proses ini, mereka menjadi satu kesatuan kelompok dengan tujuan bersama, norma yang seragam, dan satu cara pencapaian yang disepakati secara kolektif dalam upaya mereka.

Mengacu pada teori dinamika kelompok berdasarkan *Force-Field Theory*, terdapat tiga tahapan pembaharuan perilaku kelompok. Implementasi pelatihan yang diadakan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Sorong bekerja sama dengan *Conservation International Indonesia* (CII) di Distrik Maibo Kota Sorong mencerminkan aplikasi teori tersebut dalam upaya mencapai perubahan positif dalam perilaku kelompok.



Gambar 4.1. Masa Perkenalan
(Sumber : PKP Sorong, 2021)

Tahapan-tahapan pembaharuan perilaku peserta pelatihan dengan metode dinamika kelompok dapat dibagikan dari pengalaman bersama masyarakat nelayan yang berlokasi di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana berikut.

4.6.1 Tahap *Unfreezing*

Merupakan Tahap menyiapkan perilaku peserta pelatihan, dengan upaya meminimalkan kekuatan perlawanan terhadap masing-masing anggota kelompok. Menyamakan persepsi anggota kelompok. Pada umumnya di awal permainan dinamika kelompok ini menggunakan kalimat setuju atau tidak setuju terhadap aturan-aturan yang akan dilakukan bersama. Di lapangan peserta masyarakat nelayan biasanya terdiri dari laki-laki dan perempuan penyamaan persepsi sangat penting agar saling menghargai satu sama lain. Salah satu gejala berkurangnya perlawanan adalah dengan pernyataan setuju terhadap tata tertib atau aturan-aturan permainan yang dipandu oleh pelatih dan diikuti oleh seluruh peserta.

4.6.2 Tahap *Moving*

Merupakan tahap pergerakan dimana terjadi perubahan dari orang, individu maupun kelompok, terkait tugas-tugas, struktur organisasi dan teknologi yang digunakan. Peserta melakukan gerakan-gerakan yang dipandu pelatih. Suasana gerakan yang mulai kompak terasa di permainan yang dijalankan. Suasana riang gembira penuh tawa dan bergerak bersama-sama dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan. Masyarakat nelayan menjadi tergerak dengan kesadaran yang tinggi untuk mengikuti pelatihan, dibimbing pelatih dan dilakukan dalam kelompok-kelompok untuk bergerak bersama sesuai tujuan.

4.6.3 Tahap *Refreezing*

Pada tahap akhir ini, merupakan proses penstabilan perilaku dengan berfokus pada penguatan dampak perubahan, evaluasi hasil perubahan, dan modifikasi konstruktif. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dapat diambil termasuk pengaturan proses umpan balik melalui optimalisasi *Team Building*. *Team building* adalah suatu metode yang diciptakan untuk membantu kelompok agar dapat

berinteraksi secara lebih efektif dengan mengevaluasi dan meningkatkan struktur, proses, kepemimpinan, komunikasi, penyelesaian konflik, dan kepuasan anggota kelompok secara keseluruhan.

4.7 Skema Metode Dinamika Kelompok

Metode dinamika kelompok mempunyai prosedur kerja sebagaimana *Force-Field Theory* terdiri dari pengenalan diri sendiri, mengenal orang lain, pembentukan kelompok, pertumbuhan kelompok, proses pengenalan dan membangun kelompok, nilai-nilai, norma dan komitmen belajar. Berikut penjelasannya diuraikan di bawah ini.

4.7.1 Proses Mengenal Diri Sendiri

Merupakan Proses mengenali diri sendiri melibatkan pemahaman terhadap potensi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang dimiliki seseorang, serta pengembangan potensi tersebut dengan memanfaatkannya secara efektif. Untuk memaksimalkan, merawat, dan meningkatkan kinerjanya, penting bagi seseorang untuk memahami potensinya secara lebih mendalam. Pendekatan untuk mengenali diri sendiri difokuskan pada empat aspek, yakni gaya belajar, gaya kepemimpinan, semangat untuk berkembang, dan aspek pribadi. Pada tahap awal ini, pelatih memberikan kesempatan kepada peserta untuk secara bebas mengungkapkan pemikiran dan perasaan mereka tentang diri sendiri. Pernyataan yang signifikan bagi pelatih adalah meyakinkan masyarakat nelayan bahwa mereka memiliki kekayaan sumber daya ikan, yang dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih memahami diri sendiri.

Masyarakat nelayan memiliki generasi penerus usaha yang akan mendukung keberlanjutan kehidupan mereka. Oleh karena itu, pelatih harus mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas generasi penerusnya dengan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Mengenal diri sendiri melibatkan pemahaman tentang potensi yang dimiliki dan mengetahui cara memanfaatkan serta mengembangkan potensi tersebut sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan baik secara individu maupun dalam konteks kehidupan bersosialisasi, berbangsa, dan bernegara. Potensi yang dimiliki dapat ditingkatkan

melalui proses pembelajaran, dan pemahaman tentang gaya kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang dapat ditingkatkan untuk mengidentifikasi kekurangan diri sendiri dan kemudian meningkatkan kemajuan pribadi.

4.7.2 Mengenal Orang lain

Kalimat tidak kenal maka tak sayang, menjadi salah satu yang dibangun pada tahapan kedua. Seseorang dalam mengembangkan potensi dirinya tidak dapat terlepas dari orang lain, sedemikian pentingnya peran orang lain yang berada di sekitaran seseorang. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, bertumbuh sendiri, berkembang sendiri, tentu memerlukan bantuan orang lain atau masyarakat. Manusia sejak dulu hidup berkelompok dalam keluarga, masyarakat, bahkan bersuku-suku bangsa.

Mengenal orang lain merupakan proses penyesuaian diri mencakup pemahaman terhadap orang lain, mengerti kelebihan dan kekurangannya, bagaimana perangnya, kecerdasannya, tingkat emosinya serta sikap mental dan pola pikirnya. Selanjutnya dengan mengenal orang lain dapat membentuk komunikasi yang baik berempati dan menundukkan diri pada posisi orang lain. Hal penting yang didapatkan dari upaya mengenal orang lain adalah seseorang dapat menata dan menyesuaikan diri dengan dasar saling menguntungkan.

Metode dinamika kelompok dalam praktiknya mengarahkan masyarakat nelayan sebagai peserta pelatihan melakukan langkah-langkah penyesuaian diri dengan menumbuhkan kemampuan mengendalikan diri, sabar, penuh toleransi, saling menghargai, saling menghormati dan kesediaan untuk berkorban.

4.7.3 Pembentukan Kelompok

Terbentuknya sebuah kelompok menjadi pembahasan yang menarik jika ditinjau dari beberapa teori yang disampaikan para tokoh sebagaimana uraian berikut. Seperti nampak pada gambar 2 pelatihan dipandu seorang instruktur/pelatih bagi peserta pelatihan yang memanfaatkan metode dinamika kelompok dan diterapkan bagi masyarakat pesisir yang tergabung ke dalam kelompok nelayan.



Gambar 4.2. Tes Awal
(Sumber : PKP Sorong, 2021)

Beberapa teori terbentuknya kelompok antara lain sebagaimana pembahasan berikut.

1. Teori Kedekatan (*Propinquity*)

Menjelaskan bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan adanya kedekatan ruang atau wilayahnya. Masyarakat pesisir yang hidup di sepanjang pantai, berkelompok membentuk masyarakat nelayan. Jika dibandingkan dengan masyarakat kota yang terpisah jaraknya maka masyarakat nelayan lebih mengenal satu sama lain dalam kelompoknya, hingga menimbulkan kedekatan yang saling mengikat.

2. Teori George Homans

Teori dari George Homans, yang mendasarkan pada aktivitas, interaksi dan perasaan atau emosi yang biasa dikenal dengan sentimen. Semakin banyak aktivitas yang menimbulkan interaksi seseorang dengan orang lain semakin banyak sentimen yang dipahami orang lain dan ditularkannya aktivitas dan interaksi dalam kelompok.

3. Teori Keseimbangan Theodore Newcomb

Ketertarikan seseorang kepada orang lain ditimbulkan adanya kesamaan sikap dalam menanggapi permasalahan untuk menuju sebuah tujuan.

4. Teori Pertukaran

Adanya interaksi antar anggota kelompok yang tersusun dalam strata hadiah-biaya-hasil. Hadiah merupakan hasil interaksi yang

menjadi kebutuhan, sedangkan biaya menimbulkan rasa kekhawatiran,antisipasi untuk mencapai tujuan di dalam sebuah kelompok.

5. Teori Alasan Praktis

Teori yang didasarkan alasan praktis. Adanya alasan-alasan praktis yang cenderung memberikan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan sosial menjadi dasar dari orang-orang membentuk kelompok.

Teori-teori di atas memberikan pengetahuan bahwa dengan memahami asal mula pembentukan kelompok, dapat diidentifikasikan karakteristik dari suatu kelompok tersebut. Sehingga Reitz (1977) mengutarakan sebuah karakteristik kelompok yang menonjol dapat dilihat dari adanya dua orang atau lebih, adanya interaksi satu sama lain, saling berbagi tugas untuk tujuan yang sama dan masing-masing anggota merasa dirinya sebagai suatu kelompok. Pada masyarakat nelayan, dinamika kelompok yang muncul berlatar belakang kesamaan prinsip dalam kehidupan sosial, pandangan yang sama dalam penyelesaian masalah yang dihadapi bersama, dan pencapaian tujuan yang terkoordinir oleh ketua-ketua kelompok yang ada. Hal ini menjadi modal besar dalam pelaksanaan pelatihan masyarakat nelayan dengan metode dinamika kelompok.

4.7.4 Pertumbuhan Kelompok

Pertumbuhan kelompok tidak lepas dari sifat manusia sebagai individu maupun makhluk sosial yang berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya manusia tersebut tidak terlepas dari pengetahuan kebudayaan yang dimiliki dan digunakannya untuk mempersepsi obyek yang dihadapi dan bertindak dengan perilaku tertentu yang sesuai dengan obyek tersebut. Hampir semua upaya manusia untuk mencapai kehidupannya tidak ada satupun yang terlepas dari sentuhan manusia lainnya. Kehidupan masyarakat nelayan yang sangat lekat dengan gotong royong, merupakan faktor penumbuh kelompok di masyarakat pesisir.

Ada empat fase pertumbuhan kelompok antara lain (1) fase kekelompokan atau *forming*, ditandai dengan anggota kelompok melakukan peninjauan, hubungan sesama anggota masih kaku, malu-

malu dan belum mengerti dengan jelas tujuan kelompok. Hasil akhir dari fase forming antara lain terbentuknya kekompakan kelompok. (2) Kedua adalah fase *storming* atau peralihan, ditandai dengan timbulnya kegaduhan, masing-masing anggota menunjukkan egonya, dengan melihat kelemahan anggota yang lain dan menonjolkan kekuatan diri. Ciri yang paling nampak adalah masing-masing anggota berusaha mempengaruhi anggota-anggota yang lain. (3) fase *norming* dimana terjadi pembentukan norma, dicirikan dengan suasana kelompok yang lebih harmonis dan sepakat menuju tujuan yang sama tanpa canggung (4) Terakhir fase *performing* adalah fase-fase berprestasi, peserta sudah menunjukkan kerjasama yang baik, saling tolerir terhadap perbedaan dan komunikasi yang terbuka serta berkembangnya inovasi-inovasi di dalam kelompok.

4.7.5 Proses Pengenalan dan Membangun Kelompok

Masyarakat nelayan yang berada dalam satu kawasan dapat dipersepsikan sudah saling mengenal. Pada metode dinamika kelompok hal ini lebih diperdalam ke masing-masing individu sehingga timbul kesadaran pentingnya membangun kelompok. Tentulah atas dasar pembimbingan para pelatih masyarakat diarahkan untuk mengenal lebih dekat dengan cara permainan peserta yang dikenal dengan istilah ice breaking. Masyarakat sekali lagi dipersilakan memperkenalkan diri masing-masing, menyampaikan pengalaman, keahlian yang dimiliki agar masyarakat nelayan saling berkomunikasi dan saling diskusi sehingga dapat saling mengenal lebih dekat.

Banyaknya persamaan dalam menjalani kehidupan sosial dengan situasi dan kondisi yang dirasakan bersama di antara masyarakat nelayan menimbulkan minat untuk membangun kelompok. Termasuk pemahaman gaya belajar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi pemicu pembentukan nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat nelayan.

4.7.6 Nilai-nilai, Norma, dan Komitmen Belajar Bersama.

Pada pelatihan yang memanfaatkan metode dinamika kelompok akan dilalui dengan pencapaian nilai-nilai, norma, dan komitmen belajar bersama. Adanya tata interaksi yang disepakati

bersama antar anggota kelompok yang mengatur sikap dan perilaku, misalnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, konsekuensi jika melanggar yang diberlakukan dengan adil dan sama bagi setiap anggota kelompok. Suasana yang muncul ketika dinamika kelompok diterapkan pada pelatihan masyarakat nelayan memperlihatkan mereka senang belajar sambil bermain. Dibandingkan masyarakat nelayan belajar di kelas dengan mendengarkan ceramah, menulis dan membaca, mereka lebih suka dengan metode dinamika kelompok.

Setiap kelompok paham akan kesepakatan norma baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap anggota, bahkan terkadang menjadi perekat keakraban antar anggota dalam mencapai tujuan kelompoknya. Perasaan in-group menjadi semakin kuat. Dapat dipraktikkan pada adu lomba antar kelompok, maka perasaan in-group dari masing-masing anggota semakin kuat dengan meningkatkan persatuan untuk mencurahkan pikiran, tenaga dan swadaya demi memenangkan lomba. Pada masyarakat nelayan hal ini sangat menyenangkan ketika peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok memilih ketua sebagai pemimpin, rata-rata ketua kelompok dipegang peserta perempuan. Pemimpin bertugas mengkoordinir anggota kelompok untuk mencapai tujuan dan memperhatikan kesejahteraan anggotanya.

Selanjutnya komitmen belajar akan tercipta dengan keberhasilan pelatihan yang menciptakan hasrat yang kuat untuk mengikuti pembelajaran secara individual, kelompok maupun bersama secara total untuk mengembangkan wawasan, intelektual maupun emosional kelompok. Pengalaman bersama masyarakat nelayan memberikan kesan yang menarik dengan adanya keinginan belajar yang tinggi dari masyarakat terutama yang berkaitan dengan alat tangkap terbaru dan cara-cara melestarikan sumber daya ikan yang menjadi tanggung jawab masyarakat pesisir. Termasuk pengelolaan keuangan sederhana yang dirasa sangat bermanfaat.

Pembelajaran biasanya dilalui dengan mengalami secara langsung, lebih mengena bagi masyarakat nelayan. Berikutnya demonstrasi oleh pelatih, yang selanjutnya akan diterapkan oleh masing-masing peserta pelatihan di rumah. Pembelajaran dari pengalaman

dan mempraktikannya sendiri. Komitmen belajar bersama yang dilakukan masing-masing peserta dalam hal ini masyarakat nelayan dipantau dengan cara dibimbing oleh pelatih untuk membuat jurnal kegiatan belajar. Isi jurnal kegiatan antara lain catatan-catatan proses pembelajaran yang dirasakan masyarakat nelayan, kejadian-kejadian yang dialami, kendala-kendala selama mengikuti pembelajaran, kesan mendalam dan manfaat belajar yang dapat dipetik, serta harapan-harapan selama dan sesudah pembelajaran. Dan yang tidak kalah penting catatan-catatan pertumbuhan dan perkembangan kelompok nelayan yang sangat bermanfaat bagi pelatih sebagai bahan pelatihan berikutnya.

4.8 Penutup

Dinamika kelompok nelayan menjadi pembahasan komprehensif, dimulai dari aktivitas kehidupan masyarakat pesisir yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Di samping itu dinamika kelompok merupakan metode pelatihan bagi masyarakat nelayan. Bermuara pada tugas dan fungsi penyuluh perikanan sebagai pendamping masyarakat nelayan, yang terkenal juga sebagai penyambung lidah pemerintah, maka tulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya dinamika kelompok nelayan menjadi indikator yang mengarahkan pemerintah pusat maupun daerah untuk bersama-sama memberikan perhatian agar tidak bersifat statis tanpa perubahan, tetapi sebaiknya dinamika kelompok nelayan melaju dari waktu ke waktu, dan ke depannya lebih baik, lebih sejahtera masyarakat nelayan sebagai ujung tombak penjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwiarumatiga (2016) 'Perubahan sosial masyarakat pesisir pantai pasca kebijakan pemerintah tentang pengentasan kemiskinan di kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong', *ejournal.um-sorong.ac.id*.
- Ardhana, M. R., Ahmad, M. R. and Rijal, S. (2021) 'Penggunaan Variasi Bahasa di Media Sosial Twitter: Kajian Sociolinguistik', *Adjektiva: Educational Languages and Literature Studies*, 4(1), pp. 1–9. doi: 10.30872/adjektiva.v4i1.1444.
- Aris (no date) *Pengertian Dinamika: Jenis-Jenis, Ciri-Ciri, dan Contohnya*, Gramedia. Available at: <https://www.gramedia.com/literasi/dinamika/>.
- Haqiqiansyah, G. (2016) 'Analisis Dinamika Kelompok Tani Nelayan Di Pesisir Kota Bontang', *Agriekonomika*, 5(1), p. 31. doi: 10.21107/agriekonomika.v5i1.1288.
- Hariadi, S. S. (2011) *Dinamika kelompok. Teori dan aplikasinya untuk analisis keberhasilan kelompok tani sebagai unit belajar, kerjasama, produksi dan bisnis*. Yogyakarta: Sekolah pasca sarjana UGM.
- Huraerah, A. and Purwanto (2010) *Dinamika kelompok, konsep dan aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Johnson, D. W. and Johnson, F. P. (2012) *Dinamika kelompok: teori dan ketrampilan*. Jakarta: Indeks.
- Kelembagaan, P. et al. (2012) 'Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Tentang Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia', pp. 1–33.
- Lestari, M. (2015) 'Dinamika Kelompok dan Kemandirian Anggota Kelompok Tani Dalam Berusaha Di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah', pp. 18–37.
- Ramdani, A. (2016) 'Dinamika masyarakat nelayan di Kelurahan Lappa Sinjai', *Jurnal Ilmiah Administrasita*.
- Rijanto Rudy, B. (2020) 'Bahan pembelajaran dinamika kelompok', *Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan*, p. 52.

- Sondakh, V. B., Andaki, J. A. and Wasak, M. P. (2017) 'MALALAYANG SATU TIMUR KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Malalayang Satu Timur merupakan salah satu bagian dari jumlah nelayan yang Kelurahan Malalayang Satu Timur yang menjadi lokasi pengambilan data berada di Kecamatan Malayayang Nelayan di Kelurahan Mala', 5(9).
- Suparyana, D. P. K., Indrawan, I. P. E. and Septiadic, D. (2022) 'Faktor Internal Eksternal Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Pada Kelompok Nelayan Putra Bahari di Desa Kuranji', *Jurnal Edukasi Matematika dan Sains*.

BAB 5

PARTISIPASI DALAM PENYULUHAN

Oleh Trisnani Dwi Hapsari

5.1 Pendahuluan

Partisipasi atau “*to take part*” berasal dari bahasa Inggris merujuk pada keterlibatan atau ambil bagian dalam suatu kegiatan. Made Pidarta dalam jurnal penelitian Dwiningrum (2011) menyatakan partisipasi mencakup keterlibatan individu atau kelompok kegiatan. Keikutsertaan tersebut dapat bersifat fisik, mental dan emosional, melibatkan pemanfaatan seluruh kemampuan yang dimiliki dalam segala kegiatan yang dilakukan. Selain itu, partisipasi juga melibatkan pemberian dukungan untuk mencapai tujuan serta pemenuhan tanggung jawab dalam sebuah kegiatan. Partisipasi akan mendorong dukungan terhadap pencapaian tujuan kelompok. Dalam konteks lain, partisipasi diartikan sebagai suatu proses masyarakat yang kurang beruntung secara pendidikan, gender, penghasilan, dan domisili, memiliki pengaruh atau kendali terhadap keputusan yang diambil secara langsung memengaruhi kesejahteraan hidup mereka (Deepa Naryan, 1995). Partisipasi melibatkan pikiran dan perasaan seseorang dalam sebuah kelompok yang membuat mereka berkontribusi pada tujuan kelompok tersebut. Hal ini mencakup keterlibatan mental dan emosional dalam mencapai tujuan bersama (Huneryear dan Heoman dalam Dwiningrum, 2011).

Pengertian partisipasi secara sederhana dijelaskan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001), partisipasi mencakup keterlibatan kelompok atau masyarakat dalam menyampaikan masukan, jasa, pendapat, keterampilan dan barang. Selain itu, partisipasi melibatkan kelompok dalam mengidentifikasi masalah, mengevaluasi opsi, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Lebih lanjut H.A.R Tilaar (2009) menjelaskan partisipasi adalah perwujudan dalam mengembangkan demokrasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan melalui proses

desentralisasi pembagian wewenang dan tanggung jawab.

World Bank menafsirkan partisipasi diartikan sebagai proses di mana para pemegang kepentingan memengaruhi dan berbagi kontrol inisiatif keputusan, pembangunan serta sumber daya yang memengaruhi kelompok (Kok & Amy, 2017). Bhattacharyya (2004) mengungkapkan partisipasi sebagai salah satu prinsip yang dipahami dalam pembangunan masyarakat. Menurutnya, partisipasi berarti turut serta dalam menciptakan makna kolektif. Kelebihan partisipasi menurut Sunu dan Giriwati (2019) yaitu peningkatan dukungan terhadap program, pemilihan program yang memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal, pengurangan biaya melalui pemanfaatan sumber daya lokal, dan efisiensi dalam mekanisme pemecahan masalah. Khatimah et al. (2019) juga menyoroti peran partisipasi untuk mewujudkan restorasi ekologi, fokus pada hubungan antara manusia dengan pengelolaan landscape dalam kerangka interaksi sistem sosial ekologi. Dasgupta dan Shaw (2017) mengemukakan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk menjadikan hubungan manusia dan lingkungan berkelanjutan terhadap sumber daya, habitat, dan ekosistem.

Mikkelsen (1999) menyebutkan enam definisi partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi dimana masyarakat berkontribusi dalam kegiatan tanpa ikut dalam setiap pengambilan keputusan;
2. Partisipasi sebagai "pemekaan" para pihak dalam menanggapi proyek pembangunan;
3. Partisipasi sebagai perubahan yang diwujudkan sendiri oleh masyarakat dengan sukarela;
4. Partisipasi sebagai kelompok yang aktif dan inisiatif untuk melakukan kegiatan secara bekerja sama;
5. Partisipasi sebagai masyarakat dan staf yang berdialog dalam melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan;
6. Partisipasi sebagai upaya pembangunan kehidupan dan lingkungan yang melibatkan masyarakat.

Partisipasi masyarakat memiliki beberapa kepentingan menurut Conyers (1991), yaitu:

1. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai sarana guna mendapatkan informasi tentang kondisi, permasalahan, kebutuhan dan pandangan masyarakat setempat. Tanpa keterlibatan masyarakat, program pembangunan dan proyek-proyek cenderung berpotensi mengalami kegagalan.
2. Partisipasi juga dianggap penting karena membuat masyarakat lebih meyakini program pembangunan ketika mereka merasa terlibat dalam tahap perencanaan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dapat membangun hubungan manusia dan lingkungan yang berkelanjutan dalam konektivitas sistem sosial ekologi dan membangun kepedulian pada sumber daya, habitat dan ekosistem. Aspek demokratis juga menjadi dasar, dimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dianggap sebagai hak yang harus diakui, sehingga setiap individu dapat ikut serta dalam meningkatkan kemampuan (keberdayaan) mereka. Hal ini dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta kegiatan jangka panjang yang terkait dengan program pembangunan.

5.2 Partisipasi Masyarakat

Prinsip partisipasi melibatkan langsung masyarakat yang aktif dan hanya dapat terwujud jika masyarakat turut serta sejak awal, selama proses dan dalam pembentukan hasil. Purbathin Hadi (2015) mengemukakan (1) Menghindari kemungkinan adanya manipulasi. Keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan keinginan masyarakat itu sendiri; (2) Menambah nilai keabsahan dalam penyusunan perencanaan yang melibatkan banyak partisipan sehingga semakin menguntungkan; (3) Meningkatkan kesadaran serta keterampilan politik masyarakat. Partisipasi masyarakat diungkapkan oleh Isbandi (2007) bahwa melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi di lingkungan mereka, serta dalam pemilihan dan pengambilan keputusan secara konsensus mengenai alternatif solusi untuk menangani masalah. Keterlibatan masyarakat juga terjadi dalam pelaksanaan upaya

untuk mengatasi masalah dan dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Pasaribu dan Simanjuntak (1986), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mengindikasikan bahwa masyarakat turut serta dengan cara mengikuti dan mendukung pemerintah. Hal ini disebabkan pemerintah sebagai penyandang utama dalam biaya, perencanaan dan pelaksanaan dalam proses pembangunan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara maksimal dapat diwujudkan dengan pendanaan yang optimal serta keikutsertaan masyarakat dalam hal perencanaan, proses dan hasil pembangunan untuk kepentingan bersama.

Partisipasi masyarakat dianggap sebagai komponen penting dalam proses pemberdayaan, dan pembangkitan kemandirian (Craig dan May, 1995 dalam Hikmat, 2004). Hikmat (2004) menjelaskan bahwa pemberdayaan dan partisipasi dianggap sebagai strategi dengan potensi besar untuk meningkatkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui proses ini, dapat tercapai pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Hoofsteede (1971) dalam Purbathin Hadi (2015) partisipasi berarti "*The taking part in one or more phases of the process*" atau terlibat dalam satu tahap atau lebih dari sebuah proses. Sementara itu, menurut Fithriadi, dkk. (1997), partisipasi dianggap sebagai unsur kunci dalam pendekatan pembangunan yang memperhatikan masyarakat dan berkesinambungan, dan merupakan suatu proses interaktif yang terus menerus sebagai sarana menumbuhkan modal sosial di masyarakat.

Partisipasi masyarakat sebagai hak dalam proses demokrasi dapat diartikan sebagai kemampuan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga resmi yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan untuk berkumpul, berbicara, dan berkontribusi secara positif. Dalam konteks otonomi daerah, yang menekankan pada pemberian wewenang kepada masyarakat di daerah tertentu, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk membuka ruang partisipasi bagi seluruh komponen masyarakat dalam semua tahap pembangunan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung-jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Melalui partisipasi yang diberikan masyarakat, disadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki hidup keluarga dan lingkungannya.

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Menurut Slamet (1985), tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, ditentukan tiga unsur pokok, yaitu: 1) kesempatan berpartisipasi yang diberikan kepada masyarakat; 2) masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi; dan 3) masyarakat memiliki kemauan untuk berpartisipasi.

1. Kesempatan berpartisipasi yang diberikan kepada Masyarakat.

Kesempatan partisipasi masyarakat harus diberikan sejak awal gagasan disosialisasikan. Selain dari kesempatan yang diberikan oleh program, perlu juga memperhatikan apakah masyarakat memiliki waktu dan kesempatan dari diri mereka sendiri untuk berpartisipasi. Masyarakat perlu diberi informasi mengenai program yang akan dilaksanakan dan dijelaskan bagaimana mereka dapat berperan dalam pengembangan program yang dapat memberikan dampak positif untuk wilayah mereka. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, kesempatan untuk berpartisipasi juga harus tersedia dari masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, jika program telah memberikan banyak akses untuk berpartisipasi, warga juga harus memiliki waktu untuk berpartisipasi melalui kesempatan yang telah disediakan.

2. Masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dapat dilihat dari aspek fisik, mental, dan materi. Kemampuan fisik mencakup kondisi kesehatan dan usia masyarakat, sementara kemampuan mental melibatkan keahlian, interaksi, pendidikan, dan

pengalaman kerja. Kemampuan materi mencakup sumbangan barang dan uang dari masyarakat untuk mendukung program. Selain kesempatan dan kemampuan yang diberikan oleh program, penting juga untuk memperhatikan apakah masyarakat memiliki waktu dan kesempatan dari diri mereka sendiri untuk berpartisipasi. Dengan adanya kemampuan dari masyarakat, partisipasi warga untuk mendukung pengembangan program dapat terwujud.

3. Masyarakat memiliki kemauan untuk berpartisipasi. Selain dari peluang dan kapabilitas yang dimiliki oleh masyarakat, aspek penting lain yang menjadi syarat mutlak untuk terwujudnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan adalah adanya dorongan atau keinginan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Keberadaan keinginan yang tinggi di kalangan masyarakat dapat menjadi pendorong kuat bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan dan potensi yang dimiliki, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pelaksanaan program pembangunan.

5.3 Jenis Partisipasi Masyarakat

Dusseldorp (1981) mengidentifikasi berbagai bentuk kegiatan partisipasi masyarakat antara lain: 1) Bergabung dalam kelompok masyarakat; 2) Terlibat dalam pembicaraan bersama kelompok; 3) Terlibat dalam kegiatan organisasi dengan tujuan mendorong partisipasi masyarakat lain; 4) Mendorong sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat; 5) Ikut serta dalam proses pengambilan keputusan; 6) pemanfaatan hasil yang diperoleh dari kegiatan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan mencerminkan kesediaan anggota masyarakat untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Dusseldorp (1981) menjelaskan bahwa tingkat kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Keterlibatan Sukarela
Peran serta yang berkembang karena dorongan dari dalam, mencakup pemahaman, pengalaman, dan keyakinan pribadi.

2. Partisipasi yang Disebabkan oleh Faktor Tertentu
Keterlibatan yang tumbuh karena dipacu oleh motivasi ekstrinsik, seperti dorongan, rayuan, atau pengaruh dari luar, meskipun individu tersebut masih memiliki kebebasan sepenuhnya untuk ikut serta.
3. Partisipasi Tertekan oleh Kebiasaan
Partisipasi berkembang karena tekanan yang dirasakan oleh masyarakat secara umum. Partisipasi yang dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebiasaan, serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Keterlibatan ini mungkin muncul karena kekhawatiran akan diasingkan atau diabaikan oleh masyarakat sekitar jika tidak ikut berpartisipasi.
4. Partisipasi dipengaruhi oleh tekanan faktor sosial-ekonomi
Partisipasi masyarakat terjadi karena adanya ketakutan akan kehilangan status sosial atau mengalami kerugian dengan tidak mendapatkan bagian dari manfaat yang dihasilkan oleh kegiatan pembangunan.
5. Partisipasi yang terhambat oleh aturan atau regulasi
Masyarakat tidak ikut berpartisipasi karena takut menerima hukuman dari peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Kesempatan untuk masyarakat dalam keterlibatan proses pembangunan terkait dengan keinginan politik pemerintah. Menurut Raharjo (1982), terdapat tiga bentuk variasi partisipasi masyarakat, yakni: 1) Partisipasi Terbatas, keterlibatan dalam kegiatan tertentu demi mencapai tujuan pembangunan; 2) Partisipasi Penuh, keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam semua aspek kegiatan pembangunan; dan 3) Mobilisasi tanpa partisipasi, partisipasi yang didukung oleh pemerintah, tetapi masyarakat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan kepentingan pribadi serta tuntutan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi masyarakat menurut Yadav (1980) yaitu:

1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
Diperlukan usaha untuk meyakini masyarakat untuk pengambilan Keputusan dalam pembangunan di daerah mereka melalui platform yang memungkinkan partisipasi langsung

dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah setempat.

2. Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai dan tenaga kerja harus merata dan sepadan dengan manfaat yang diterima masyarakat.

3. Keterlibatan dalam Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan pembangunan menjadi krusial, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Selain itu, partisipasi tersebut juga bermanfaat untuk mendapatkan umpan balik mengenai masalah atau kendala yang timbul selama pelaksanaan proyek pembangunan yang sedang berlangsung.

4. Keterlibatan dalam Pemanfaatan Hasil

Diperlukan partisipasi masyarakat sukarela untuk memanfaatkan hasil pembangunan. Pemanfaatan hasil pembangunan berupa balai desa untuk kegiatan diskusi masyarakat, tidak merusak fasilitas umum dan menjaga kebersihannya, berpartisipasi dalam pemanfaatan dan menyukseskan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk kesejahteraan masyarakat, dsb.

5.4 Tahap Partisipasi

Ragam partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada keterlibatan fisik atau kontribusi tenaga, melainkan mencakup beragam bentuk partisipasi dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat seharusnya melibatkan setiap tahapan pembangunan, karena setiap tahap dianggap sebagai bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan. (Coben dan Uphof 1979) dalam (Ndraha T., 1990) membagi partisipasi ke beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap perencanaan, diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam sesi diskusi atau pertemuan. Pengambilan keputusan melalui konsensus, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat dan berperan dalam memberikan suara, ide, gagasan dan sumbang saran.

2. Pelaksanaan adalah tahap paling penting dalam proses pembangunan, karena esensi dari pembangunan terletak pada tahap ini. Partisipasi pada tahap pelaksanaan dapat diidentifikasi dalam tiga bentuk utama, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.
3. Tahap evaluasi, merupakan tahap yang signifikan karena keterlibatan masyarakat pada saat ini memberikan umpan balik yang dapat memberikan masukan untuk meningkatkan pelaksanaan proyek berikutnya.
4. Tahap menikmati hasil oleh masyarakat. Lebih lanjut, dengan memandang masyarakat sebagai subjek pembangunan, tingkat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat menjadi indikator keberhasilan program, sehingga semakin besar manfaat yang diterima masyarakat, semakin sukses proyek tersebut mencapai tujuannya.

Sherry R Arnstein (1969) pada makalahnya dalam *Journal of the American Institute of Planners* dengan judul "*A Ladder of Citizen Participation*", mengklasifikasikan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah ke dalam delapan tingkatan, berdasarkan kekuatan dan pengaruh masyarakat dalam proses perencanaan, ke-8 tingkatan tersebut mencakup berikut:

1. *Manipulation* (manipulasi). Tahap ini merupakan bentuk partisipasi paling rendah, yang memposisikan masyarakat digunakan sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai kelompok perwakilan/badan penasehat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat tidak nyata tetapi hanya menjadi alat publikasi formalitas, seakan bentuk dukungan masyarakat dari pihak penguasa, padahal hanya diwakili oleh segelintir kelompok yang mudah diminta persetujuannya karena ada kepentingan tertentu atau posisi ketidakberdayaan.
2. *Theraphy* (terapi/penyembuhan). Masyarakat terlibat dalam proses, namun hanya diberikan informasi dan tidak memiliki

kebebasan untuk menyuarakan pendapat dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat terbatas pada memberikan masukan yang kemudian digunakan oleh pemerintah demi kepentingannya.

3. *Informing* (informasi). Pada tahap pemberian informasi, pihak berwenang tidak menghalangi partisipasi masyarakat, namun juga tidak menerapkan aspirasi publik. Mereka hanya berkomunikasi satu arah atau menyampaikan informasi yang akan dan sudah dijalankan. Meskipun masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik, semua perencanaan telah ditetapkan oleh pemerintah, dan masyarakat memiliki sedikit peluang untuk mempengaruhi rencana, terutama ketika informasi diberikan pada tahap akhir perencanaan.
4. *Consultation* (konsultasi). Pada tingkat ini, terdapat diskusi yang melibatkan berbagai elemen, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pihak utama, apakah saran dan kritik dari masyarakat akan diakomodasi atau tidak. Sebagai contoh, pemerintah mengadakan forum diskusi untuk merumuskan kebijakan. Meskipun melibatkan pendapat masyarakat dan menyediakan informasi kepada mereka dianggap krusial dalam mencapai partisipasi sepenuhnya dari masyarakat. Meskipun terjadi dialog antara masyarakat dan pemerintah, keberhasilannya cenderung rendah karena tidak ada jaminan bahwa kepedulian dan ide-ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang umum digunakan meliputi survei, pertemuan lingkungan masyarakat, dan mendengarkan pendapat dari masyarakat.
5. *Placation* (penentrman/perujukan). Individu dalam masyarakat diakui sebagai anggota kelompok yang berkerjasama dalam pengembangan kelompok masyarakat. Masyarakat mulai memberikan pengaruh tertentu namun keputusan tetap dipegang oleh pemerintah.
6. *Partnership* (kerjasama). Kesepakatan bersama menjadi aspek utama dalam fase ini. Kesepakatan bersama dilakukan untuk saling bertanggung jawab dalam keputusan yang telah

- diambil. Pada tingkat ini, tercapai tingkat kekuasaan warga (*citizen power*), sehingga terbentuk kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program. Sudah terjadi keselarasan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.
7. *Delegated Power* (pelimpahan kekuasaan). Pada fase ini, masyarakat diberikan tanggung jawab atau delegasi kekuasaan untuk membuat keputusan dominan terkait dengan suatu rencana atau program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan proses tawar menawar dengan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan kemudian keputusan tersebut diakui oleh pemerintah. Hal ini memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas program kepada masyarakat.
 8. *Citizen Control* (kontrol masyarakat) Pada tahap ini, masyarakat memiliki kontrol yang kuat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat memiliki wewenang dalam bernegosiasi dengan pihak luar untuk melakukan perubahan.

Dalam klasifikasi yang diusulkan oleh Arnstein (1995) terdapat tiga kelompok besar, yaitu: 1. Tidak ada partisipasi atau non-participation yang mencakup manipulasi dan terapi. 2. Partisipasi dalam bentuk penerimaan kebijakan atau degrees of tokenism (partisipasi pasif) yang mencakup memberikan informasi, berkonsultasi, dan memberikan kesenangan; 3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk memiliki kekuasaan mencakup *citizen control, delegated power dan partnership*.

5.5 Partisipasi dalam Penyuluhan Perikanan

Potensi sumberdaya perikanan di suatu daerah akan mencapai pemanfaatan yang optimal apabila didukung oleh berbagai faktor, termasuk program penyuluhan perikanan dan peran serta aktif pelaku utama perikanan sebagai penerima manfaat dari program tersebut. Kegiatan penyuluhan perikanan merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup daerah pesisir. Partisipasi aktif

dari masyarakat menjadi modal utama dalam pencapaian tujuan dari program penyuluhan perikanan tersebut, sehingga meningkatkan modal sosial dalam masyarakat yang bermanfaat dalam menyukseskan berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/Permen-Kp/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan penyuluhan perikanan dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga diklat dan organisasi. Peran penyuluh, sesuai dengan rencana program kerja penyuluh yang disusun harus mempertimbangkan potensi, masalah dan struktur kelembagaan yang ada. Dengan demikian, rencana program kerja penyuluh diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Mardikanto (1988) mengemukakan bahwa dalam upaya mencapai tujuan penyuluhan, penting untuk memiliki perlengkapan atau alat penyuluhan yang memadai. Perlengkapan ini dapat dibagi menjadi alat bantu penyuluh dan alat peraga penyuluh. Di Balai Penyuluhan Perikanan, alat bantu penyuluh meliputi buku panduan atau pedoman penyuluhan, papan tulis, whiteboard, proyektor, dan pengeras suara. Sementara itu, alat peraga penyuluh yang umumnya digunakan mencakup leaflet, poster, brosur, dan lain sebagainya.

Menurut Mahbud (2007), untuk meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan diperlukan pendekatan penyuluhan partisipatif, di mana penerima manfaat terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penyuluhan perikanan yang bersifat partisipatif, masyarakat tidak hanya dibiarkan menghadapi informasi sendirian, tetapi mereka juga terlibat dalam analisis masalah dan merumuskan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Selain itu menurut Hadi (2014), tujuan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat adalah untuk secara komprehensif dan berkelanjutan mendukung pengembangan sumber daya manusia. Muchtar (2016) menyatakan bahwa pembangunan memiliki prinsip cenderung dari pimpinan paling atas kemudian ke terendah masih sangat dominan, sehingga banyak program yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tingkat partisipasinya rendah. Meskipun berbagai program

pembangunan pemerintah mencapai keberhasilan dalam aspek teknis, namun jarang yang berhasil dalam memberdayakan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Program-program semacam itu dapat menimbulkan ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Selain itu, beberapa penelitian menyatakan bahwa fungsi penyuluhan belum secara efektif mendukung pemberdayaan masyarakat (Fatchiya 2010, Sjafari 2010). Kustiari at al. (2012) menyatakan penyuluhan yang efektif akan meningkatkan produktivitas sasaran luluh.

5.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

5.6.1 Faktor Pendukung Keberhasilan Partisipasi Masyarakat

Faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap keberlanjutan program pemberdayaan adalah penyuluhan atau pelatihan yang dapat meningkatkan motivasi serta partisipasi aktif masyarakat. Penyuluhan yang berhasil tergantung pada kemampuan membuat penerima manfaat sebagai subjek dan pengambil keputusan dalam kegiatan, sehingga manfaatnya dapat berlanjut dan menciptakan kemandirian bagi masyarakat. Faktor pendorong merujuk pada faktor yang dapat memotivasi untuk berperan serta dalam proses pembangunan. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat yakni:

1. Partisipasi dilakukan untuk kepentingan masyarakat atau pemerintah. Semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat akan tercipta apabila masyarakatnya mau aktif berpartisipasi.
2. Siapa yang mengendalikan, apakah pemerintah pusat, daerah, atau lembaga donor. Apabila kendali dipegang oleh pemerintah daerah, keberhasilan cenderung lebih tinggi, mereka mempunyai pemahaman yang lebih baik akan permasalahan, kondisi, dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
3. Cakupan peserta, kejelasan batasan siapa saja bagian dari masyarakat yang perlu dan wajib untuk berpartisipasi.

4. Legalitas, tersedianya regulasi atau aturan main yang memastikan keterlibatan warga dalam pengelolaan pembangunan.
5. Kejelasan jadwal pelaksanaan. Ada acuan yang jelas dan disusun penjadwalan yang perlu ditaati untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan harapan dan rencana yang telah ditetapkan.
6. Mekanisme pendanaan, terdapat mekanisme yang memungkinkan warga terlibat dan memastikan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat setelah berpartisipasi. Perhitungan biaya manfaat yang jelas dan sumber-sumber pendanaan yang rinci di setiap tahap kegiatan akan membuat program akan mendapat dukungan lebih baik dari warga.

Lebih lanjut Plumer dalam Yulianti (2012) menjelaskan bahwa hal yang dapat mempengaruhi masyarakat mau berperan serta atau berpartisipasi antara lain sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan keterampilan dasar yang dimiliki oleh masyarakat akan berpengaruh pada lingkungan tempat tinggalnya secara keseluruhan. Dengan keterbatasan kapasitas dan sudut pandang mereka, masyarakat dapat memahami proses dan program yang ada, serta turut serta dalam partisipasi.
2. Pekerjaan masyarakat. Orientasi pekerjaan dalam masyarakat memiliki dampak signifikan pada perspektif kelompok kerja yang menjadi dasar bagi keterlibatan masyarakat pada suatu program karena adanya perbedaan dan kepentingan yang beragam.
3. Tingkat Pendidikan. Hal ini memiliki kontribusi besar dan memengaruhi keinginan partisipasi masyarakat karena mempengaruhi perspektif mereka terhadap program/kegiatan yang akan diimplementasikan.
4. Jenis Kelamin. Merupakan aspek yang fundamental dalam alokasi waktu dan kemampuan fisik untuk berpartisipasi, karena keinginan atau kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dapat dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, yang kemudian dapat memengaruhi pandangan yang

berbeda terhadap suatu permasalahan karena sifat-sifat dasar yang dipengaruhi oleh jenis kelamin ini.

5. Keyakinan terhadap budaya khusus. Sosial masyarakat berdasarkan pada norma atau budaya yang melekat dan berakar dalam struktur masyarakat mereka, akan mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka dalam menilai suatu program yang mereka ikuti. Oleh karena itu, partisipasi lainnya merupakan hasil dari keputusan tindakan atau keterlibatan kelompok atau masyarakat pesisir dalam bentuk komunitas atau bentuk lainnya yang mengajak individu lain berperan serta dalam upaya untuk mencapai tujuan kelompok serta mengambil tanggung jawab untuk berperan serta.

Slamet dalam Wastiti et al. (2021) mengemukakan bahwa ada beberapa elemen yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan karakteristik faktor-faktor ini dapat bersifat positif, menunjukkan dorongan atau motivasi, atau bersifat negatif, menandakan adanya hambatan atau penghalang. Faktor pendukung atau pendorong tersebut antara lain yaitu:

1. Kesempatan, yaitu Kesadaran seseorang terhadap suasana atau kondisi lingkungan dapat mempengaruhi keputusannya untuk berpartisipasi. Salah satu cara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta adalah melalui peran pemerintah. Hal ini tercermin dalam kemauan politik para pemimpin untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai tahap pembangunan yang meliputi pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan proyek pembangunan.
2. Menurut Andriani (2017), sering terjadi bahwa partisipasi masyarakat tidak terlihat karena mereka merasa tidak diberi peluang atau kesempatan luas untuk ikut serta. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari setiap warga dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, serta menjelaskan jenis partisipasi yang diharapkan dari mereka (seperti kontribusi tenaga,

waktu, keuangan, pikiran, materi, dll.) pada berbagai tahapan kegiatan.

3. Kemauan. Menurut Slamet (Wastiti *et al*, 2021), kemauan merupakan faktor yang mendorong atau memunculkan minat dan sikap pada mereka, memberikan motivasi untuk berpartisipasi, seperti adanya manfaat yang dirasakan melalui keterlibatan mereka. Kemauan berfungsi sebagai dorongan utama untuk berpartisipasi. Masyarakat termotivasi untuk ikut serta dalam merawat dan menghasilkan pembangunan karena mereka merasakan manfaat yang diberikan oleh program tersebut.
4. Kemampuan. Menurut Slamet (Mardikanto, 2013), kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami peluang-peluang dalam kegiatan pembangunan atau pengetahuan tentang peluang untuk meningkatkan kualitas hidup akan mempengaruhi persepsi dan kemauan untuk berpartisipasi. Menurut Robbins (Malka, 2015), Kemampuan merujuk pada kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dan peran atau kegiatan dalam suatu pekerjaan baik secara personal maupun profesional. Kemampuan masyarakat memainkan peran kunci dalam kelancaran proses kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Ketidakmampuan yang signifikan dalam sumber daya manusia dapat mengakibatkan keterbatasan dalam memberikan partisipasi. Partisipasi yang efektif terutama berasal dari masyarakat yang memiliki sumber daya yang memadai, termasuk waktu, kontribusi pemikiran, tenaga, maupun materi.

5.6.2 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Hambatan muncul sebagai faktor negatif yang memengaruhi masyarakat dan menghambat keterlibatan mereka, memiliki sifat negatif dan berperan sebagai penghalang terhadap partisipasi masyarakat. Beberapa faktor penghambat partisipasi masyarakat dapat meliputi :

1. Faktor Karakteristik Individu. Ulya (2018) menyatakan bahwa sifat individu dapat menjadi penghambat kemauan

untuk berpartisipasi, contohnya sifat apatis, malas, kurangnya kepedulian, dan resistensi terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Ini terkait dengan perilaku egois dan pola pikir di kalangan masyarakat yang tidak peduli dengan keberhasilan pembangunan di lingkungan mereka. Adanya sikap individualis dan prioritas pada kepentingan pribadi, yang menghambat dukungan bersama dalam upaya partisipasi. Kurangnya partisipasi selama pelaksanaan sering disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kurangnya rasa memiliki terhadap program, sehingga cenderung bergantung pada pihak lain dan lebih fokus pada pekerjaan mereka sendiri daripada berkontribusi dalam pembangunan. Kesadaran masyarakat tentang peran penting partisipasi dalam program masih kurang, sehingga saat pelaksanaan, mereka cenderung hanya mengandalkan relawan sebagai perwakilan mereka. Mayoritas masyarakat masih pasif dalam partisipasi, hanya mengikuti pendapat perwakilan tanpa aktif berkontribusi. Hal ini disebabkan oleh motivasi yang kurang dari masyarakat untuk terlibat dalam menyukseskan suatu program, sehingga partisipasi menjadi pasif dan sekadar mengikuti arus.

2. Faktor Demografis. Achille Guillard dalam Athifah (2018) mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala aspek dari sikap manusia dan keadaan yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum dalam kependudukan, fisiknya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. Penyebaran penduduk secara spasial maupun geografi, dan perubahan komposisi penduduk yang terjadi dari waktu ke waktu. Menurut Angel, faktor demografi yang dapat mempengaruhi partisipasi diantaranya adalah jenis kelamin, usia dan pendidikan (Ulya, 2018). Faktor usia adalah faktor yang mempengaruhi keaktifan fisik seseorang untuk bisa berpartisipasi aktif terhadap keseluruhan kegiatan karena pada individu lanjut tua akan memiliki kemampuan fisik yang menurun dan mengalami kesulitan dalam mengadopsi sesuatu, meskipun begitu menurut

Slamet (Hakim, 2017) golongan usia tua mempunyai lebih banyak pengalaman sehingga akan lebih banyak memberikan pertimbangan pendapat yang akan membantu dalam hal menetapkan keputusan. Jenis kelamin juga dapat menjadi salah satu faktor dalam keterlibatan atau partisipasinya dalam pelaksanaan program. Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam kegiatan pembangunan menjadi tidak sama karena mengemban fungsi dan peran yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini karena adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan tugas tanggung jawab dalam keluarga yang tidak sama antara pria dan wanita, hal ini akan menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita (Hakim, 2017). Pada program yang kegiatannya berupa pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, ada tahapan yang lebih baik dilakukan oleh laki-laki seperti pada saat proses konstruksi, karena laki-laki lebih kuat dan berani dibandingkan perempuan, sedangkan perempuan dapat ikut berpartisipasi dengan menyiapkan konsumsi untuk para pekerja dan ikut serta dalam urun rembug dalam perencanaannya. Meskipun begitu adakalanya pada saat pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan sumbangsih secara tenaga apabila tidak disertai insentif ekonomi yang memadai, laki-laki dapat jarang ikut berpartisipasi karena sibuk bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Selanjutnya faktor lain yang dapat menghambat partisipasi adalah faktor pendidikan. Pendidikan menjadi hal yang penting karena melalui pendidikan akan meningkatkan pengetahuan dan membentuk pola pikir seseorang, sehingga akan mempunyai kemampuan berkomunikasi lebih baik dan berkoordinasi serta berinteraksi dengan orang lain dalam tim secara lebih efektif dan efisien, kemudian juga lebih tanggap merespon perkembangan pengetahuan dan teknologi untuk membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pada masyarakat yang tingkat pendidikan mayoritas rendah, biasanya hanya mengiyakan atau mengikuti saran yang diberikan tokoh

masyarakat saja. Kurangnya keahlian dan keterampilan tertentu dalam berdiskusi dan pengambilan keputusan disebabkan kurangnya memahami permasalahan dan tujuan dari suatu program secara komprehensif. Hal tersebut terlihat pada saat berdiskusi membuat perencanaan, masyarakat sulit memberi usulan dan saran, kemudian akan hanya mengikuti atau mengiyakan saja, padahal sudah diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mereka memiliki permasalahan tetapi belum tahu langkah dan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

3. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi dapat meliputi mata pencaharian dan penghasilan masyarakat. Pekerjaan dan penghasilan menjadi hal yang saling berkaitan karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperoleh. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan dapat mencukupi kebutuhan sekeluarga akan dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan pembangunan. Faktor ekonomi ini menjadi alasan bagi warga untuk tidak berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan pembangunan, warga lebih mengutamakan pekerjaan daripada berpartisipasi dalam suatu program pembangunan. Masyarakat lebih mementingkan mencukupi kebutuhan sehari-hari daripada ikut berpartisipasi terlibat dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat lebih menggunakan waktunya untuk bekerja demi mendapatkan penghasilan yang layak daripada berpartisipasi dengan hadir secara fisik. Pekerjaan akan mempengaruhi waktu luang seseorang untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan seperti dalam hal menghadiri pertemuan, berdiskusi, kerja bakti, membantu proses konstruksi, dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Budiharjo & Sujarto (Nurbaiti, 2017), waktu luang seseorang untuk mau terlibat aktif dalam suatu organisasi atau kegiatan sosial kemasyarakatan juga dipengaruhi jenis pekerjaannya, banyak warga yang telah disibukkan oleh pekerjaan utama sehingga kurang tertarik untuk mengikuti

pertemuan warga, diskusi atau seminar. Kondisi ekonomi yang kurang juga dapat menyebabkan masyarakat enggan memberi sumbangan dana karena masih membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak cukup jika menyumbang uang untuk kesuksesan kegiatan kemasyarakatan, sehingga menyebabkan masyarakat cenderung hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan meskipun itu untuk kebutuhan lingkungan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder Warga Negara Partisipasi. <http://lithgow-schmidt.dk/sherryarnstein/ladder-of-citizen-participation>.
- Andriani, N.M. Ayu. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(46): 1-1
- Dusseldorp, D.B.W.M. 1981. Participation in Planned Development Influence by Govern-ments of Developping Countries at Local Level in Rural Areas. Wageningen: Agricul-tural University.
- Dwiningrum, S.I.A. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo.
- Hikmat, H., 2004. Strategi Partisipasi Masyarakat. Bandung: Penerbit Humoniora.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: Fisip UI press
- KBBI. 2012. Definisi atau Arti Kata Partisipasi Berdasarkan KBBI Online. www.typoonline.com. Diakses pada 3 Oktober 2019. Pukul 16.25 WIB.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan.
- Malka, A. E. Indra, dkk. 2020. Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *Center Of Economic Student Journal*. 3(1) : 73-89
- Mardikanto, T. 1988. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Mardikanto, T. dan Soebiato, P. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan publik. Penerbit Alfa-beta, Bandung.

- Ndraha, T. 1990. Partisipasi Masyarakat. Pembangunan Masyarakat.
- Nurbaiti, S. Robiah, dan Aziz Nur Bambang. 2019. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). Proceeding Biology Education Conference. Vol. 14 (1): 224-228
- Purbathin Hadi, A., 2015. Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya.
- Purnamasari, Dewi. 2006. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rahardjo, D. 1982. Esei-Esei Ekonomi Politik. LP3ES, Jakarta.
- Slamet, M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press
- Slamet, M.(ed). 1985. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan. Interaksi Tahun I No. 1:3-7.
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Derah. Jakarta: SUN
- Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isi Pembangunan. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press
- UNAPDI. 1980. Local Level Planning and Rural Development. New Delhi: Concept Publishing Company.
- Uphoff, N.T., Cohen, J.M., dan Goldsmith, A.A. 1979. Rural Development Committee: Feasibility and Application of Rural Development Participation: A. State-of-the-Arth Paper. New York: Cornell University.
- Wastiti, A., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. 2021. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(4), 130-143.
- Yulianti, Yoni. 2012. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Padang: Universitas Andalas.

Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: Ciyapps Diponegoro University

BAB 6

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PENYULUH YANG PROFESSIONAL DAN KOMPETEN

Oleh Akmaluddin

6.1 Strategi Pengembangan Sumberdaya Penyuluh Perikanan

Dalam konteks penyuluhan perikanan, pentingnya pengembangan sumber daya manusia tidak dapat diremehkan. Strategi pengembangan ini meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama dengan stakeholder.

6.1.1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan formal bagi penyuluh perikanan harus mencakup kurikulum yang komprehensif dan adaptif. Kurikulum ini harus dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan aplikasi praktis, termasuk pemahaman mendalam tentang ekosistem laut, teknik perikanan berkelanjutan, dan manajemen sumber daya perikanan. Pendekatan ini harus diambil oleh institusi pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan untuk memastikan penyuluh dilengkapi dengan pengetahuan yang terkini dan relevan.

Untuk memahami kurikulum pendidikan penyuluh perikanan di Indonesia yang sesuai dengan kondisi terkini, kita perlu melihat dari beberapa perspektif, yaitu regulasi pemerintah terkait pendidikan tinggi di bidang perikanan dan petunjuk pelaksanaan untuk jabatan fungsional penyuluh perikanan.

A. Kurikulum Pendidikan

Fokus pada pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tren terkini dalam industri perikanan. Hal ini bisa mencakup pengetahuan tentang

teknologi perikanan terbaru, praktek berkelanjutan, serta pemahaman tentang ekosistem laut.

1. Regulasi Pendidikan Tinggi di Bidang Perikanan:

Kurikulum Program Studi Perikanan disusun berdasarkan standar pendidikan tinggi di Indonesia, mengikuti Permendikbud No.3, 2020, sebagai pedoman sarjana dan kompetensi sektor perikanan. Kurikulum ini diselaraskan dengan Standar Kompetensi Perikanan dan Bidang Kelautan Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya usaha untuk menyinkronkan pendidikan tinggi perikanan dengan kebutuhan dan tantangan sektor perikanan dan kelautan saat ini.

Peningkatan pendidikan penyuluh perikanan di Indonesia terkait kurikulum pendidikan dapat dijelaskan dengan merujuk pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan regulasi ini, pendekatan pendidikan tinggi di Indonesia mencakup berbagai aspek penting:

- a. Kesatuan dalam Tridharma Perguruan Tinggi: Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi. Ini penting untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis dan komitmen terhadap pengabdian masyarakat.
- b. Tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Tujuan utama dari standar ini adalah untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menerapkan nilai humaniora untuk pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia secara berkelanjutan. Hal ini

sangat relevan untuk kurikulum pendidikan penyuluh perikanan, yang harus mencakup pengetahuan teknis terkait perikanan serta pemahaman yang lebih luas tentang keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas.

- c. Kriteria dan Standar Pendidikan: Setiap Perguruan Tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan pembukaan Program Studi. Standar ini juga menjadi dasar penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal melalui akreditasi.
- d. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan: Standar ini mencakup standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, serta standar untuk dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan, dan pembiayaan pembelajaran. Ini memastikan bahwa kurikulum pendidikan, termasuk untuk penyuluh perikanan, mencakup seluruh aspek penting dari pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.

Pendekatan sistematis dan terstruktur ini dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, termasuk untuk penyuluh perikanan, menekankan pentingnya pendidikan yang komprehensif, yang tidak hanya memfokuskan pada aspek teknis perikanan tetapi juga pada pengembangan keahlian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan di sektor perikanan yang dinamis dan berkelanjutan.

2. Struktur Kurikulum Pendidikan Tinggi:

Pada tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa diwajibkan mengikuti mata kuliah sebanyak 138 SKS (208,38 ECTS), termasuk Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

(KKNM). KKNM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis di dunia kerja. Tahap akhir pendidikan melibatkan penyelesaian tugas akhir dengan beban 6 SKS (9,06 ECTS). Ini menunjukkan adanya fokus pada penggabungan teori dan praktik, serta penerapan ilmu yang diperoleh dalam konteks nyata, yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan.

Struktur kurikulum pendidikan tinggi di bidang perikanan di Indonesia mencerminkan upaya komprehensif untuk menyediakan pendidikan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri serta standar kompetensi yang diakui. Kurikulum ini disusun berdasarkan standar pendidikan tinggi di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Permendikbud No. 3, 2020. Hal ini juga diselaraskan dengan Standar Kompetensi Perikanan dan Bidang Kelautan Indonesia, yang diterbitkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2018.

Proses belajar dalam Program Studi Perikanan terbagi menjadi dua tahap utama: tahap pendidikan dan tahap penyelesaian tugas akhir. Dalam tahap pendidikan, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah dengan total beban 138 SKS (Sistem Kredit Semester), setara dengan 208,38 ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*). Ini mencakup Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (KKNM), yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menimba ilmu dan pengalaman langsung di dunia kerja, memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik. Tahap penyelesaian tugas akhir menuntut mahasiswa untuk mengambil 6 SKS tambahan, yang setara dengan 9,06 ECTS, memfokuskan pada aplikasi pengetahuan yang diperoleh selama masa studi.

Kurikulum ini dirancang untuk memastikan bahwa lulusan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri perikanan saat ini dan masa depan. Dengan mengintegrasikan teori dan praktik, kurikulum ini membekali mahasiswa dengan pemahaman

mendalam tentang aspek teknis, ekologis, dan sosial-ekonomi perikanan. Selain itu, pengalaman langsung melalui KKNM memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan interpersonal dan komunikasi, serta memahami tantangan nyata yang dihadapi oleh industri perikanan dan masyarakat yang terkait dengannya.

Pendekatan pendidikan ini tidak hanya menyiapkan mahasiswa untuk karir di bidang perikanan tetapi juga memberikan mereka alat yang diperlukan untuk berkontribusi pada pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini sejalan dengan kebutuhan global untuk memastikan bahwa perikanan dan ekosistem kelautan dikelola dengan cara yang mempromosikan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

3. Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan:

Terkait dengan penyuluhan perikanan secara langsung, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2023 dan Nomor 24 Tahun 2023 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh perikanan serta asisten penyuluh perikanan. Ini menunjukkan adanya kerangka kerja yang lebih terstruktur dalam pengembangan karier dan kompetensi penyuluh perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2023 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan di Indonesia. Peraturan ini dibuat untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab penyuluh perikanan serta memberikan arahan terkait pembinaan karier mereka. Berikut ini adalah poin-poin penting dari peraturan tersebut.

- a. Definisi dan Ruang Lingkup Jabatan: Penyuluh Perikanan didefinisikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam kegiatan penyuluhan perikanan.

- Penyuluhan Perikanan sendiri merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraan, dan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
- b. Standar Kompetensi: Standar Kompetensi Penyuluh Perikanan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. Uji Kompetensi diadakan untuk mengukur dan menilai kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Penyuluh Perikanan.
 - c. Jenjang Karier dan Pangkat: Terdapat beberapa jenjang dalam karier Penyuluh Perikanan, mulai dari ahli pertama hingga ahli utama, dengan pangkat dan golongan ruang yang berbeda. Setiap jenjang memiliki kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyuluh.
 - d. Proses Pengangkatan: Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi. Pengangkatan oleh Presiden dilakukan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama, sementara untuk jenjang yang lain ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
 - e. Syarat Pengangkatan: Calon penyuluh harus memenuhi syarat tertentu, termasuk berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki ijazah minimal sarjana atau diploma empat di bidang terkait dengan penyuluhan perikanan. Selain itu, ada persyaratan tambahan terkait usia maksimal untuk berbagai jenjang jabatan. Pendidikan dan Pelatihan: Penyuluh yang baru diangkat wajib mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Perikanan dalam waktu tertentu. Penyuluh yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tidak diberikan kenaikan jenjang karier.

Peraturan ini menunjukkan adanya upaya sistematis oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyuluhan perikanan melalui pembinaan karier yang terstruktur, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta penilaian kinerja yang objektif.

Dari tiga perspektif ini, terlihat bahwa pendekatan Indonesia dalam pengembangan sumber daya penyuluh perikanan mencakup aspek pendidikan formal, praktik lapangan, dan kerangka kerja regulatif yang mendukung pengembangan kompetensi yang diperlukan. Kurikulum dan pedoman yang ada dirancang untuk memastikan penyuluh perikanan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan untuk menghadapi tantangan di sektor perikanan yang terus berkembang.

B. Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan merupakan bagian penting dalam pengembangan penyuluh perikanan. Aspek ini meliputi pelatihan teknis perikanan, pengelolaan sumber daya alam, dan keterampilan komunikasi serta edukasi masyarakat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan praktis penyuluh dalam berinteraksi dengan komunitas perikanan dan menyampaikan pengetahuan yang bermanfaat. Peningkatan pelatihan keterampilan penyuluh perikanan di Indonesia mengandalkan beberapa strategi utama:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi:

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah memperkuat penyuluh perikanan dengan meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan (Simlatluh) KP. Simlatluh merupakan platform berbasis IT yang dirancang untuk mengendalikan kinerja penyuluh perikanan, memfasilitasi koordinasi dan

sinergi antara pusat, penyuluh perikanan, dan pemerintah daerah. Ini mendorong transformasi sistem penyuluhan perikanan untuk menjawab tantangan sektor perikanan yang dinamis.

2. **Integrasi Sistem dan Kebijakan:** Dengan Simlatluh, diharapkan dapat dihasilkan strategi dan model kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kinerja penyuluh perikanan. Platform ini dapat diakses oleh penyuluh perikanan di seluruh Indonesia, mendukung mereka dalam mengembangkan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terpadu dalam melaksanakan tugas mereka.
3. **Meningkatkan Pencapaian dan Jangkauan Penyuluhan:** Penyuluhan perikanan pada tahun 2022 mencapai 47.181 kelompok, melebihi target yang ditetapkan. Dengan platform Simlatluh, diharapkan jangkauan penyuluhan bisa lebih luas dan efektif. Penyuluhan tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga pemberdayaan pelaku utama dan usaha perikanan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, akses permodalan, pemasaran, dan sumber daya lainnya.
4. **Pengembangan Kompetensi Penyuluh:** Terdapat upaya untuk meningkatkan kompetensi penyuluh melalui pelatihan yang lebih sistematis dan berbasis kebutuhan aktual. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkaya penyuluh dengan pengetahuan terbaru dan keterampilan yang relevan, sehingga mereka dapat menjadi lebih efektif dalam mendampingi dan mendukung pelaku utama di sektor perikanan.
5. **Kolaborasi dan Penguatan Jaringan:** Terdapat penekanan pada perlunya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk memperkuat jaringan dan dukungan bagi penyuluh perikanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyuluh perikanan dapat beroperasi secara efektif di lapangan dan memberikan dukungan yang sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan spesifik di masing-masing daerah.



Gambar 6.1. Ratusan Penyuluh Perikanan Ikuti Pelatihan di Penas XVI Guna Sukseskan Program Ekonomi Biru
(Sumber : <https://www.beritatrans.com/>)

Dengan strategi ini, diharapkan pelatihan keterampilan bagi penyuluh perikanan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga menguatkan sistem penyuluhan perikanan secara keseluruhan, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap sektor perikanan dan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

6.1.2 Penggunaan Teknologi dalam Penyuluhan

A. Aplikasi Digital dan Media Sosial

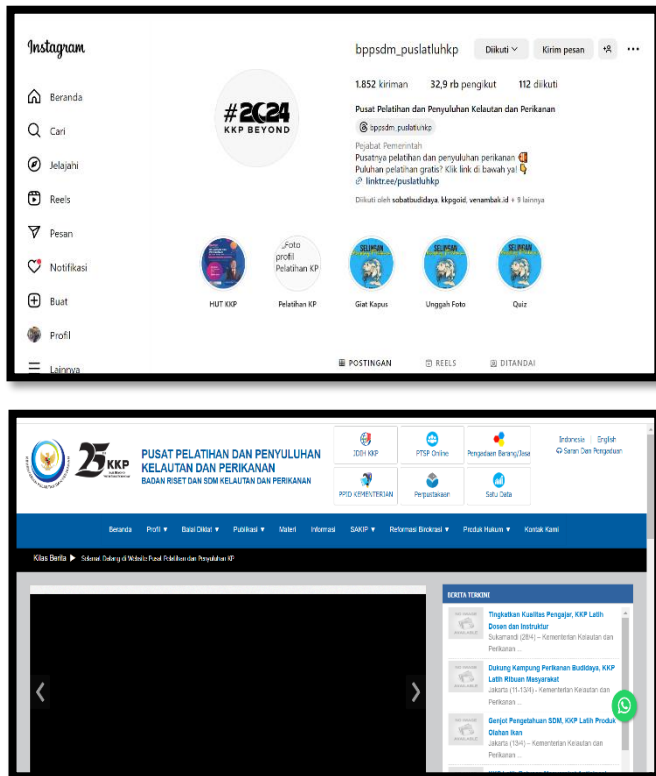
Dalam konteks penggunaan teknologi, khususnya aplikasi digital dan media sosial, dalam penyuluhan perikanan sebagai bagian dari strategi pengembangan sumber daya penyuluh perikanan, terdapat beberapa aspek penting yang bisa diperhatikan:

- 1. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):** Kemajuan TIK telah menyebabkan dinamika yang kompleks dalam bidang penyuluhan, terutama di era globalisasi. Penyuluh perikanan, seperti halnya di sektor

pertanian, menghadapi tantangan dalam mengadaptasi teknologi baru untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan mereka.

2. **Pemanfaatan Media Sosial:** Media sosial telah berkembang pesat dan menjadi sumber belajar serta media informasi yang penting bagi penyuluh perikanan. Penyuluh dapat memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan YouTube, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pendidikan formal atau pelatihan konvensional.
3. **Pengaruh Karakteristik Penyuluh dan Dukungan Lembaga:** Karakteristik penyuluh seperti umur, pendidikan, pengalaman, dan sikap kosmopolitan, bersama dengan dukungan dari lembaga seperti BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian), Pemda (Pemerintah Daerah), kelompok tani, dan perusahaan agribisnis berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan media sosial. Peningkatan pengalaman dan sikap kosmopolitan penyuluh dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemanfaatan media sosial dalam penyuluhan.
4. **Strategi Peningkatan Kompetensi Penyuluh:** Untuk meningkatkan kompetensi penyuluh perikanan, strategi yang efektif dapat dilakukan melalui peningkatan intensitas pemanfaatan media sosial, penguatan dukungan lembaga, dan penguatan karakteristik penyuluh. Hal ini mencakup peningkatan dukungan dari lembaga terkait, peningkatan pengalaman penyuluh, dan peningkatan intensitas penyelenggaraan pelatihan penyuluh serta pengorganisasian penyuluh.
5. **Keterlibatan Lembaga Terkait:** Dalam upaya peningkatan peran kelembagaan penyuluhan, perlu ada keterlibatan aktif dari lembaga terkait seperti BPTP, Pemda, kelompok tani, dan perusahaan agribisnis. Kerjasama ini penting untuk memberikan dukungan terhadap peran kelembagaan penyuluhan, sehingga

dapat berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi penyuluh perikanan.



Gambar 6.2. Salahsatu media sosial yang digunakan oleh BPPSDM PUSLATLUHKP pada aplikasi instagram dan website sebagai wadah memperkenalkan program ke penyuluh perikanan dan masyarakat. (sumber : https://www.instagram.com/bppsdm_puslatluhkp/ dan <https://kkp.go.id/brsdm/puslatluh>)

Melalui pendekatan ini, penggunaan aplikasi digital dan media sosial dalam penyuluhan perikanan tidak hanya meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan terkini, tetapi juga membantu dalam mengembangkan keterampilan komunikasi, berpikir kritis, dan kemampuan kolaboratif penyuluh. Pendekatan ini secara keseluruhan

mendukung strategi pengembangan sumber daya penyuluh perikanan, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan penyuluhan.

B. Pengembangan Aplikasi Khusus

Pengembangan aplikasi khusus dalam strategi penyuluhan perikanan di Indonesia menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat kinerja penyuluh. Ini tercermin dalam inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) yang meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan (Simlatluh) KP. Simlatluh merupakan sebuah platform terintegrasi yang mengendalikan kinerja penyuluh perikanan berbasis teknologi informasi (IT). Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk membantu dalam pengendalian kinerja penyuluh perikanan dan menghasilkan strategi serta model kebijakan yang efektif.

Aplikasi Simlatluh dapat diakses oleh penyuluh perikanan di seluruh Indonesia melalui laman web resmi, memfasilitasi koordinasi dan sinergi antara pusat, penyuluh perikanan, dan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk menguatkan peran strategis penyuluh dalam mendukung program-program prioritas Kementerian KP, serta program-program pemerintah daerah yang relevan. Dengan demikian, Simlatluh berperan penting dalam transformasi sistem penyuluhan perikanan di Indonesia.

Selain itu, melalui sinergi dengan Pusat Pendidikan KP, aplikasi ini juga memberikan kesempatan kepada penyuluh perikanan untuk meningkatkan jenjang pendidikannya, sehingga memperkuat aspek pendidikan dan pelatihan dalam konteks penyuluhan perikanan. Peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat lebih mempersiapkan penyuluh dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Pencapaian penyuluh perikanan pada tahun 2022 menunjukkan adanya kemajuan signifikan, dengan penyuluhan yang dilakukan kepada lebih banyak kelompok dibanding target yang ditetapkan. Ini menunjukkan efektivitas penyuluh

perikanan dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Penyuluh diharapkan dapat mencerahkan, memperkaya, dan memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan berbagai informasi penting, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), akses permodalan, serta akses pemasaran. Ini menggambarkan pentingnya peran penyuluh perikanan dalam memberikan dukungan komprehensif kepada pelaku di sektor ini.

Dengan demikian, pengembangan aplikasi khusus seperti Simlatluh diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan perikanan di Indonesia, baik dari segi pendidikan, pelatihan, maupun dukungan praktis di lapangan. Aplikasi ini juga mendorong penggunaan teknologi informasi dalam strategi pengembangan sumber daya penyuluh perikanan, memastikan bahwa penyuluh memiliki alat dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif.

6.1.3 Kerjasama Stakeholder

A. Pemerintah

Pemerintah memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan penyuluh perikanan. Ini termasuk alokasi anggaran, pengembangan kebijakan yang mendukung penyuluhan, dan penyediaan infrastruktur. Kerjasama ini juga dapat memfasilitasi transfer pengetahuan dan sumber daya dari lembaga internasional.

Dalam konteks strategi pengembangan sumber daya penyuluh perikanan, kerjasama dengan pemerintah memegang peranan krusial. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP), telah menetapkan arah dan tujuan strategis untuk meningkatkan efektivitas penyuluh perikanan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kerjasama ini:

Peran Penyuluh sebagai Role Model dimana Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono, mengimbau penyuluh perikanan untuk menjadi role model dalam pelaksanaan program prioritas berbasis ekonomi biru. Penyuluh diharapkan menunjukkan ketahanan dalam mengubah sikap, perilaku, dan keterampilan

pelaku utama kelautan dan perikanan, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Dalam hal edukasi dan Konservasi Penyuluh perikanan harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan kawasan konservasi. Edukasi ini tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup kesadaran untuk tidak membuang sampah di laut dan menjadikan laut sebagai halaman depan rumah bangsa.

Dalam perannya sebagai Entrepreneurship Penyuluh perikanan juga diharapkan dapat menjadi contoh sebagai entrepreneur, seperti dalam budi daya ikan nila. Kementerian KP memiliki Lembaga Pengelola Moda Usaha KP (LPMUKP) yang menyediakan akses permodalan dan edukasi pengelolaan keuangan bagi para pelaku usaha.

Dukungan terhadap Ekonomi Biru, Penyuluh perikanan berperan aktif sebagai enumerator dalam berbagai kegiatan seperti Penangkapan Ikan Terukur, Kampung Nelayan Maju, dan Kampung Perikanan Budi Daya. Ini menunjukkan keterlibatan mereka dalam mendukung program-program yang bertujuan menguatkan ekonomi biru di Indonesia.

Penyuluh sebagai Garda Terdepan diharapkan para penyuluh perikanan dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi ekonomi biru Indonesia. Peran ini mencakup kegiatan pendampingan dan pemberdayaan kelompok perikanan, serta mempromosikan praktik berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya perikanan.



Gambar 6.3. Bupati Tangerang Resmikan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Kabupaten Tangerang
(sumber : <https://www.lensafokus.id/>)

Kerjasama antara pemerintah dan penyuluh perikanan ini mencerminkan komitmen bersama untuk mengembangkan sektor perikanan di Indonesia, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dalam aspek konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan holistik ini, diharapkan dapat dicapai tujuan pengembangan sumber daya penyuluh perikanan yang berkelanjutan dan efektif.

B. Swasta

Sektor swasta dapat berkontribusi melalui pendanaan program, penyediaan teknologi, dan pembangunan kapasitas. Keterlibatan ini membuka peluang untuk inovasi dan penerapan praktik terbaik dalam penyuluhan.

Kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah dalam pengembangan sumber daya penyuluh perikanan di Indonesia memainkan peran kritis, mengingat tantangan dan peluang yang ada dalam sektor ini. Pada pertemuan ASEAN Public-Private Partnership (PPP) Taskforce for Sustainable Fisheries and Aquaculture, Indonesia ditunjuk sebagai Interim Secretariat

ASEAN PPP untuk Perikanan Berkelanjutan. Inisiatif ini berfokus pada dialog kebijakan dan kerjasama antara sektor publik dan swasta di ASEAN, termasuk Indonesia, untuk memajukan ketahanan pangan dan daya saing perikanan berkelanjutan.

Kerjasama ini tidak hanya mencakup aspek kegiatan perikanan, tetapi juga aspek pembiayaan. Sektor swasta berperan penting dalam mengatasi keterbatasan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Kerangka pendanaan infrastruktur 2020 – 2024 mencapai Rp. 6.445 T, dengan kontribusi 37% dari pemerintah, 21% dari BUMN, dan 42% dari swasta. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) mengatur penyediaan infrastruktur publik dengan melibatkan peran pihak swasta. Melalui skema KPBU, pemerintah dan swasta berbagi tanggung jawab dan risiko atas pembangunan infrastruktur publik, mempercepat ketersediaan infrastruktur publik yang efektif dan efisien.

Kemitraan ini juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan dalam pengembangan PPP di Indonesia, dengan membangun model-model kemitraan antara pelaku usaha mikro kecil (nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar) dengan pelaku pasar global. Kemitraan usaha secara horisontal (usaha dari hulu hingga hilir) dan vertikal (usaha skala kecil hingga besar) diperlukan, dengan peran pemerintah sebagai jembatan dalam kegiatan ini. Berbagai skema kerja sama telah dikembangkan untuk mendukung peningkatan suplai bahan baku perikanan, termasuk pembentukan kawasan budidaya dan pengembangan infrastruktur di pelabuhan perikanan untuk mendukung logistik rantai dingin dan transportasi produk frozen, terutama dari Indonesia Timur.

Dalam konteks strategi pengembangan sumber daya penyuluh perikanan, kerjasama ini memungkinkan penyuluh untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan terkini tentang praktik terbaik dalam perikanan berkelanjutan, manajemen rantai pasokan, dan pembangunan infrastruktur perikanan. Penyuluh dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan mereka, berkontribusi

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, dan memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

C. Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan penyuluh adalah krusial. Ini memastikan program penyuluhan relevan dan efektif, dengan menerima masukan langsung dari nelayan dan komunitas lokal.

Dalam konteks strategi pengembangan sumber daya penyuluh perikanan, keterlibatan masyarakat memiliki peran krusial, khususnya dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Ini melibatkan penerapan kearifan lokal, pemahaman lingkungan, dan interaksi sosial yang kuat di kalangan masyarakat. Kearifan lokal ini memberikan wawasan berharga tentang lingkungan sekitar dan membantu dalam membuat keputusan yang berkelanjutan terkait perikanan.

Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat memerlukan penguatan melalui informasi dari berbagai sumber, termasuk LSM dan pemerintah. Hal ini bisa mencakup formalisasi aturan adat ke dalam peraturan desa, perlindungan ekosistem kunci seperti mangrove dan terumbu karang, serta penerapan biaya akses yang dapat diinvestasikan kembali untuk kepentingan masyarakat.

Dalam program ini, masyarakat pesisir dilibatkan dalam menentukan lokasi penangkapan ikan dengan sistem buka-tutup, yang diperkuat melalui pelatihan monitoring, kunjungan belajar antar nelayan, dan riset partisipatif. Ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan perikanan.



Gambar 6.4. Penyuluh Perikanan Dampingi Penyaluran Bantuan Benih Ikan ke kelompok masyarakat pelaku usaha perikanan.
(sumber : <https://www.ipkani-lampung.or.id/>)

Selain itu, di beberapa daerah seperti Bali dan Lombok, masyarakat mengikuti hukum adat seperti awig-awig, yang berfungsi sebagai panduan bagi nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan yang ramah lingkungan. Awig-awig ini melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan dan menangkap biota yang dilindungi. Ini menunjukkan bagaimana praktik adat dapat berkontribusi pada pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Dari berbagai aspek ini, terlihat bahwa kerjasama dengan masyarakat dalam pengembangan sumber daya penyuluh perikanan adalah kunci. Mereka tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kaya untuk berkontribusi dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pendekatan ini menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan kearifan lokal, mendorong keterlibatan masyarakat dalam kebijakan dan praktik perikanan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan untuk generasi mendatang.

6.2 Model Pengelolaan Karir Penyuluh Perikanan

Di era yang serba cepat dan kompetitif ini, penyuluh perikanan memegang peranan penting dalam menghubungkan kemajuan teknologi dan metode perikanan dengan para pelaku di

lapangan. Mereka adalah jembatan antara ilmu pengetahuan, inovasi, dan implementasi praktis di dunia nyata. Oleh karena itu, mengembangkan model pengelolaan karir yang efektif untuk penyuluh perikanan tidak hanya penting untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan sektor perikanan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghasilan para penyuluh itu sendiri. Model pengelolaan karir yang diusulkan di sini meliputi tiga komponen utama: Pemetaan Karir, Insentif dan Penghargaan, serta Jaringan Profesional.

6.2.1 Pemetaan Karir

Pemetaan karir merupakan langkah awal yang krusial dalam pengelolaan karir penyuluh perikanan. Ini adalah proses dimana penyuluh dapat mengeksplorasi berbagai jalur karir yang tersedia dan mengidentifikasi peluang untuk pertumbuhan serta pengembangan profesional. Dengan pemetaan karir yang efektif, penyuluh dapat menetapkan tujuan jangka panjang dan merencanakan langkah strategis untuk mencapainya.

Pemetaan karir penyuluh perikanan di Indonesia, sebagai bagian dari "Model Pengelolaan Karir Penyuluh Perikanan", memainkan peran krusial dalam strategi pengembangan sumber daya penyuluh yang profesional dan kompeten. Pemetaan karir melibatkan pengidentifikasian berbagai jalur karir potensial dan pembuatan rencana untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan. Dalam konteks Indonesia, upaya ini didukung oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), yang bertugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM di sektor kelautan dan perikanan.

BPPSDMKP memiliki fungsi penting dalam menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan, termasuk pemetaan karir untuk penyuluh perikanan. Dalam hal pemetaan karir, penyuluh perikanan di Indonesia dapat diuntungkan dengan adanya kebijakan dan program yang dirancang untuk mengidentifikasi jalur karir yang relevan, menyediakan pelatihan

dan sertifikasi, serta menawarkan dukungan untuk perkembangan karir jangka panjang.

Namun, untuk peningkatan lebih lanjut, mungkin diperlukan upaya tambahan untuk menyediakan akses ke pelatihan yang lebih spesifik dan terkini, serta pembangunan jaringan profesional yang lebih luas, yang tidak hanya meliputi rekan seprofesi dalam negeri tetapi juga peluang internasional. Pemetaan karir yang efektif juga harus mempertimbangkan tren industri saat ini dan masa depan, perubahan kebijakan, dan kemajuan teknologi, untuk memastikan penyuluh perikanan tidak hanya kompeten di lingkungan saat ini tetapi juga siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.

Dengan memperkuat pemetaan karir melalui program-program ini, penyuluh perikanan Indonesia akan lebih mampu menavigasi lanskap pekerjaan yang berubah-ubah, menetapkan tujuan karir yang realistis, dan mengembangkan rencana aksi yang konkret untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan efektivitas penyuluhan perikanan di Indonesia, dengan menyediakan tenaga kerja yang tidak hanya ahli dalam bidangnya tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan dan inovasi di sektor kelautan dan perikanan.

6.2.2 Insentif dan Penghargaan

Insentif dan penghargaan adalah faktor kunci yang memotivasi penyuluh perikanan untuk terus berkembang dan berprestasi. Skema insentif bisa mencakup kompensasi finansial, peluang untuk pendidikan lanjutan, dan peluang kerja yang lebih baik. Sementara penghargaan dapat berupa pengakuan profesional, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang mendorong penyuluh untuk terus meningkatkan kualitas kerja mereka.

Model Pengelolaan Karir Penyuluh Perikanan: Insentif dan Penghargaan. Dalam konteks pengembangan sumber daya penyuluh perikanan yang profesional dan kompeten di Indonesia, insentif dan penghargaan memegang peranan krusial. Insentif dan penghargaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada penyuluh perikanan atas dedikasi dan kerja keras mereka, tetapi juga sebagai alat motivasi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi.

Penghargaan dari Pemerintah: Sebagai contoh, pada tahun 2015, sebanyak 29 penyuluh perikanan PNS teladan dari 29 provinsi dianugerahi penghargaan oleh Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan ini diadakan dalam rangka peringatan HUT RI ke-70 dan bertujuan untuk mengakui dedikasi penyuluh dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat kelautan dan perikanan di pelosok nusantara.

Apresiasi atas Dedikasi dan Upaya Penyuluhan: Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas upaya penyuluhan yang dilakukan penyuluh di berbagai wilayah. Hal ini mencerminkan pengakuan atas pentingnya pekerjaan mereka dalam mengembangkan sektor perikanan di Indonesia.

Pengaruh terhadap Poin Angka Kredit: Menariknya, prestasi yang diraih oleh penyuluh perikanan juga berkontribusi pada poin angka kredit mereka sebagai pejabat fungsional. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19 Tahun 2008 tentang Jabatan Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya. Aspek ini penting karena menunjukkan bahwa prestasi dan pengakuan profesional berkontribusi langsung pada kemajuan karir penyuluh perikanan

Motivasi untuk Peningkatan Kinerja dan Inovasi: Selain sebagai bentuk penghargaan, pemberian insentif juga bertujuan untuk memacu semangat para penyuluh perikanan agar bekerja dengan lebih baik. Diharapkan, ini akan memotivasi penyuluh lainnya untuk berprestasi dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Lebih lanjut, penyuluh perikanan diharapkan menjadi agen transfer teknologi, khususnya dalam inovasi sektor kelautan dan perikanan.

Pemberian insentif dan penghargaan ini merupakan bagian penting dari strategi pengembangan sumber daya penyuluh perikanan di Indonesia. Ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka, tetapi juga memastikan bahwa penyuluh perikanan tetap termotivasi dan berkomitmen dalam pekerjaan mereka. Melalui penghargaan ini, pemerintah berupaya untuk mengakui dan menghargai kontribusi penting penyuluh perikanan dalam

pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

6.2.3 Jaringan Profesional

Membangun dan memelihara jaringan profesional merupakan aspek penting dalam pengelolaan karir penyuluh perikanan. Jaringan ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk belajar dari rekan seprofesi, tetapi juga membuka peluang untuk kolaborasi, inovasi, dan pertukaran informasi terkini dalam bidang perikanan. Keterlibatan aktif dalam komunitas profesional dapat membantu penyuluh tetap terhubung dengan tren terbaru dan mendorong pertumbuhan karir mereka.

Melalui model pengelolaan karir ini, diharapkan penyuluh perikanan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam industri perikanan, sekaligus meningkatkan kontribusi mereka dalam mendukung sektor ini. Model ini dirancang untuk membuka peluang yang lebih luas bagi penyuluh perikanan, baik dalam peningkatan pengetahuan maupun dalam pengembangan karir profesional.

Dalam konteks pengembangan sumber daya penyuluh perikanan yang profesional dan kompeten di Indonesia, pembentukan dan pemeliharaan jaringan profesional berperan vital. Jaringan ini tidak hanya memperluas wawasan dan kompetensi penyuluh tetapi juga meningkatkan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas. Berikut ini adalah pembahasan terstruktur mengenai pentingnya jaringan profesional dalam pengembangan karir penyuluh perikanan:

1. Pentingnya Jaringan Profesional

Dalam membangun jaringan profesional seorang penyuluh perikanan merupakan hal yang sangat penting dilakukan akan memberi dampak berupa :

- a. **Pertukaran Pengetahuan dan Pengalaman:** Jaringan profesional menyediakan platform bagi penyuluh untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, memungkinkan mereka untuk belajar dari praktik terbaik yang telah diterapkan di berbagai daerah atau negara.

- b. Pembaruan Informasi Terkini: Dengan terlibat dalam jaringan profesional, penyuluh dapat mengakses informasi terbaru tentang teknologi, metode, dan kebijakan di bidang perikanan. Hal ini membantu mereka untuk tetap relevan dan efektif dalam pekerjaan mereka.
- c. Kolaborasi dan Inovasi: Jaringan profesional memfasilitasi kolaborasi antara penyuluh, peneliti, dan praktisi industri, yang dapat memicu inovasi dalam teknik dan metode penyuluhan.

2. Pembangunan Jaringan Profesional

Dalam membangun jaringan profesional ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh seorang penyuluh perikanan yaitu :

- a. Konferensi dan Seminar: Menghadiri konferensi dan seminar perikanan adalah cara efektif untuk membangun jaringan. Penyuluh bisa bertemu dengan kolega dan pakar, bertukar ide, dan mendapatkan wawasan baru.
- b. Asosiasi Profesional: Bergabung dengan asosiasi profesional perikanan memberikan akses ke sumber daya, pelatihan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek kolaboratif.
- c. Program Pertukaran Penyuluh: Program pertukaran antardaerah atau internasional dapat memperluas jangkauan jaringan dan memberikan pengalaman langsung tentang praktik penyuluhan di berbagai konteks.

3. Pemanfaatan Teknologi dalam Jaringan Profesional

Diantara bentuk pemanfaatan teknologi seorang penyuluh perikanan dalam membangun sebuah jaringan profesional yaitu:

- a. Platform Digital dan Media Sosial: Pemanfaatan platform digital dan media sosial untuk membangun jaringan profesional memungkinkan penyuluh untuk terhubung dengan kolega dari berbagai belahan dunia secara real-time.

- b. Webinar dan Pelatihan Online: Mengikuti webinar dan pelatihan online membantu penyuluh untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tanpa terbatas oleh lokasi geografis.

4. Dampak Jaringan Profesional terhadap Pengembangan Karir

Adapun dalam jaringan profesional dalam mengembangkan karir seorang penyuluh perikanan yaitu :

- a. Peningkatan Kompetensi: Jaringan profesional membantu penyuluh untuk terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pembelajaran berkelanjutan.
- b. Peluang Karir: Melalui jaringan, penyuluh dapat menemukan peluang kerja baru, kolaborasi penelitian, atau proyek bersama yang dapat meningkatkan prospek karir mereka.

Dalam konteks di Indonesia, pembangunan jaringan profesional tidak hanya merupakan aspek penting dalam pengembangan karir penyuluh perikanan, tetapi juga kunci dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas penyuluhan perikanan di negara ini. Jaringan yang kuat dan aktif memungkinkan aliran informasi, ide, dan praktik terbaik, sehingga menciptakan ekosistem penyuluhan perikanan yang lebih dinamis, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat nelayan dan industri perikanan secara keseluruhan.

Strategi pengembangan sumber daya penyuluh perikanan di Indonesia membutuhkan pendekatan komprehensif yang meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, penggunaan teknologi, dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, penyuluh perikanan akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan praktik perikanan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sektor perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

6.3 Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyuluh perikanan di Indonesia, beberapa rekomendasi strategis dapat diusulkan. Berikut ini adalah pembahasan terperinci mengenai kebijakan pengembangan sumber daya, langkah-langkah implementasi, serta rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang.

6.3.1 Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Perikanan

A. Penyusunan Standar Kompetensi

Menyusun standar kompetensi yang jelas dan terukur untuk penyuluh perikanan yang mencakup pengetahuan teknis, keterampilan komunikasi, dan pemahaman tentang isu lingkungan dan sosial. Dalam kerangka pengembangan sumber daya penyuluh perikanan di Indonesia, langkah awal yang penting adalah penyusunan standar kompetensi. Standar ini merupakan fondasi yang akan menjamin kualitas dan keefektifan penyuluhan yang diberikan. Standar kompetensi harus jelas, terukur, dan menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan teknis, keterampilan komunikasi, serta pemahaman mendalam tentang isu lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan perikanan.

Penyusunan standar kompetensi ini memerlukan pendekatan yang terstruktur. Awalnya, harus ada pemahaman komprehensif tentang ekosistem perairan, yang mencakup baik aspek ekologi laut maupun tawar. Pengetahuan ini penting karena penyuluh perikanan perlu memahami dinamika populasi ikan dan interaksi mereka dengan habitat. Selain itu, pengetahuan teknis yang mendalam tentang metode perikanan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya ikan, pembudidayaan, dan pengolahan hasil perikanan, juga harus menjadi bagian integral dari standar ini. Pentingnya kesadaran terhadap peraturan perikanan baik yang berlaku secara lokal maupun internasional juga tidak bisa diabaikan.

Keterampilan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menjangkau dan mempengaruhi komunitas nelayan dan pemangku kepentingan lainnya. Penyuluh harus dapat

menyampaikan informasi yang sering kali kompleks dan teknis dengan cara yang mudah dipahami oleh berbagai audiens. Mereka juga harus dilatih dalam keterampilan pedagogis, yaitu bagaimana merancang dan menyampaikan materi pelatihan yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan menginspirasi. Kemampuan untuk menangani konflik, melakukan negosiasi, dan mediasi juga sangat penting, mengingat sifat kerja mereka yang sering melibatkan berbagai kepentingan.

Aspek penting lainnya adalah pemahaman yang mendalam tentang isu lingkungan dan sosial. Ini termasuk kesadaran tentang dampak ekologi dari kegiatan perikanan, seperti pencemaran, perubahan iklim, dan kerusakan habitat. Selain itu, pemahaman tentang dinamika sosial dan ekonomi dalam komunitas nelayan sangat penting, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Penyuluh juga perlu memahami bagaimana strategi adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dapat diterapkan dalam konteks perikanan.

Proses penyusunan standar kompetensi ini harus melibatkan konsultasi dengan berbagai pakar dan stakeholder di bidang perikanan, termasuk penyuluh yang berpengalaman, praktisi industri, akademisi, dan perwakilan dari komunitas nelayan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa standar yang dikembangkan tidak hanya didasarkan pada teori, tetapi juga mencerminkan kebutuhan praktis dan realitas di lapangan. Peninjauan literatur dan studi kasus dari berbagai sumber akan memberikan pandangan lebih luas tentang praktik terbaik yang telah diadopsi di berbagai tempat, serta tantangan yang umum dihadapi dalam penyuluhan perikanan.

Setelah draft standar kompetensi disusun, harus ada proses review dan revisi yang menyeluruh untuk memastikan standar tersebut relevan dan aplikatif. Pelatihan harus disiapkan untuk menyampaikan standar ini kepada penyuluh perikanan di seluruh Indonesia. Pelatihan ini tidak hanya harus mencakup aspek teoretis dari standar, tetapi juga harus menyediakan kesempatan bagi penyuluh untuk mengembangkan

keterampilan praktis melalui simulasi, studi kasus, dan latihan lapangan.

Penting untuk memastikan bahwa standar ini tidak statis. Mereka harus secara berkala dievaluasi dan diperbarui untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam teknologi perikanan, metode penyuluhan, dan tantangan lingkungan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui umpan balik dari penyuluh, penerima layanan penyuluhan, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses evaluasi dan pembaruan ini akan memastikan bahwa penyuluh perikanan terus beroperasi pada tingkat keahlian yang paling tinggi.

Dengan penyusunan standar kompetensi yang jelas dan terukur, penyuluh perikanan di Indonesia akan lebih dilengkapi untuk menghadapi tantangan yang kompleks dari sektor perikanan. Pengetahuan teknis yang kuat, dikombinasikan dengan keterampilan komunikasi yang efektif dan pemahaman mendalam tentang isu lingkungan dan sosial, akan membuat penyuluh lebih efektif dalam perannya. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas penyuluhan yang diberikan tetapi juga akan berkontribusi secara signifikan terhadap keberlanjutan dan produktivitas sektor perikanan di Indonesia.

B. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan penyuluh, termasuk pemanfaatan teknologi terkini dan metode penyuluhan yang inovatif.

Dalam konteks pengembangan sumber daya penyuluh perikanan di Indonesia, rekomendasi utama adalah pengembangan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan penyuluh, yang merupakan kunci dalam menangani tantangan yang terus berkembang di sektor perikanan. Pentingnya program ini terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan pemanfaatan teknologi terkini dan metode penyuluhan yang inovatif, sehingga

menyediakan penyuluh dengan alat dan wawasan yang diperlukan untuk efektivitas maksimal dalam perannya.

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan ini harus dirancang untuk mencakup berbagai aspek yang relevan dengan perikanan modern. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, teknologi perikanan terbaru, teknik pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan metode baru dalam budidaya ikan. Program ini juga harus mencakup pelatihan tentang regulasi perikanan terkini, baik yang berlaku secara lokal maupun global, serta prinsip-prinsip konservasi dan pengelolaan ekosistem laut.

Selain aspek teknis, program ini juga perlu fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi dan pendidikan. Mengingat peran penting penyuluh dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada nelayan dan masyarakat perikanan, mereka harus dilengkapi dengan keterampilan untuk menyampaikan informasi yang kompleks secara jelas dan efektif. Ini termasuk penggunaan alat visual, cerita, dan media digital untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan audiens. Penyuluh juga perlu dilatih dalam teknik pendidikan orang dewasa, karena sebagian besar audiens mereka adalah nelayan yang sudah berpengalaman.

Penerapan teknologi terkini dalam program pendidikan dan pelatihan juga sangat penting. Hal ini bisa mencakup penggunaan platform e-learning untuk pelatihan teoritis, yang memungkinkan penyuluh untuk belajar pada waktu dan kecepatan mereka sendiri. Penggunaan aplikasi seluler dan alat digital lainnya dapat membantu penyuluh untuk tetap terhubung dengan sumber daya pendidikan, terlepas dari lokasi mereka. Teknologi juga memungkinkan simulasi skenario perikanan yang berbeda, memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam.

Selain itu, pengembangan program ini harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik penyuluh dan masyarakat perikanan di berbagai wilayah di Indonesia. Pendekatan yang disesuaikan berdasarkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi lokal akan lebih efektif dalam mengatasi

masalah spesifik yang dihadapi oleh masing-masing komunitas. Penglibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan juga penting untuk memastikan bahwa isi pelatihan relevan dan berdampak langsung pada mereka.

Program pendidikan dan pelatihan ini juga harus menawarkan peluang untuk pengembangan profesional berkelanjutan, termasuk jalur karir yang jelas dan peluang untuk spesialisasi dalam berbagai bidang perikanan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan motivasi penyuluh untuk terus belajar dan berkembang tetapi juga akan meningkatkan standar keseluruhan dari penyuluhan yang mereka berikan. Sertifikasi yang diberikan setelah menyelesaikan modul pelatihan tertentu dapat diakui sebagai kredensial profesional, sehingga memberikan insentif bagi penyuluh untuk terus berpartisipasi dalam program pelatihan.

Pendekatan holistik terhadap pelatihan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesejahteraan dan kebugaran mental penyuluh. Mengingat bahwa pekerjaan mereka sering kali menuntut dan menimbulkan tekanan, program pelatihan juga harus menyertakan komponen tentang manajemen stres dan kesejahteraan mental. Hal ini akan membantu memastikan bahwa penyuluh tetap termotivasi dan efektif dalam pekerjaan mereka.

Selain itu, evaluasi dan pembaruan berkelanjutan dari materi pelatihan sangat penting. Dengan dunia perikanan yang cepat berubah, materi pelatihan harus secara rutin diperiksa dan diperbarui untuk memastikan relevansi dan keakuratan. Umpan balik dari penyuluh yang telah mengikuti pelatihan harus digunakan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan, memastikan bahwa program tersebut terus memenuhi kebutuhan mereka dan masyarakat perikanan.

Keterlibatan penyuluh dalam proses desain dan evaluasi program pelatihan juga penting. Dengan melibatkan mereka secara langsung, program tersebut dapat dikembangkan dengan cara yang lebih fokus pada pengguna dan berorientasi pada hasil. Keterlibatan ini juga akan memberikan penyuluh rasa

kepemilikan atas proses belajar mereka, yang merupakan faktor penting dalam motivasi dan keterlibatan.

Akhirnya, untuk memastikan keberhasilan program pendidikan dan pelatihan, dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga terkait lainnya diperlukan. Ini termasuk penyediaan sumber daya keuangan, akses ke pakar dan teknologi, serta pengakuan dan dukungan terhadap program pelatihan. Kemitraan dengan lembaga akademis, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional juga dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan program pelatihan.

Dengan menerapkan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang komprehensif dan berfokus pada kebutuhan penyuluh perikanan, Indonesia dapat memastikan bahwa mereka dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan alat yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan yang vital bagi ekonomi dan kehidupan masyarakatnya.

C. Pengintegrasian Teknologi dalam Penyuluhan

Memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi seluler dan media sosial, untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas penyuluhan. Dalam konteks kebijakan pengembangan sumber daya penyuluh perikanan, pengintegrasian teknologi digital merupakan langkah penting yang tak terelakkan. Era digital saat ini menawarkan berbagai kemungkinan untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas penyuluhan. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk aplikasi seluler dan media sosial, dapat membawa transformasi yang signifikan dalam cara penyuluh perikanan berinteraksi dengan komunitas nelayan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Penggunaan aplikasi seluler dalam penyuluhan perikanan dapat menjadi alat yang sangat efektif. Aplikasi ini dapat dirancang untuk menyediakan informasi terkini tentang teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, perubahan cuaca, dan tips pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu, aplikasi ini dapat memungkinkan penyuluh untuk berkomunikasi secara langsung dengan nelayan, memberikan saran dan jawaban atas

pertanyaan mereka secara real-time. Aplikasi tersebut juga dapat menjadi platform untuk pelatihan virtual, memungkinkan penyuluh untuk menjangkau komunitas yang lebih luas tanpa terbatas oleh jarak geografis.

Media sosial, di sisi lain, menawarkan platform yang sangat dinamis dan interaktif untuk penyuluhan perikanan. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi penting, berita terbaru, dan inisiatif pembelajaran. Dengan cara ini, media sosial bisa menjadi alat yang ampuh untuk membangun kesadaran dan mempromosikan praktek perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, platform ini memungkinkan penyuluh untuk terlibat dalam dialog dua arah dengan masyarakat, memberikan mereka kesempatan untuk mendengar langsung dari nelayan tentang tantangan yang mereka hadapi dan memberikan solusi yang tepat.

Integrasi teknologi dalam penyuluhan juga harus mempertimbangkan keberagaman digital yang ada di Indonesia. Penting untuk mengembangkan solusi yang dapat diakses oleh berbagai komunitas, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal akses internet dan infrastruktur digital. Dalam hal ini, pendekatan hybrid yang menggabungkan metode penyuluhan tradisional dengan teknologi digital bisa menjadi strategi yang efektif. Penyuluh dapat menggunakan teknologi untuk menyiapkan dan mendistribusikan materi penyuluhan, tetapi juga melakukan kunjungan lapangan dan pertemuan tatap muka untuk memperkuat hubungan dan memastikan pesan disampaikan dengan efektif.

Pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi penyuluh dalam menggunakan teknologi juga sangat penting. Penyuluh perlu diberikan pelatihan tentang cara menggunakan aplikasi seluler, media sosial, dan alat digital lainnya secara efektif. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis penggunaan alat, serta strategi untuk membuat konten yang menarik dan komunikatif. Dengan memastikan bahwa penyuluh memiliki keterampilan digital yang diperlukan, mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka dan memanfaatkan potensi penuh dari teknologi digital.

Selain itu, penting untuk mengeksplorasi penggunaan alat analitik untuk memahami dampak dan jangkauan upaya penyuluhan. Melalui analisis data dari aplikasi dan media sosial, penyuluh dapat menilai efektivitas strategi penyuluhan mereka, memahami minat dan kebutuhan nelayan, dan menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan wawasan yang diperoleh. Ini akan memungkinkan penyuluh untuk terus meningkatkan kualitas penyuluhan yang mereka berikan.

Kerjasama dengan perusahaan teknologi dan startup juga dapat membantu dalam mengembangkan solusi inovatif yang dirancang khusus untuk kebutuhan penyuluhan perikanan. Misalnya, aplikasi yang memberikan akses ke peta perikanan, informasi cuaca laut, atau platform untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik antar nelayan. Kolaborasi seperti ini dapat menghasilkan alat yang tidak hanya efektif tetapi juga disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik dari komunitas perikanan di Indonesia.

Implementasi teknologi digital dalam penyuluhan perikanan juga harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi data. Dengan semakin banyaknya informasi yang disimpan dan diproses secara digital, penting untuk memastikan bahwa data pribadi dan informasi sensitif lainnya dilindungi dengan benar. Penyuluh harus diberi pelatihan mengenai praktik terbaik dalam manajemen data dan keamanan siber, untuk melindungi informasi yang mereka tangani.

Terakhir, penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan nelayan dan komunitas perikanan tentang manfaat teknologi dalam perikanan. Program edukasi dapat membantu mereka memahami cara menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi, meningkatkan praktik perikanan, dan berpartisipasi dalam dialog yang lebih luas tentang perikanan berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya meningkatkan efektivitas penyuluhan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif komunitas perikanan dalam upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Melalui pengintegrasian teknologi digital, penyuluhan perikanan di Indonesia dapat mencapai tingkat baru dalam efektivitas dan efisiensi. Dengan alat yang tepat, pelatihan yang sesuai, dan kerjasama yang strategis, penyuluh dapat memainkan peran penting dalam memandu komunitas perikanan menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

D. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Riset

Membangun kemitraan dengan universitas dan lembaga riset untuk memperkaya materi penyuluhan dan mengintegrasikan inovasi terbaru dalam praktik penyuluhan. Dalam upaya memajukan kebijakan pengembangan sumber daya penyuluh perikanan, rekomendasi yang signifikan adalah kolaborasi erat dengan lembaga pendidikan dan riset. Kemitraan strategis dengan universitas dan lembaga riset merupakan langkah penting untuk memperkaya materi penyuluhan dan mengintegrasikan inovasi terbaru ke dalam praktik penyuluhan. Kerjasama ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada komunitas perikanan tetapi juga memastikan bahwa penyuluh perikanan terus mengikuti perkembangan terkini dan metodologi terbaik.

Universitas dan lembaga riset, dengan keahlian dan sumber daya mereka, dapat menyediakan wawasan akademis dan penelitian terbaru yang sangat berharga dalam konteks perikanan. Kolaborasi ini bisa berupa pengembangan kurikulum penyuluhan yang mencakup topik-topik terkini, seperti teknologi perikanan terbaru, praktek berkelanjutan, pemahaman ekosistem laut, dan strategi adaptasi perubahan iklim. Dengan mengakses riset terbaru, penyuluh perikanan bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan terkini, yang akan meningkatkan efektivitas mereka dalam memberikan saran dan solusi kepada nelayan dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan riset dapat membuka peluang untuk penelitian bersama yang memfokuskan pada isu-isu penting dalam perikanan, seperti pengelolaan sumber daya perikanan, dampak perubahan iklim pada perikanan, dan pengembangan teknik perikanan yang berkelanjutan.

Penelitian ini tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru tetapi juga memberikan kesempatan bagi penyuluh perikanan untuk terlibat langsung dalam riset, memperluas pengalaman dan keahlian mereka.

Kerjasama ini juga bisa meliputi program pelatihan dan pengembangan profesional untuk penyuluh perikanan. Lembaga pendidikan dan riset dapat menyediakan program pelatihan yang khusus dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penyuluh. Program ini bisa mencakup pelatihan teknis, workshop, seminar, dan bahkan program gelar atau sertifikasi yang lebih formal. Melalui program ini, penyuluh perikanan dapat terus mengembangkan keahlian mereka dan tetap berada di garis depan pengetahuan dan praktek perikanan terbaik.

Kolaborasi ini juga dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi terkini yang dikembangkan di lembaga riset dan universitas. Misalnya, penggunaan alat-alat baru untuk pemantauan sumber daya perikanan, aplikasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, atau pengembangan alat bantu digital untuk penyuluhan. Pemanfaatan inovasi-inovasi ini akan memperkaya materi penyuluhan dan meningkatkan kemampuan penyuluh untuk memberikan saran yang lebih tepat dan berbasis bukti kepada nelayan.

Selain itu, kemitraan ini dapat membuka akses bagi penyuluh ke jaringan akademis dan profesional yang lebih luas. Ini berarti bahwa penyuluh perikanan tidak hanya beroperasi dalam lingkup tugas mereka saja, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas ilmiah yang lebih besar, yang dapat memberikan dukungan, saran, dan wawasan yang berharga. Melalui jaringan ini, penyuluh dapat terus belajar dari pengalaman dan penelitian rekan-rekan mereka, dan menerapkan wawasan tersebut dalam praktik penyuluhan mereka.

Pengembangan kolaborasi semacam ini memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Perlu ada mekanisme untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama yang efektif antara penyuluh perikanan, universitas, dan lembaga riset. Ini bisa melalui pembentukan tim kerja bersama, penugasan proyek bersama, atau melalui platform digital yang memungkinkan berbagi pengetahuan dan sumber daya secara efisien.

Akhirnya, penting untuk memastikan bahwa hasil dari kolaborasi ini diintegrasikan ke dalam praktik penyuluhan sehari-hari. Ini berarti bahwa tidak hanya materi penyuluhan yang diperbarui dan diperkaya, tetapi juga metode penyampaian, teknik pengajaran, dan strategi komunikasi yang digunakan oleh penyuluh perikanan harus terus diperbaharui dan disesuaikan dengan pengetahuan dan teknologi terbaru. Dengan cara ini, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan riset tidak hanya akan memperkaya materi penyuluhan tetapi juga secara keseluruhan akan meningkatkan kualitas dan dampak penyuluhan perikanan di Indonesia.

6.3.2 Langkah-langkah Implementasi

A. Pelatihan dan Sertifikasi

Mengimplementasikan program pelatihan wajib bagi penyuluh dan menyediakan sertifikasi kompetensi yang dapat diperbaharui secara periodik. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyuluhan perikanan di Indonesia, langkah implementasi yang esensial adalah pelaksanaan program pelatihan wajib bagi penyuluh, disertai dengan penyediaan sertifikasi kompetensi yang dapat diperbaharui secara periodik. Pelatihan dan sertifikasi ini merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa penyuluh memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk efektif dalam pekerjaan mereka. Dengan program ini, penyuluh perikanan akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang dinamis dan beragam dalam industri perikanan yang terus berkembang.

Pelatihan yang disediakan harus mencakup berbagai aspek penting dalam penyuluhan perikanan, termasuk pengetahuan teknis terbaru tentang perikanan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, teknologi perikanan, dan praktik terbaik dalam industri. Selain itu, pelatihan juga harus memfokuskan pada pengembangan keterampilan komunikasi dan pedagogi, yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada nelayan dan komunitas perikanan. Pelatihan ini bisa dilaksanakan dalam berbagai format, termasuk

workshop, seminar, pelatihan online, dan sesi pelatihan interaktif yang memanfaatkan teknologi terkini.

Selain materi teknis, pelatihan juga harus menyertakan komponen tentang isu-isu lingkungan dan sosial yang terkait dengan perikanan. Ini termasuk pemahaman tentang dampak kegiatan perikanan terhadap ekosistem laut, strategi untuk mengatasi perubahan iklim dan konservasi sumber daya alam, serta pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan perikanan lokal dan internasional. Pengembangan keterampilan dalam bidang ini akan membantu penyuluh dalam memberikan nasihat yang komprehensif dan bertanggung jawab kepada komunitas nelayan.

Sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada penyuluh setelah menyelesaikan pelatihan ini harus diakui secara resmi dan menjadi indikator kemampuan dan keahlian mereka. Sertifikasi ini harus diperbaharui secara periodik, mengharuskan penyuluh untuk terus mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan terkini di bidang perikanan. Proses pembaharuan sertifikasi ini akan memastikan bahwa penyuluh terus meningkatkan keahlian mereka dan tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam industri perikanan.

Pembaharuan sertifikasi ini juga harus dihubungkan dengan sistem penilaian yang jelas dan objektif, yang mencakup evaluasi kinerja penyuluh, umpan balik dari komunitas nelayan, dan penilaian terhadap penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam praktik nyata. Sistem ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dan menjamin bahwa semua penyuluh memenuhi standar yang ditetapkan.

Penerapan program pelatihan dan sertifikasi ini memerlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai lembaga, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan industri perikanan. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa program pelatihan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan dan mendapat dukungan sumber daya yang memadai. Selain itu,

keterlibatan industri perikanan dalam proses ini akan membantu dalam menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan industri dan memastikan bahwa penyuluh mendapatkan wawasan praktis tentang aplikasi pengetahuan mereka.

Akhirnya, penting untuk memastikan bahwa program pelatihan dan sertifikasi ini mudah diakses oleh semua penyuluh perikanan di Indonesia. Ini termasuk penyediaan pelatihan di berbagai lokasi, penggunaan platform digital untuk memudahkan akses, dan pemastian bahwa biaya pelatihan tidak menjadi penghalang bagi penyuluh untuk berpartisipasi. Dengan demikian, program ini harus dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman geografis dan ekonomi di Indonesia, memastikan bahwa setiap penyuluh, terlepas dari lokasi atau latar belakangnya, memiliki akses yang sama terhadap peluang pengembangan profesional ini.

Pelatihan dan sertifikasi yang berkualitas tinggi dan dapat diakses ini akan membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas penyuluhan perikanan di Indonesia. Penyuluh yang terlatih dan bersertifikasi akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di mata komunitas nelayan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara penyuluh dan nelayan. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pengetahuan dan praktik terbaik dalam perikanan berkelanjutan dapat disampaikan secara efektif dan diterapkan di lapangan.

Selain itu, program ini juga akan memperkuat jaringan profesional di antara penyuluh perikanan, menciptakan komunitas pembelajaran di mana mereka dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi. Ini akan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan profesional berkelanjutan, serta mempromosikan inovasi dan pertukaran ide dalam komunitas penyuluhan.

Secara keseluruhan, implementasi pelatihan dan sertifikasi bagi penyuluh perikanan adalah langkah krusial dalam membangun kekuatan kerja yang kompeten dan responsif terhadap kebutuhan sektor perikanan di Indonesia. Dengan penyuluh yang terus-menerus diperbarui dalam

pengetahuan dan keterampilan mereka, dan dengan validasi kompetensi mereka melalui sertifikasi, industri perikanan di Indonesia akan lebih berkelanjutan, efisien, dan siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Program pelatihan dan sertifikasi ini tidak hanya menguntungkan penyuluh dan nelayan, tetapi juga kontribusi penting bagi keseluruhan keberlanjutan dan keberhasilan sektor perikanan Indonesia.

B. Pemantauan dan Evaluasi

Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur efektivitas penyuluhan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pengembangan sumber daya penyuluh perikanan, penting untuk memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Sistem ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penyuluhan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Melalui pemantauan dan evaluasi yang sistematis, dapat dipastikan bahwa program penyuluhan tidak hanya sesuai dengan tujuan awal, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan kondisi.

Pertama-tama, penting untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur sebagai bagian dari sistem pemantauan. Indikator ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan, perubahan praktik perikanan, dan dampak kegiatan penyuluhan pada keberlanjutan perikanan. Indikator ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Dengan adanya indikator yang jelas, penyuluh dapat lebih mudah menilai keberhasilan dan area yang perlu ditingkatkan.

Proses pemantauan harus dilakukan secara berkala dan mencakup berbagai metode, seperti survei, wawancara, dan observasi lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penyuluh untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas program dan menerima umpan balik langsung dari nelayan dan pemangku kepentingan lainnya. Survei dan wawancara dapat memberikan informasi mendalam tentang

persepsi dan tanggapan nelayan terhadap program penyuluhan, sementara observasi lapangan dapat memberikan bukti nyata dari perubahan praktik perikanan.

Selanjutnya, evaluasi program harus melibatkan analisis data yang dikumpulkan selama proses pemantauan. Analisis ini harus memeriksa sejauh mana tujuan program telah tercapai dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan. Hal ini juga termasuk evaluasi efektivitas materi penyuluhan, metode pengajaran, dan teknologi yang digunakan. Penemuan dari evaluasi ini dapat digunakan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan pada program penyuluhan, memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif.

Proses evaluasi harus bersifat iteratif, dengan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan program penyuluhan. Setiap aspek program, mulai dari kurikulum hingga metode pengiriman, harus terus-menerus ditinjau dan disesuaikan berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi. Ini memastikan bahwa program penyuluhan beradaptasi dengan perubahan kondisi dan terus memenuhi kebutuhan nelayan dan komunitas perikanan.

Sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif juga memerlukan keterlibatan aktif dari penyuluh itu sendiri. Mereka harus dilatih untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta untuk memahami pentingnya proses evaluasi dalam pengembangan profesional mereka. Keterlibatan aktif penyuluh dalam proses evaluasi tidak hanya membantu mereka memahami dampak pekerjaan mereka tetapi juga mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas perbaikan berkelanjutan dalam praktik penyuluhan mereka.

Penting juga untuk membagikan hasil evaluasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, donor, lembaga pendidikan, dan komunitas nelayan. Transparansi dalam proses evaluasi dan hasilnya memastikan akuntabilitas dan membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Hal ini juga memungkinkan pemangku kepentingan

untuk memberikan masukan dan saran yang dapat membantu meningkatkan program penyuluhan lebih lanjut.

Dalam konteks yang lebih luas, sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif berperan penting dalam membentuk kebijakan perikanan nasional. Dengan memahami keberhasilan dan tantangan dalam penyuluhan perikanan, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang alokasi sumber daya, pengembangan program, dan inisiatif keberlanjutan. Ini membantu memastikan bahwa strategi perikanan negara secara keseluruhan selaras dengan praktik terbaik dan memberikan hasil yang optimal untuk komunitas nelayan.

Selain itu, pengumpulan data jangka panjang melalui sistem pemantauan dan evaluasi dapat membantu mengidentifikasi tren dan pola dalam industri perikanan. Informasi ini sangat berharga dalam memprediksi tantangan masa depan dan merencanakan strategi untuk mengatasinya. Sebagai contoh, data tentang dampak perubahan iklim terhadap praktik perikanan dapat digunakan untuk merumuskan strategi adaptasi dan mitigasi.

Akhirnya, penting untuk memastikan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi tidak menjadi beban bagi penyuluh atau mengalihkan fokus dari pekerjaan utama mereka. Seimbangkan antara kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dengan keefisienan proses, sehingga penyuluh dapat tetap fokus pada tugas utama mereka, yaitu memberikan penyuluhan yang berkualitas kepada komunitas nelayan.

Melalui implementasi sistem pemantauan dan evaluasi yang komprehensif, dapat dipastikan bahwa program penyuluhan perikanan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang nyata. Ini akan membantu memastikan bahwa sektor perikanan Indonesia berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi ekonomi, lingkungan, dan komunitas nelayan.

C. Pendanaan dan Sumber Daya

Mengalokasikan dana yang memadai untuk pengembangan dan pelaksanaan program penyuluhan, termasuk pelatihan, pembelian peralatan, dan kegiatan lapangan. Salah satu aspek penting dalam rekomendasi langkah-langkah implementasi untuk pengembangan sumber daya penyuluh perikanan adalah pendanaan dan sumber daya. Mengalokasikan dana yang memadai untuk pengembangan dan pelaksanaan program penyuluhan esensial untuk menjamin efektivitas dan kesinambungan program. Investasi ini tidak hanya berfokus pada pelatihan penyuluh tetapi juga meliputi pembelian peralatan yang diperlukan dan biaya operasional kegiatan lapangan. Pendanaan dan sumber daya yang adekuat akan memungkinkan penyuluh untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada komunitas perikanan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada keberlanjutan dan produktivitas sektor perikanan.

Pertama-tama, alokasi dana untuk pelatihan penyuluh adalah investasi yang penting. Pelatihan ini harus mencakup berbagai modul yang berkaitan dengan aspek teknis dan praktis dari perikanan, keterampilan komunikasi, penggunaan teknologi terbaru dalam penyuluhan, dan pemahaman mendalam tentang isu-isu lingkungan dan sosial. Pelatihan semacam ini memerlukan dana tidak hanya untuk penyelenggaraan sesi pelatihan tetapi juga untuk materi pelatihan, pembicara atau pelatih yang berkualitas, serta perangkat lunak dan alat bantu pelatihan lainnya.

Selanjutnya, pembelian peralatan juga merupakan bagian penting dari pendanaan. Perangkat dan teknologi modern sangat penting untuk mendukung kegiatan penyuluhan, termasuk alat komunikasi, perangkat lunak analisis data, dan alat bantu digital untuk penyuluhan lapangan. Perangkat ini memungkinkan penyuluh untuk bekerja lebih efisien dan memberikan informasi yang lebih akurat dan terkini kepada nelayan.

Kegiatan lapangan juga memerlukan alokasi dana yang signifikan. Kegiatan ini sering kali melibatkan perjalanan ke berbagai lokasi perikanan, interaksi langsung dengan komunitas

nelayan, dan penerapan praktik perikanan yang diajarkan dalam pelatihan. Biaya operasional untuk kegiatan lapangan ini termasuk transportasi, akomodasi, logistik, serta biaya lain yang berkaitan dengan pengorganisasian kegiatan lapangan.

Pendanaan ini idealnya harus bersumber dari kombinasi berbagai entitas, termasuk pemerintah, lembaga donor internasional, sektor swasta, dan mungkin juga kontribusi dari komunitas perikanan itu sendiri. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menyediakan dana untuk inisiatif ini, mengingat pentingnya sektor perikanan bagi ekonomi nasional dan keberlanjutan lingkungan. Dana dari pemerintah dapat dialokasikan melalui anggaran tahunan atau melalui program khusus yang didesain untuk mendukung pengembangan perikanan berkelanjutan.

Lembaga donor internasional dan NGO dapat menyumbang dalam bentuk hibah atau proyek yang berfokus pada pengembangan kapasitas penyuluhan dan keberlanjutan perikanan. Kerjasama dengan entitas ini juga dapat membuka akses ke jaringan global, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam penyuluhan perikanan.

Di sisi lain, sektor swasta, termasuk industri perikanan dan perusahaan teknologi, dapat berkontribusi melalui kemitraan korporat atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keterlibatan mereka tidak hanya berupa pendanaan tetapi juga dalam bentuk dukungan teknis dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas penyuluhan.

Penting juga untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ini. Sistem pelaporan yang jelas dan audit reguler akan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan untuk tujuan yang tepat. Hal ini juga membantu dalam membangun kepercayaan dari para donor dan masyarakat umum tentang penggunaan dana tersebut.

Dengan pendanaan dan sumber daya yang cukup, program penyuluhan perikanan dapat dijalankan dengan efektif dan berkelanjutan. Hal ini akan memberikan dampak positif tidak hanya pada peningkatan kemampuan penyuluh tetapi juga pada peningkatan keberlanjutan praktik perikanan, yang pada

akhirnya akan menguntungkan komunitas nelayan dan ekosistem perikanan Indonesia secara keseluruhan.

D. Pengakuan dan Insentif

Memberikan pengakuan dan insentif kepada penyuluh yang menunjukkan kinerja dan dedikasi yang tinggi dalam tugasnya. Salah satu aspek penting dalam rekomendasi langkah-langkah implementasi untuk pengembangan sumber daya penyuluh perikanan adalah memberikan pengakuan dan insentif kepada mereka yang menunjukkan kinerja dan dedikasi yang tinggi dalam tugasnya. Pengakuan dan insentif ini sangat penting karena tidak hanya memberikan motivasi kepada penyuluh untuk berkinerja tinggi, tetapi juga meningkatkan moral dan kepuasan kerja, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada efektivitas program penyuluhan secara keseluruhan.

Pengakuan bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari pujian dan penghargaan formal hingga promosi dan peningkatan tanggung jawab. Misalnya, penyuluh yang berhasil mengimplementasikan program inovatif atau membuat perubahan signifikan dalam praktik perikanan di komunitas mereka dapat diakui melalui penghargaan tahunan, artikel di media, atau bahkan melalui acara khusus. Pengakuan semacam ini tidak hanya memberikan apresiasi kepada penyuluh atas kerja keras mereka, tetapi juga mendorong penyuluh lain untuk berusaha mencapai standar yang sama tingginya.

Insentif, di sisi lain, dapat mencakup manfaat finansial seperti bonus atau kenaikan gaji, peluang untuk pendidikan lanjutan atau pelatihan profesional, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam konferensi atau workshop. Insentif ini bisa dikaitkan dengan pencapaian tertentu, seperti peningkatan jumlah nelayan yang menerapkan praktik berkelanjutan atau keberhasilan dalam proyek penelitian. Menyediakan insentif semacam ini tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga membantu dalam pengembangan profesional berkelanjutan penyuluh, memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru dalam bidangnya.

Penting untuk menciptakan sistem evaluasi kinerja yang adil dan transparan sebagai dasar untuk pemberian pengakuan dan insentif. Sistem ini harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif, termasuk penilaian kualitas kerja, tingkat keberhasilan dalam implementasi program, dan dampak kegiatan penyuluhan pada komunitas perikanan. Dengan sistem evaluasi yang jelas, penyuluh dapat mengerti apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang mereka butuhkan untuk mencapai untuk mendapatkan pengakuan dan insentif.

Selain itu, program pengakuan dan insentif harus fleksibel dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berubah. Misalnya, dalam situasi tertentu, insentif mungkin lebih difokuskan pada peluang pengembangan karir, sementara dalam situasi lain, insentif finansial mungkin lebih efektif. Fleksibilitas ini memungkinkan program untuk tetap relevan dan menarik bagi penyuluh dalam berbagai kondisi dan situasi.

Pengakuan dan insentif juga harus dipandang sebagai bagian dari budaya organisasi yang lebih luas. Mendorong lingkungan kerja yang menghargai inovasi, dedikasi, dan pencapaian tidak hanya akan meningkatkan motivasi penyuluh tetapi juga akan menciptakan standar kinerja yang tinggi di seluruh organisasi. Ini akan membantu dalam menciptakan kultur kerja yang positif, di mana penyuluh merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkontribusi terhadap tujuan program penyuluhan.

Terakhir, sangat penting untuk secara teratur meninjau dan menyesuaikan program pengakuan dan insentif ini. Kebutuhan dan harapan penyuluh dapat berubah seiring waktu, dan program harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Dengan tetap *up-to-date* dan responsif terhadap kebutuhan penyuluh, program pengakuan dan insentif akan terus efektif dalam mendorong kinerja yang tinggi dan dedikasi dalam kerja mereka.

Dengan demikian, penerapan strategi pengakuan dan insentif yang efektif dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam meningkatkan kinerja dan dedikasi penyuluh perikanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja

penyuluh tetapi juga memastikan bahwa program penyuluhan dijalankan dengan efektivitas yang tinggi. Melalui pengakuan terhadap prestasi dan pencapaian, serta insentif yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan profesional, bisa diperoleh hasil yang sangat positif dalam upaya meningkatkan praktik perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan ini juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan kerja yang mendukung dan produktif, di mana penyuluh merasa dihargai atas kontribusi mereka dan terinspirasi untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, D. S., & Visser, L. E. (Eds.). (2019). *Anthropology of Small-Scale Fisheries in Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/>
- Bappeda. (2021). *Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelautan untuk Peningkatan Ekonomi Daerah*. Diakses dari <https://www.bappeda.go.id/>
- Baran, E., & Myschowoda, C. (2009). Dams and fisheries in the Mekong Basin. *Aquatic Ecosystem Health & Management*, 12(3), 227-234.
- Béné, C., Arthur, R., Norbury, H., Allison, E. H., Beveridge, M., Bush, S., ... & Williams, M. (2016). Contribution of Fisheries and Aquaculture to Food Security and Poverty Reduction: Assessing the Current Evidence. *World Development*, 79, 177-196.
- Berkes, F., & Folke, C. (Eds.). (1998). *Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience*. Cambridge University Press.
- Cunningham, S., Neiland, A. E., Arbuckle, M., & Bostock, T. (2009). Wealth-based Fisheries Management: Using Fisheries Wealth to Orchestrate Sound Fisheries Policy in Practice. *Marine Policy*, 33(2), 317-323.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2020). *Laporan Tahunan 2020: Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan*. Diakses dari <https://djpt.kkp.go.id/>
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. (n.d.). *Program Studi Perikanan*. Diakses dari <http://fpik.unpad.ac.id/program-studi-perikanan/>
- FAO. (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Diakses dari <http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture>
- Fauzi, A. (2015). *Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. FAO. Diakses dari <http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture>
- Hall, S. J., Delaporte, A., Phillips, M. J., Beveridge, M., & O'Keefe, M. (2011). Blue Frontiers: Managing the Environmental Costs of Aquaculture. The WorldFish Center. Diakses dari <https://www.worldfishcenter.org/content/blue-frontiers-managing-environmental-costs-aquaculture>
- Irawan, B., & Satria, A. (2016). Pengembangan Kompetensi Penyuluh Perikanan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 107-118.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019). Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Diakses dari <https://kkp.go.id/>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan. Diakses dari <https://jdih.kkp.go.id/>
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2018). Kajian Strategis Sumber Daya Perikanan Indonesia. Diakses dari <https://www.lipi.go.id/>
- Nugroho, D., Yulianda, F., & Bengen, D. G. (2017). *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Bogor: IPB Press.
- Pomeroy, R. S., & Andrew, N. L. (Eds.). (2011). *Small-scale Fisheries Management: Frameworks and Approaches for the Developing World*. CABI.
- Smith, L. E. D., & Nguyen Khoa, S. (2018). Environmental flows and fisheries sustainability in the lower Mekong Basin. *Journal of Environmental Management*, 223, 572-580.
- Sulistiyawati, E., & Susilowati, I. (2018). Peran Penyuluh Perikanan dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 23(3), 214-222.
- The World Bank. (2012). *Hidden Harvest: The Global Contribution of Capture Fisheries*. Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/topic/fisheries>

Williams, S. J. (2018). Professional Development for Fisheries Extension Agents. Extension Foundation. Diakses dari <https://extension.org/fisheries>

BAB 7

PENGANTAR PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM PENYULUHAN

Oleh Reski Fitriah

7.1 Pendahuluan

Kesuksesan penyuluhan tidak hanya diukur dari seberapa besar produktivitas suatu usaha tetapi bagaimana pelaku utama atau usaha bisa memahami dan melaksanakan inovasi yang disampaikan penyuluh. Penyuluhan merupakan agen perubahan harus selalu siap dengan perubahan. Undang-undang No. 16 Tahun 2006, memberi petunjuk bagaimana sasaran dari kegiatan penyuluhan dijalankan lebih nyata melalui Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2022, dimana kegiatan penyuluhan diarahkan pada penguatan teknologi informasi (Saleh, 2022).

Pengaplikasian dari hal tersebut, tahapan utama yang perlu dilakukan ialah seberapa besar potensi yang dimiliki suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan serta seperti apa dukungan kelembagaan dapat bekerja sama sebagai sasaran penyuluhan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan usaha (Saleh, 2022).

Evaluasi dan program penyuluhan merupakan salah satu alat yang dapat mengetahui bagaimana penyuluhan tersebut dapat memberikan manfaat, melalui perencanaan dan evaluasi program penyuluhan (Saleh, 2022).

Perencanaan Program Penyuluhan ialah dampak dari berbagai tindakan yang mesti dipahami dan dilakukan secara masuk akal dalam penyuluhan (Sugiharto, 2021).

7.2 Perencanaan Program Penyuluhan

7.2.1 Pengertian Perencanaan Program Penyuluhan

Perencanaan ialah perilaku dinamis yang dilakukan guna merefleksikan, memikirkan, serta memilih diantara macam pilihan tentang tujuan dan sasaran serta perjalanan pendidikan yang wajib diikuti dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan program penyuluhan dianggap sebagai mekanisme, yang lewatnya perwakilan masyarakat ikut campur secara intensif dengan penyuluh dan orang profesional dalam aktivitas mempelajari fakta dan kebutuhan, mencari tahu masalah serta peluang menurut fakta serta kebutuhan, menghasilkan ketetapan mengenai masalah dan peluang yang perlu diutamakan, serta pembuatan tujuan atau anjuran untuk pembangunan sosial serta ekonomi masyarakat di masa yang akan datang (Saleh, 2022).

Program penyuluhan kelautan dan perikanan ialah rencana kegiatan penyuluhan setiap tahun yang tertulis dan disusun secara sistematis dengan memperhatikan anggaran. Program penyuluhan diperuntukkan guna memberikan arah pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan pelaksanaan penyuluhan (Razi, 2010).

Menurut Sugiharto (2021), Program penyuluhan ialah pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan, serta teknik mencapai tujuan yang tersusun sistematis setiap tahun.

Program penyuluhan terdiri dari program penyuluhan unit kerja lapang atau desa, program penyuluhan kecamatan, kabupaten atau kota, program penyuluhan provinsi, serta nasional. Dalam penyusunan program penyuluhan perlu mencermati harmonisasi dan kesinergian program penyuluhan pada setiap tingkatan (Razi, 2010).

Dalam penyusunan program penyuluhan harus terukur, logis, manfaat, dan dapat dilakukan secara partisipatif, bersama-sama, terbuka, demokratis, serta bertanggung jawab (Razi, 2010).

7.2.2 Tujuan dan Manfaat Program Penyuluhan

Tujuan dari penyusunan program penyuluhan perikanan serta kelautan ialah guna memberikan arah, pedoman, serta alat pengatur pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Tujuan pedoman program penyuluhan perikanan serta kelautan,

selanjutnya adalah agar terfasilitasinya penyelenggaraan penyuluhan pada tiap tingkatan secara partisipatif (Razi, 2010).

Manfaat dari penyusunan program penyuluhan adalah agar penyuluh, pelaku utama dan usaha, lembaga terkait yang mengurus penyuluhan memahami situasi, tujuan serta masalah yang dihadapi serta teknik penyelesaiannya; tersedianya pedoman dalam membuat rencana kerja penyuluhan perikanan serta kelautan; penyuluhan terselenggara secara partisipatif, efektif, dan tepat sasaran (Razi, 2010).

7.2.3 Dasar Pemikiran Perencanaan Program Penyuluhan

Ada berbagai alasan pentingnya program direncanakan. Olehnya itu, perencanaan program penyuluhan yang baik berdasar pada (Kelsey dan Hearne, 1994) dalam (Saleh, 2022):

1. Analisis fakta dalam situasi.
2. Berdasar pada kebutuhan dan memilih masalah.
3. Menetapkan tujuan serta jalan keluar yang memberikan kepuasan.
4. Menggambarkan kinerja dengan fleksibilitas.
5. Menggabungkan keseimbangan dengan penekanan.
6. Membayangkan rencana kerja yang pasti.
7. Apakah proses dapat berlangsung terus menerus.
8. Tahapan kegiatannya bagaimana.
9. Proses koordinasi yang dijalankan bagaimana.
10. Mengikutsertakan masyarakat lokal dan kelembagaannya.
11. Penilaian hasil.

Dari hal di atas maka programa penyuluhan adalah bagian integral dari langkah pembangunan serta memastikan bagaimana sumber daya dipergunakan, keberlanjutan, serta akuntabilitas dalam menciptakan sumberdaya manusia yang lebih unggul.

7.2.4 Prinsip Perencanaan Program Penyuluhan

Sandhu (1965) dalam Saleh (2022), mengidentifikasi prinsip program penyuluhan, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai Program

- a. Perencanaan program penyuluhan berdasarkan pada analisis fakta-fakta dalam suatu situasi.
Penting untuk memperhatikan aspek lingkungan serta sumberdaya antara lain keadaan tanah, tanaman, pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, status ekonomi, budaya, serta tradisi. Aspek di atas ialah komponen dari prinsip yang mendasari kegiatan penyuluhan. Penyuluhan mesti memahami, menentukan cara yang lebih nyata bagaimana mempengaruhi proses perubahan budaya serta kebiasaan menuju perubahan perilaku.
- b. Perencanaan program penyuluhan memilih masalah berdasarkan kebutuhan masyarakat
Program penyuluhan mesti memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga penting mengidentifikasi masalah yang menjadi kebutuhan kelompok. Mengambil materi pelajaran dan strategi pengajaran menurut tingkat kemampuan sasaran, kebutuhan, dan kepentingan kelompok sasaran.
- c. Perencanaan program penyuluhan menentukan tujuan dan solusi yang pasti yang menawarkan kepuasan
Tujuan dan pemecahan masalah yang diusulkan dalam rencana kerja harus fleksibel seperti bagaimana perubahan berkembang dari perencanaan sampai pelaksanaan penyuluhan program.
- d. Perencanaan program penyuluhan bersifat permanen dengan fleksibilitas
Program dipersiapkan untuk tujuan jangka panjang, namun dilaksanakan secara fleksibel tergantung kebutuhan, kemampuan, dan ketertarikan masyarakat.
- e. Perencanaan program penyuluhan mesti seimbang dengan target capaian

Kelengkapan pengetahuan sasaran kebutuhan dan kepentingan masyarakat menjadi penting. Efisiensi tenaga dan waktu dalam memecahkan kebutuhan tertentu dan masalah perlu dilaksanakan dengan professional.

2. Sebagai Proses

- a. Perencanaan program penyuluhan mempunyai rencana kerja yang pasti

Pengorganisasian yang baik dan perencanaan tindakan yang cermat merupakan kunci guna menjabarkan prosedur atau alur menurut efisiensi pelaksanaannya di semua program. Tahapan yang terlibat dalam penyuluhan perencanaan program akan dibahas dalam rencana kerja.

- b. Perencanaan program penyuluhan merupakan proses pendidikan

Bagian dari proses pendidikan dalam perencanaan seperti partisipasi dalam survei, wawancara, dan metodologi lainnya. Penyuluh berperan sebagai agen yang memberikan pendampingan dan bimbingan dalam proses pembelajaran yang mencakup pengembangan pengetahuan, menemukan fakta, mengenali serta menyatakan masalah dan mempunyai usulan pemecahan masalah. Itulah tugas penyuluh sebagai perencana penyuluhan.

- c. Perencanaan program penyuluhan adalah proses koordinasi

Didalam perencanaan penyuluh diberikan ruang guna bekerja sama dan berkoordinasi tentang kemauan lembaga, kelompok dan pimpinan guna berkerja sama dalam program terintegrasi.

- d. Perencanaan program penyuluhan merupakan proses yang berkesinambungan

Penyuluhan harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, menunjukkan pilihan kelompok sasaran, fleksibel terhadap hal yang belum pernah ada, berkerja sama dengan orang lain untuk menemukan pemecahan serta mengikuti perkembangan baik teknologi dan sosial.

- e. Perencanaan program penyuluhan mengikutsertakan masyarakat lokal dan lembaganya
Keikutsertaan masyarakat setempat dalam perencanaan adalah bagian dari proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan, selain dari mitra dan agensi yang terlibat.
- f. Perencanaan program penyuluhan menyediakan evaluasi hasil
Evaluasi dan perencanaan program penyuluhan berlangsung bersama. Guna mengetahui dan memutuskan apakah tujuan program selama perencanaan tercapai perlu dilakukan evaluasi.

7.2.5 Tahapan Dalam Perencanaan Program Penyuluhan

SAda Lima tahapan berbedada dalam perencanaan program penyuluhan menurut FAO (1997) dalam Saleh (2022).

1. Analisis situasi sekarang

Analisis situasi dilakukan dengan mengenali masalah serta penyebabnya. Tujuannya ialah untuk menetapkan kebutuhan dengan mempejari perbedaan antar pelaku utama atau usaha. Kegiatan dalam tahapan ini terbagi tiga, antara lain: mengumpulkan dan menganalisis fakta, serta mengidentifikasi masalah dan potensi. Fakta akan berbeda tergantung sumber seperti budaya, struktur sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Survei dalam wawancara terhadap sasaran atau lembaga dan organisasi pendukung akan memperoleh fakta. Harus ada pemahaman tentang perbedaan fakta, opini, dan tebakan liar. Masalah utama dapat teridentifikasi setelah mengumpulkan dan menganalisis fakta.

2. Tetapkan tujuan untuk program penyuluhan

Bagaimana cara masalah setempat akan terselesaikan dan bagaimana potensi setempat akan dikembangkan merupakan pertanyaan kunci dalam tahap ini. Tahapan dalam hal ini terdiri dari tiga yaitu: menemukan solusi, memilih solusi, menyatakan tujuan.

Mengembangkan potensi suatu daerah, termasuk pengetahuan teknis agen sendiri, pelaku utama/usaha, dana gen dari daerah lain yang memiliki kemampuan untuk menangani masalah

merupakan sumber atau ide pemecahan masalah. Solusi yang ditawarkan harus diterima oleh pelaku utama/usaha, secara teknik sehat dan teruji.

Ada tiga komponen dalam menyatakan tujuan, yakni: peserta program yang dituju, program yang akan dilakukan, perubahan apa yang diharapkan setelah belajar mengajar selesai. Harus ada perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik.

3. Kembangkan Program

Diperlukan kompilasi dari keseluruhan rencana kerja tahunan (RKTP) ketika agen penyuluhan selesai dalam merancang tujuan. RKTP menjadi penentu dalam aktivitas spesifik setiap hari.

4. Memakai program dengan memberlakukan rencana kerja

Program penyuluhan harus fleksibel agar memungkinkan adanya tanggapan dari agen. Tahapan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu rencana kerja dan pelaksanaan rencana kerja. Rencana kerja akan menetapkan aktivitas, sumberdaya yang dibutuhkan, tempat, orang yang terlibat, waktu, serta hasil yang diharapkan. Pelaksanaan rencana kerja dapat ditetapkan berdasarkan perubahan sikap orang dan mempelajari keterampilan yang ditingkatkan.

5. Evaluasi Program

Proses evaluasi bertujuan guna mengetahui pengaruh dari aktivitas penyuluhan terhadap kelompok pelaku utama atau usaha. Ada keterkaitan antara beberapa tahapan penyuluhan.

7.3 Evaluasi Program Penyuluhan

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan guna menilai suatu keadaan, gejala atau kejadian dengan menggunakan landasan tertentu (Saleh, 2022). Menurut Mardikanto (1996) dalam Saleh (2022) prinsip utama dalam melakukan evaluasi terdiri dari :

1. Evaluasi harus merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perencanaan program. Tujuan evaluasi wajib sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan program. Tujuan evaluasi ialah mengetahui sejauh mana program telah dilakukan, seberapa jauh penyimpangan dari perencanaan program.

2. Setiap evaluasi harus memenuhi syarat, diantaranya:
 - a. Objektif, dalam artian berdasar pada kenyataan
 - b. Bagian integral dari proses penyuluhan
 - c. Tujuan penyuluhan yang bersangkutan dengan berbagai alat
 - d. Metode dan hasil kegiatan penyuluhan
 - e. Hasil kuantitas serta kualitas
 - f. Mencakup tujuan, kegiatan dan metode pengumpulan data, analisis data dan interpretasinya, perbandingan hasil, penggunaan hasil, dan pengambilan keputusan.
3. Tiap evaluasi memakai alat ukur yang tidak sama untuk mengukur tujuan evaluasi yang tidak sama pula.
4. Evaluasi harusnya dinyatakan dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif.
5. Evaluasi harus efektif dan efisien.

Menurut Soedijanto (1999) dalam Saleh (2022) terdapat delapan prinsip utama dalam evaluasi penyuluhan, antara lain:

1. Berdasarkan fakta saat evaluasi.
2. bagian integral dari proses pendidikan penyuluhan merupakan evaluasi penyuluhan.
3. Evaluasi hanya bisa dilaksanakan dalam hubungan dengan tujuan dari program penyuluhan.
4. Penggunaan beberapa alat ukur dalam evaluasi penyuluhan.
5. Dilakukan terhadap metode dan juga hasil kerja penyuluh.
6. Dilaksanakan terhadap hasil kuantitatif dan kualitatif.
7. Evaluasi meliputi tujuan, kegiatan serta metode pengumpulan, analisis serta interpretasi data, perbandingan hasil, pengambilan keputusan, pemakaian hasil.
8. Evaluasi mesti dilandasi oleh prinsip mencari kebenaran.

7.3.1 Tujuan Evaluasi Program Penyuluhan

Tujuan evaluasi program penyuluhan menurut Saleh (2022), antara lain:

1. Untuk menentukan ketercapaian penyuluhan yang ditandai dengan perubahan perilaku pelaku utama atau usaha.

2. Mendapatkan informasi dari lokasi yang bisa digunakan dalam penyesuaian program penyuluhan yang sedang berjalan.
3. Mengukur efektifitas dari metode serta alat bantu yang dipakai dalam penyuluhan.
4. Guna memperoleh data laporan mengenai hal yang terjadi dilapangan.
5. Guna mendapatkan landasan bagi program penyuluhan.
6. Memberikan kepuasan psikologi untuk orang yang terlibat dalam program penyuluhan.

7.3.2 Manfaat Evaluasi Program Penyuluhan

Manfaat evaluasi program penyuluhan menurut Saleh (2022) antara lain:

1. Untuk mengetahui ketercapaian program penyuluhan.
2. Mencari bukti perubahan yang telah terjadi.
3. Mengetahui kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan pencapaian tujuan.
4. Menilai efektifitas dan efisiensi metode penyuluhan yang telah dilaksanakan.
5. Memperkuat desain program.
6. Mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas program.
7. Terlibat dalam perubahan yang konstruktif dalam menaikkan efektivitas program.
8. Membantu mengetahui keberhasilan penyuluhan dan bagian yang belum tercapai.
9. Memperkuat hubungan antara strategi program dan keberhasilan adopsi inovasi.

Merujuk hasil evaluasi maka didapatkan anjuran mengenai program yang dilakukan dalam rangka penetapan keputusan. Terdiri dari empat kemungkinan yang bisa dilaksanakan para pengambil kebijakan berkaitan dengan program yang sudah dievaluasi, yaitu:

1. Program yang tidak memiliki manfaat dapat diputuskan untuk dihentikan.

2. Program yang memiliki kelemahan tetapi memberikan manfaat dapat direvisi.
3. Program yang telah berjalan sesuai dengan tujuan dan target dapat terus dilanjutkan.
4. Program yang telah berhasil dalam pelaksanaannya serta memberikan manfaat terhadap pengguna program dapat disebarluaskan.

Menurut Razi (2010), Evaluasi dan monitoring merupakan aktivitas dalam rangka mengawasi dan menilai tingkat pencapaian program penyuluhan yang telah disusun sebelumnya secara sistematis. Evaluasi serta monitoring direncanakan dan dilaksanakan oleh lembaga terkait yang membawahi penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Razi, Fahrur. 2010. *Buku Pintar Kompetensi Dasar Bagi Penyuluh Perikanan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Saleh, Kherul. 2022. *Evaluasi dan Program Penyuluhan*. Tangerang: Media edukasi Indonesia.
- Sugiharto, Eko. 2021. *Modul Perencanaan dan Evaluasi Program Penyuluhan*. Samarinda: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Mulawarman.

BIODATA PENULIS



Wa Ode Sry Wulan, S.Pi., M.Si

Dosen Program Studi Teknologi Pembenihan Ikan
Politeknik Bombana

Penulis lahir di Raha tanggal 18 April 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknologi Pembenihan Ikan, Politeknik Bombana. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Budidaya Perairan di Universitas Dayanu Ikhsanuddin dan melalui beasiswa penulis melanjutkan S2 pada Jurusan Akuakultur di Institut Pertanian Bogor. Sejak duduk dibangku sekolah menengah pertama hingga saat ini, penulis sangat menekuni kegiatan tulis menulis seperti membuat puisi, cerpen mading dan kliping. Namun menulis buku kolaborasi mengenai ilmu pengetahuan merupakan project pertama penulis.

BIODATA PENULIS



Muh. Azril, S.S.T.Pi, M.Sc.

Dosen Program Studi Akuakultur
Fakultas Pertanian Universitas Tidar - Magelang

Penulis lahir di Pamol Estate (Malaysia) tanggal 17 Oktober 1991. Penulis yang kerap disapa Azril ini merupakan anak dari pasangan Deling dan Ernawati. Istri penulis bernama Rianti Novtasari dan telah dikarunia seorang putra bernama Muhammad Mu'adz Zaidan Azril. Penulis berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang kini menjadi dosen PNS pada Program Studi Akuakultur Fakultas Pertanian, Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah sejak Mei 2022. Tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan Diploma VI dan meraih gelar Sarjana Sains Terapan Perikanan (S.S.T.Pi) pada Jurusan Penyuluhan Perikanan di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta dan Tahun 2019 penulis menyelesaikan pendidikan Master dan meraih gelar *Master of Science (M.Sc) in Aquaculture and Marine Resource Management* di Wageningen University and Reserach (WUR) The Netherlands. Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai Penyuluh Perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Tahun 2013. Penulis juga pernah bekerja sebagai tenaga kependidikan dan asisten dosen di Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Jakarta pada Tahun 2014-2015. Pada Tahun 2020-2021, penulis bekerja sebagai sebagai *Aqauculture Specialist* di Yayasan *World Wildlife for Fund (WWF)* Indonesia. Pengalaman kerja penulis lainnya adalah sebagai *Manager Area* di salah satu *startup* perikanan

bernama PT. Aruna Jaya Nuswantara pada Tahun 2021-2022. Sejak Tahun 2022 hingga saat ini, penulis juga menjadi bagian dari Yayasan BLUE SEED Indonesia yang fokus pada kegiatan konservasi lingkungan. Saat ini penulis juga menjadi bagian dari startup Crustea sebagai konsultan dibidang akuakultur. Buku ini merupakan buku keempat penulis selama berkakir menjadi dosen sejak bulan Mei 2022. Sebelumnya penulis menghasilkan buku bersama yang berjudul "Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan", "Rekaya Akuakultur", dan "Budidaya Perikanan Laut". Kedepannya, penulis berharap dapat terus menulis banyak buku agar dapat menjadi pilihan bahan referensi bagi pembaca dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.

BIODATA PENULIS



Sri Herlina, S.Pi., M.P

Dosen Program Studi Budidaya Ikan
Politeknik Seruyan

Penulis lahir di Samuda tanggal 13 Oktober 1982. Anak dari Bapak Kustar dan Ibu Barlian. Menyelesaikan Pendidikan S1 Pada Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya dan Melanjutkan Studi S2 pada Jurusan Ilmu Perikanan Universitas Lambung Mangkurat Dengan Konsentrasi Penyakit Ikan. Setelah Lulus Pada Tahun 2011-2021 Penulis Mengajar Di Program Studi Budidaya Perairan Universitas Darwan Ali. Dan Pada Tahun 2022 Penulis Menjadi Dosen DPK Di Program Studi Budidaya Ikan Politeknik Seruyan. Penulis saat ini menekuni penelitian di bidang penyakit ikan, pakan.

BIODATA PENULIS



Dra. Endang Gunaisah, Ph.D

Dosen Program Studi Teknik Penangkapan Ikan
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Penulis, Dosen Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Riwayat pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Brebes, melanjutkan S1 FKIP (Pendidikan Biologi) UNS Surakarta, S2 Teknologi Kelautan IPB, dan S3 Ph.D Geografi Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia. Pengalaman Jabatan Pembantu Direktur (Pudir I) 2008-2014, Pudir II 2014-2017, Direktur PKP Sorong (2017-2021), Dosen pengampu Pengantar Maritim Indonesia, Kreatifitas dan Inovasi Kewirausahaan, dan Manajemen Kapal Perikanan - present, dan Coach kewirausahaan bagi pemula, 2020 – present.

BIODATA PENULIS



Dr. Trisnani Dwi Hapsari, S.Pi, M.Si.

Staf Dosen Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan,
FPIK, Undip

Penulis lahir di Semarang tanggal 04 Juli 1982. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Departemen Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Institut Pertanian Bogor pada Tahun 2004, serta pendidikan S2 dan S3 pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Diponegoro. Konsentrasi penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan yaitu terkait dengan bidang Sosial Ekonomi Perikanan, Manajemen Bisnis Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Beberapa buku kolaborasi dengan beberapa dosen di berbagai universitas yang telah terbit antara lain : Manajemen dan Perencanaan Bisnis Perikanan, Pengantar Ekonomi Makro, Pemberdayaan Masyarakat, Kewirausahaan, Pengantar Bisnis dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan di Indonesia Menuju Ekonomi Biru. Penulis dapat dihubungi melalui email: trisanihapsari@live.undip.ac.id

BIODATA PENULIS



Ir. Akmaluddin, S.Pi, M.Si, IPM

Dosen Program Studi Budidaya Perairan
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis lahir di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo pada tahun 1987. Setelah lulus dari SMA pada 2006, melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar. Lulus strata satu (S1) sebagai sarjana perikanan pada 2011 pada prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, tahun yang sama melanjutkan strata dua (S2) pada program studi Ilmu Perikanan Universitas Hasanuddin, dan selesai tahun 2014. Kemudian melanjutkan program profesi insinyur teknik perikanan di Institut Pertanian Bogor tahun 2023 melalui jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau).

Saat ini penulis merupakan staf pengajar pada prodi Budidaya Perairan Jurusan Perikanan Universitas Muhammadiyah Makassar sejak tahun 2014 hingga saat ini. Penulis pernah berprofesi sebagai Penyuluh Perikanan Bantu dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan membina 13 kelompok pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan. Penulis juga merupakan Anggota Muda Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sejak tahun 2021 Bidang Teknik Perikanan dan Kelautan yang masih dibawah Badan Kejuruan Teknik Kehutanan dengan posisi Insinyur Profesional Madya. Penulis juga tersertifikasi oleh BNSP dibidang PenanggungJawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA)

sejak tahun 2022. Penulis juga aktif mengikuti perkembangan teknologi digital dengan mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus pada Bidang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligent) untuk dosen dan Internet Of Things : Smart Aquaculture oleh Program Digitalent Scholarship Kementerian Informasi dan Komunikasi RI. Penulis juga adalah Narasumber pada Tema Digital Marketing dan Mikro Mentor UMKM Maju Digital. Sejumlah publikasi ilmiah telah dihasilkan penulis dan diterbitkan pada jurnal dan prosiding baik level nasional maupun internasional. Saat ini penulis dilibatkan sebagai Sekretaris Tim Persiapan Pembukaan Prodi Profesi Insinyur bidang Teknik Kehuatan dan Rumpun ilmu Hayati Universitas Muhammadiyah Makassar setelah mendapat mandat dari Badan Kejuruan Teknik Kehutanan PII pusat, Dirjen Dikti Kemenristek dikti, dan Pimpinan Unismuh Makassar.

BIODATA PENULIS



Reski Fitriah, S.Pi., M.Si.

Dosen Program Studi Perikanan Tangkap
Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Sulawesi Barat

Penulis lahir di Majene pada tanggal 16 April 1991, anak dari Drs. Yahyaddin Harun, M.Pd (Alm) dan Maisuri. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perikanan Tangkap, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Sulawesi Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SDN 16 Garo'go kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Majene, selanjutnya di SMAN 1 Majene. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada tahun 2012 di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Universitas Hasanuddin dan Pendidikan S2 pada tahun 2015 di Program Studi Ilmu Perikanan, Universitas Hasanuddin. Bidang ilmu yang digeluti penulis yaitu Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.